

Sugiyono • Muji Rahayu • Gunawan



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Untuk SMP / MTs Kelas IX



Sugiyono • Muji Rahayu • Gunawan

Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk SMP/MTs Kelas IX



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

3

Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk SMP / MTs Kelas IX

Sugiyono
Gunawan
Muji Rahayu



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional
Dilindungi Undang-Undang

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
untuk SMP Kelas IX

Penyusun : Sugiyono, S.Pd
Gunawan, S.Pd
Muji Rahayu, S.Pd

Koordinator Penulis : Dwi Joko Susilo, S.Pd
Drs. Aris Munandar, M.Pd

Editor : Adi Himawan, S.Sos.
Toto Suparto, M.Hum.

Setting & Layout : Agung Widhi
Desainer Sampul : Agung Widhi

Ukuran buku : 17,6 x 25 cm

370.114 7

SUG
p

SUGIYONO

Pendidikan Kewarganegaraan 3: Untuk SMP/MTs Kelas XI /
penyusun, Sugiyono, Muji Rahayu, Gunawan ; editor, Adi Himawan,
Toto Suparto. — Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen
Pendidikan Nasional, 2009.
vi, 118 hlm. : ilus. ; 25 cm.

Bibliografi : hlm. 116-117

Indeks

ISBN 978-979-068-878-0 (no jld lengkap)

ISBN 978-979-068-891-9

1. Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan Pengajaran I Judul
II. Muji Rahayu III. Gunawan IV. Toto Suparto

Hak Cipta Buku ini dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional
dari Penerbit Hamudha Prima Media

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2009

Diperbanyak oleh

Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2009, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2008 tanggal 7 November 2008.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (*down load*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juni 2009
Kepala Pusat Perbukuan

Kata Pengantar

Kami memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan perkenan-Nya, dapat diselesaikan penyusunan buku pegangan pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas IX.

Buku ini disusun berdasarkan Standar Isi Peraturan Mendiknas No 22 Tahun 2006, dengan harapan agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Diharapkan pula peserta didik berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta antikorupsi.

Tujuan lain dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah peserta didik memiliki kemampuan berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa bangsa lain.

Kami juga berharap buku ini dapat bermanfaat bagi para guru dalam rangka menyampaikan materi pendidikan kewarganegaraan. Mudah-mudahan pengalaman kami sebagai pendidik bidang studi kewarganegaraan, yang diasah dengan berbagai pelatihan, bisa ditularkan kepada rekan-rekan guru.

Namun begitu kami menyadari buku ini masih terdapat kekurangan. Atas dasar ini, kami terbuka atas berbagai kritik dan masukan dari berbagai pihak guna memperbaiki buku ini di masa mendatang. Tak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada Penerbit Hamudha Prima Media, para editor, desainer, maupun penata halaman, atas kerja sama nya dalam proses penerbitan buku ini.

Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca.

November 2006

Tim Penyusun

Daftar Isi

| | |
|-----------------------------|-----|
| Kata Sambutan | iii |
| Kata Pengantar | iv |
| Daftar Isi | v |

Bab 1

| | |
|---|----|
| Pembelaan Negara | 1 |
| A. Hakikat Negara | 2 |
| B. Kewajiban Pembelaan Negara | 14 |
| C. Bentuk-Bentuk Usaha Pembelaan Negara | 18 |
| D. Peran Serta dalam Upaya Pembelaan Negara | 24 |
| Rangkuman | 29 |
| Uji Kompetensi | 30 |

Bab 2

| | |
|---|----|
| Otonomi Daerah | 33 |
| A. Hakikat Otonomi Daerah | 35 |
| B. Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik di Daerah | 47 |
| Rangkuman | 56 |
| Uji Kompetensi | 57 |

Daftar Isi

Bab 3

Globalisasi dan Dampaknya bagi

| | |
|--|----|
| Masyarakat serta Negara | 59 |
| A. Hakikat Globalisasi | 61 |
| B. Politik Luar Negeri Indonesia | 66 |
| C. Dampak Globalisasi terhadap Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara | 70 |
| D. Menyikapi Dampak Globalisasi | 75 |
| Rangkuman | 78 |
| Uji Kompetensi | 79 |

Bab 4

| | |
|--|-----|
| Prestasi Diri | 81 |
| A. Hakikat Prestasi Diri | 82 |
| B. Potensi Diri | 87 |
| C. Berperan Aktif dalam Berbagai Aktivitas untuk Mewujudkan Prestasi Diri | 93 |
| Rangkuman | 98 |
| Uji Kompetensi | 99 |
| Soal latihan | 101 |
| Glosarium | 110 |
| Indeks | 114 |
| Daftar Pustaka | 116 |



Pembelaan Negara

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, siswa mampu :

- Menjelaskan hakikat negara
- Menjelaskan kewajiban membela negara
- Menunjukkan bentuk-bentuk usaha pembelaan negara
- Menampilkan sikap berpartisipasi dalam upaya pembelaan negara

Kata Kunci : pembelaan negara, rakyat, wilayah, kedaulatan, pertahanan, ancaman

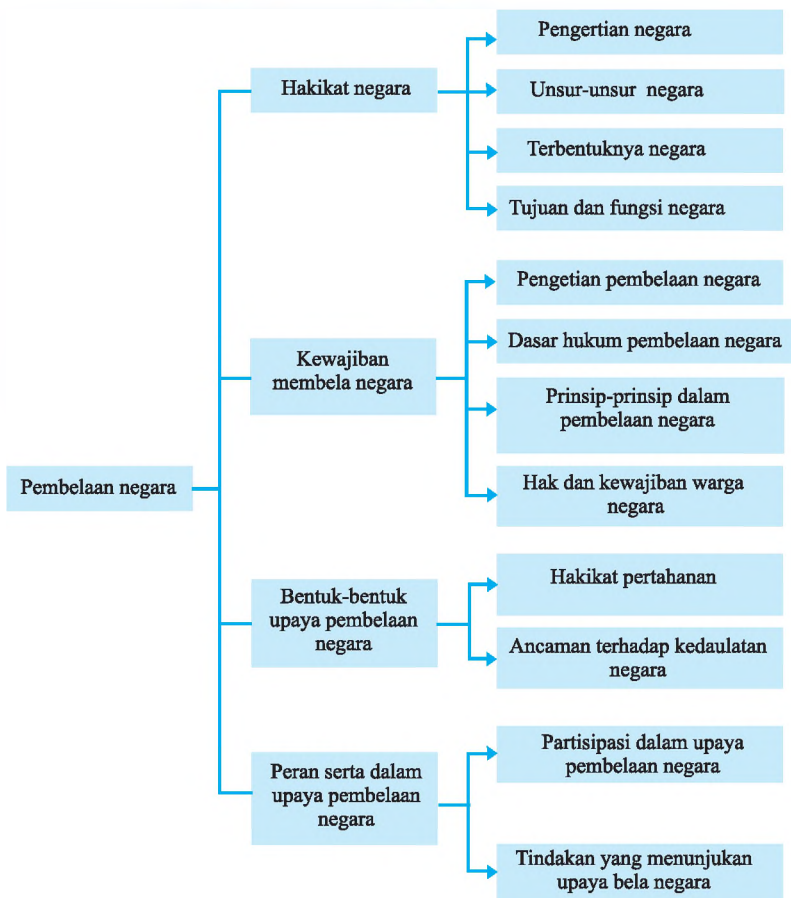
Pernahkah terbersit dalam pemikiran kalian, bagaimana kemerdekaan bangsa Indonesia bisa diraih? Kemerdekaan diraih bukan dengan cara yang mudah, dibutuhkan perjuangan yang tidak kenal lelah. Para pejuang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa dan negara. Mengapa demikian? Sebab, para pejuang memiliki rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Betapa pentingnya usaha dalam pembelaan negara. Kemerdekaan tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus dengan usaha dan tekad yang kuat untuk meraihnya. Menurut kalian apakah pembelaan negara berakhir saat kemerdekaan dapat diraih?

Tentu tidak, masih hangat dalam ingatan kita bersama pada tahun 2002, dua pulau yakni Sipadan dan Ligitan juga lepas dari wilayah Indonesia dan menjadi wilayah Malaysia. Kita bersyukur gejolak di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dalam bentuk Gerakan Aceh Merdeka tidak sampai pada pemisahan provinsi tersebut dari bumi Indonesia. Kesepakatan damai yang ditandatangani 15 Agustus 2005 merupakan tanda NAD tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa kejadian ini tentu jangan sampai terulang lagi di masa yang akan datang, kita mempunyai kewajiban menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagaimanakah cara keterlibatan warga negara dalam upaya pembelaan negara? Dalam bab ini kita akan belajar tentang pembelaan negara, upaya dan bentuk peran serta masyarakat dalam pembelaan negara. Agar kalian mendapatkan gambaran pokok-pokok bahasan yang akan dipelajari, simak dahulu peta konsep berikut ini.

Peta Konsep



Dari peta konsep di atas kita mendapatkan gambaran bahwa dalam bab ini akan belajar tentang hakikat negara, kewajiban membela negara, bentuk-bentuk usaha pembelaan negara serta sikap berpartisipasi dalam upaya pembelaan negara. Bagaimana selengkapnya, kalian bisa ikuti penjelasannya berikut ini.

A. Hakikat Negara

Istilah negara tentu sudah sangat akrab di telinga dan sudah biasa kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan negara? Dalam sub bab ini kita akan belajar tentang hakikat negara termasuk di dalamnya pengertian, unsur-unsur terbentuknya negara serta tujuan dan fungsi negara.

1. Pengertian negara

Untuk memahami pengertian negara terlebih dahulu marilah kita pahami istilah negara. Dalam bahasa Jerman dan Belanda istilah negara dikenal dengan *staat*. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *state* dan dalam bahasa Perancis dikenal dengan *etat* serta dalam bahasa Latin disebut dengan *statum*.

Menurut Marcus Tullius Cicero, *statum* diartikan sebagai kedudukan yang berkaitan dengan persekutuan orang. Pendapat lain dikemukakan oleh Prof. Mr. L.J. van Apeldoorn, dalam bukunya yang berjudul “Inleiding tot de Studie van Het Nederlandsche Recht” negara diartikan sebagai penguasa, yaitu untuk menyatakan bahwa orang atau orang-orang yang melakukan kekuasaan tertinggi atas persekutuan rakyat yang bertempat tinggal dalam suatu daerah. Berdasarkan istilah tersebut maka negara dapat diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat.

Agar lebih memahami lagi, berikut ini pendapat para pakar yang memberikan pengertian tentang negara (Budiyanto, 2003;3).

- a. George Jellinek (1851-1911), seorang pakar tata negara berkebangsaan Jerman menyatakan; negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.
- b. Mr. Kranenburg
Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.
- c. Prof. Dr. Djokosoetono
Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

Berdasarkan pendapat para pakar di atas, secara ringkas dapat dijelaskan bahwa negara merupakan kumpulan orang yang telah mempunyai kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama. Kelompok masyarakat tersebut mempunyai rasa senasib dan sepenanggungan untuk hidup bersama di dalam suatu wilayah, membentuk organisasi masyarakat dan memiliki pemerintahan yang sah untuk mengatur warga atau masyarakatnya.



2. Unsur-unsur negara

Kalian tentu masih ingat dalam penjelasan di atas disebutkan bahwa negara merupakan organisasi masyarakat. Sebagai sebuah organisasi maka negara terdiri dari berbagai unsur yang membentuknya. Suatu negara dapat berdiri dengan kokoh apabila keseluruhan unsur-

Unsur-unsur negara:

Unsur konstitutif : rakyat, wilayah, penguasa

Unsur deklaratif : kesanggupan menjalin hubungan dan pengakuan dari negara lain



unsur itu dapat terpenuhi. Apa saja unsur-unsur yang membentuk suatu negara?

Berdasarkan Konvensi Montevideo (Budiyanto, 2003:13), unsur-unsur negara meliputi unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif antara lain; rakyat (penghuni), wilayah yang permanen, penguasa yang berdaulat. Sedangkan yang termasuk dalam unsur deklaratif adalah kesanggupan menjalin hubungan dengan negara lain dan pengakuan dari negara lain.

Sedangkan, ahli kenegaraan, Oppenheimer dan Lauterpacht, (Budiyanto, 2004: 24), mengatakan syarat berdirinya negara meliputi empat hal yaitu;

- a. Adanya rakyat yang bersatu,
- b. Adanya daerah atau wilayah
- c. Pemerintah yang berdaulat.
- d. Pengakuan dari negara lain.

Seorang pakar ilmu politik Indonesia, Mirriam Budiardjo (1986:41), menyatakan bahwa unsur-unsur pembentukan negara ada empat macam, yaitu:

- a. Wilayah,
- b. Penduduk,
- c. Pemerintah, dan
- d. Kedaulatan

Bagaimana penjelasannya? Kalian ikuti paparan berikut ini

a. Rakyat

Dalam suatu negara rakyat merupakan unsur yang sangat penting. Suatu negara tidak dapat berdiri apabila tidak memiliki rakyat. Tahukah kalian, apa pengertian rakyat? Rakyat adalah semua orang yang berdiam dalam suatu negara atau menjadi penghuni negara yang tunduk pada kekuasaan negara itu.

Rakyat dalam suatu negara dapat dibedakan menjadi penduduk dan bukan penduduk, warga negara dan bukan warga negara. Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara secara tetap. Penduduk dalam suatu negara harus memenuhi unsur kediaman yang tetap. Mereka lahir secara turun-temurun dan besar di dalam suatu negara tertentu. Bagi mereka yang tidak mendiami suatu wilayah secara tetap, tidak dapat disebut sebagai penduduk.

Pengertian bukan penduduk adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Misalnya, para turis manca negara atau tamu-tamu instansi suatu negara. Apa yang membedakan antara penduduk dan bukan penduduk? Perbedaan yang paling dasar adalah hak dan kewajibannya. Sebagai contoh dalam pemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), hanya yang berstatus penduduk saja yang dapat memiliki KTP suatu negara.



Sumber :www.google.co.id

Gambar 1.1 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu alat bukti apakah seseorang adalah penduduk ataukah bukan penduduk.

Dalam hubungannya dengan negara, rakyat dapat dibedakan menjadi dua yaitu warga negara dan bukan warga negara. Warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum secara sah merupakan anggota dari suatu negara. Sedang yang bukan warga negara adalah mereka yang berada pada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, tetapi tunduk pada pemerintahan di mana mereka berada.

Bagaimana cara suatu negara menetapkan kewarganegaraan seseorang? Suatu negara menetapkan kewarganegaraan seseorang sesuai dengan asas yang dipakai negara tersebut. Ada tiga asas untuk menetapkan kewarganegaraan, yaitu asas ius sanguinis, ius soli, dan naturalisasi.

Asas ius sanguinis adalah suatu cara penetapan kewarganegaraan seseorang berdasarkan garis keturunan dari orang tua. Dengan demikian, apabila anak yang lahir dari ayah dan ibu yang berkewarganegaraan Indonesia, meskipun anak tersebut lahir dimanapun orang tuanya berada tetap berkewarganegaraan Indonesia.

Tiga asas untuk menetapkan kewarganegaraan:

Asas ius sanguinis, ius soli dan naturalisasi



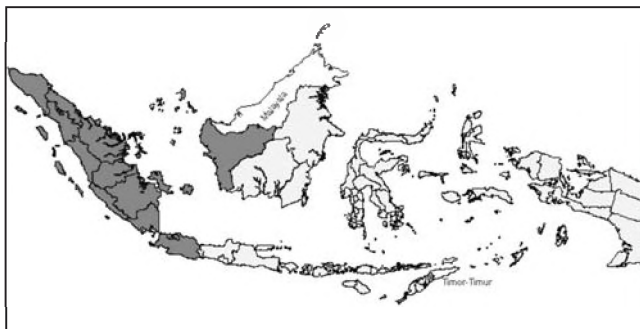
Ius soli adalah suatu cara penetapan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Contoh penetapan kewarganegaraan berdasarkan asas ius soli adalah jika anak lahir dari orang tua yang berkewarganegaraan A dan lahir di negara B maka anak tersebut berkewarganegaraan B.

Selain mempergunakan dua asas tersebut, penetapan kewarganegaraan bisa juga dengan naturalisasi. Naturalisasi adalah suatu cara penetapan kewarganegaraan seseorang berdasarkan proses hukum yang berlaku dalam suatu negara yang menyebabkan seseorang

mendapatkan kewarganegaraan. Seseorang yang akan memperoleh kewarganegaraannya harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku dalam suatu negara yang didiami.

b. Wilayah

Wilayah merupakan unsur yang penting bagi suatu negara sebagai tempat berlindung bagi rakyat sekaligus sebagai tempat bagi pemerintah untuk mengorganisir dan menyelenggarakan pemerintahan. Namun, berdirinya suatu negara, tidak terpengaruh



Sumber : www.google.co.id

Gambar 1.2 Wilayah Indonesia sangat luas, terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil seperti tergambar dalam peta

dengan luas atau sempitnya wilayah yang dimilikinya. Bisa jadi suatu negara hanya memiliki wilayah sempit. Bisa juga suatu negara memiliki wilayah kekuasaan luas. Meski demikian, wilayah suatu negara harus permanen. Mengapa? Tanpa ada wilayah yang permanen, suatu negara tidak dapat terbentuk sebab penduduknya tidak dapat berdiam di dalamnya.

Bagaimana menentukan wilayah suatu negara? Wilayah suatu negara meliputi darat, laut, dan udara. Batas wilayah darat suatu negara dibatasi oleh wilayah darat dan/atau wilayah laut negara lain yang berbatasan dengan negara yang bersangkutan. Perbatasan suatu wilayah negara ditentukan melalui perjanjian internasional.



Sumber : www.sctv.co.id

Gambar 1.3 Batas wilayah Indonesia dengan Timorleste berupa sungai kecil.

Batas wilayah suatu negara dapat berupa batas alam seperti sungai, danau, laut, pegunungan, atau lembah. Atau batas buatan berupa pagar tembok, pagar kawat berduri dan perbatasan menurut ilmu pasti yaitu mempergunakan garis lintang. Wilayah lautan suatu negara terdiri dari perairan daratan, laut pedalaman dan laut wilayah (teritorial). Wilayah udara meliputi udara yang berada di atas wilayah darat dan laut (perairan) teritorial suatu negara. Ruang udara yang menjadi wilayah suatu negara berbeda dengan

ruang angkasa. Ruang angkasa adalah suatu wilayah yang tidak dapat dimiliki. Ruang angkasa ini dipergunakan seluruh umat manusia.

c. Pemerintah yang berdaulat

Suatu negara harus mempunyai institusi pemerintahan yang mempunyai kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan dan berdaulat penuh mengatur negaranya. Tahukah kalian apa yang dimaksud pemerintah yang berdaulat?

Pemerintah yang berdaulat adalah suatu pemerintah yang mempunyai kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar, untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Kedaulatan ke dalam berarti bahwa kekuasaan negara tersebut dapat mengatur kehidupan negaranya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedaulatan keluar berarti bahwa kekuasaan negara tersebut dapat mempertahankan negaranya sebagai negara merdeka dan berdaulat. Negara dapat menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lainnya. Negara lain harus pula menghormati kekuasaan negara yang bersangkutan, dengan tidak mencampuri urusan dalam negerinya.

Pengertian pemerintahan dapat dibedakan atas pemerintahan dalam arti sempit dan pemerintahan dalam arti luas. Pemerintahan dalam arti sempit adalah kekuasaan eksekutif saja. Dalam UUD 1945 yang dimaksud pemerintah adalah presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri. Pemerintah dalam arti luas merupakan gabungan dari semua lembaga kenegaraan atau gabungan dari seluruh alat perlengkapan negara yang meliputi badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Pengertian pemerintahan:

Pemerintahan dalam arti sempit adalah kekuasaan eksekutif.

Pemerintah dalam arti luas meliputi badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif



Sumber :www.google.co.id

Gambar 1.4 Pemerintahan dapat dibedakan atas pemerintahan dalam arti sempit dan pemerintahan dalam arti luas. Pemerintahan dalam arti sempit adalah kekuasaan eksekutif yakni presiden yang dibantu wakil presiden dan para menterinya.

d. Pengakuan dari negara lain.

Suatu negara yang baru berdiri memerlukan pengakuan dari negara lain sebagai negara berdaulat. Pengakuan dari negara lain merupakan unsur tambahan bagi berdirinya suatu negara. Berdasarkan konvensi Montevideo, pengakuan dari negara lain merupakan

unsur deklaratif. Hal ini dikarenakan, adanya pengakuan dari negara lain berarti awal hubungan diplomatik antar negara.

Bagaimanakah pengakuan dari negara lain? Unsur pengakuan dari negara lain meliputi pengakuan secara de facto dan de jure. Pengakuan secara de facto adalah pengakuan berdasarkan kenyataan (fakta) dan bisa bersifat sementara. Secara de facto berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan dibacakan proklamasi kemerdekaan maka sejak saat itulah kenyataan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berdiri. Secara de facto negara lain mengakui berdirinya negara Republik Indonesia.

Sedangkan, Negara Kesatuan Republik Indonesia secara de jure diakui oleh dunia internasional sejak tanggal 18 Agustus 1945. Pengakuan secara de jure adalah pengakuan terhadap syahnya suatu negara menurut hukum internasional. Dengan adanya pengakuan secara de jure, suatu negara yang baru berdiri mendapat hak dan kewajiban sebagai bagian dari masyarakat internasional. Hak yang diperoleh adalah suatu negara dapat diperlakukan sebagai negara yang berdaulat penuh oleh negara lain. Sedang kewajibannya adalah bertindak sebagai negara dan berusaha menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan internasional.



1.1

Diskusikan bersama kelompok belajarmu, bagaimanakah pendapat kelompokmu apabila suatu negara yang telah merdeka akan tetapi negara lain belum mengakui keberadaan negara tersebut? Berikanlah contohnya! Carilah informasi dari berbagai sumber, koran, majalah, internet! Presentasikan hasilnya di depan kelas!

3. Terbentuknya Negara

Pernahkah kalian bayangkan bagaimana awal terbentuknya suatu negara? Terbentuknya suatu negara memang tidak mudah. Perlu proses yang panjang dan kemauan dari rakyat sebagai pendirinya untuk menyatukan diri di bawah satu organisasi masyarakat yang disebut negara dengan tujuan dan cita-cita yang sama.

Terbentuknya suatu negara dapat terjadi secara primer dan sekunder.

a. Terbentuknya negara secara primer

Secara primer suatu negara terbentuk diawali dengan adanya kebutuhan dan kesadaran bersama bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hidup tanpa bantuan orang lain. Untuk itu manusia harus bekerjasama dengan manusia lain.

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup, manusia membentuk kelompok yang dinamakan keluarga. Dari keluarga, kemudian terus berkembang menjadi kelompok masyarakat hukum yang dinamakan suku. Sebuah suku dipimpin oleh seorang kepala suku yang berperan sebagai *primus inter pares*, artinya orang yang pertama di antara yang sederajat. Dari satu suku kemudian berkembang menjadi dua suku, tiga suku, dan seterusnya menjadi semakin kompleks dan besar.

Terbentuknya kelompok besar ini didasari adanya persamaan nasib, persamaan budaya dan lain sebagainya. Kelompok ini kemudian dipimpin oleh seorang diantara mereka yang dianggap terkemuka yang disebut raja. Dalam perkembangannya kemudian muncul suatu gagasan dari tiap-tiap kelompok, mempunyai keinginan untuk memiliki kekayaan, seperti tanah, harta benda lainnya. Dengan adanya keinginan-keinginan tersebut kemudian mendorong tumbuhnya kesadaran untuk membentuk negara untuk mengorganisir berbagai kepentingan tersebut. Warga negara kemudian memilih seorang pemimpin. Dengan terpilihnya seorang pemimpin, maka rakyat menyerahkan kekuasaan tertinggi kepada pemimpin tersebut.

b. Terbentuknya negara secara sekunder

Terbentuknya negara secara sekunder adalah terjadinya suatu negara dipandang dari lingkungan negara lain. Negara yang baru berdiri dapat dinyatakan sebagai negara apabila telah memperoleh pengakuan dari lain. Pengakuan akan datang dari negara lain apabila suatu negara telah memproklamasikan kemerdekaannya.

Pengakuan dari negara lain merupakan unsur yang penting bagi berdirinya suatu negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, sebelumnya merupakan negara yang terjajah. Dengan proklamasi kemerdekaan berarti mengakhiri pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, negara-negara lain mengakui baik secara *de facto* ataupun secara *de jure*. Pemerintah baru Indonesia berhak menyusun kekuasaan untuk menentukan nasib sendiri.



Sumber: buku 30 tahun Indonesia Merdeka

Gambar 1.5 Pembacaan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 oleh Ir. Soekarno menjadi tanda berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Negara Indonesia kemudian mempunyai pemerintah yang mandiri, tertib, stabil dan kuat. Akhirnya negara Indonesia dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan baik, secara *de facto* dan *de jure* keberadaannya diakui dunia.

4. Tujuan dan Fungsi Negara.

Negara merupakan organisasi manusia yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama. Setiap negara mempunyai tujuan yang berbeda. Untuk mencapai tujuannya, negara mempunyai tugas; mengatur kehidupan, menyelenggarakan pemerintahan dengan sebaik-baiknya sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Apakah yang dimaksud dengan tujuan dan fungsi suatu negara?

a. Tujuan negara

Setiap negara dibentuk tentu bukan tanpa tujuan. Seperti halnya ketika kalian membentuk kelompok belajar mendirikan *club* hobi membaca atau membentuk kelompok tari. Kalian tentu mempunyai tujuan tertentu, misalnya agar mudah dalam belajar atau agar hobi dapat tersalurkan dan makin terarah. Bagaimana dengan tujuan negara?



Sumber : www.google.co.id

Gambar 1.6 Sidang kabinet rutin dilakukan untuk merumuskan kebijakan, mengatur kehidupan, menyelenggarakan pemerintahan dengan sebaik-baiknya sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai.

Tujuan negara adalah suatu sasaran yang hendak dicapai oleh suatu negara, merupakan ide yang bersifat abstrak-ideal berisi harapan yang dicita-citakan. Tujuan utama berdirinya negara pada hakikatnya sama, yaitu menciptakan kebahagiaan rakyatnya (*bonum publicum/commonwealth*).

Menurut Muhlisin (2005) secara umum tujuan negara dapat di kelompokkan menjadi tiga hal yaitu:

- a. Untuk memperluas kekuasaan,
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum.
- c. Mencapai kesejahteraan umum.

Untuk lebih memahami tentang tujuan negara, berikut ini pendapat para ahli mengenai tujuan negara:

1. Thomas Aquinas dan St. Agustinus
Tujuan negara adalah untuk menciptakan penghidupan dan kehidupan aman dan tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan
2. Charles E. Merriam
Tujuan negara adalah sebagai berikut;

- a) Keamanan ekstern (eksternal security), artinya negara bertugas melindungi warga negaranya terhadap ancaman dari luar.
- b) Pemeliharaan ketertiban intern (maintenance of internal order), artinya dalam masyarakat yang tertib terdapat pembagian kerja dan tanggung jawab pelaksanaan peraturan-peraturan pada segenap fungsionaris negara, terdapat pula badan-badan, prosedur dan usaha-usaha yang dimengerti oleh segenap warga negara dan dilaksanakan untuk memajukan kebahagiaan bersama.

Pendapat lain tentang tujuan negara:

Menurut Plato (427 SM-347SM), seorang filsuf Yunani: tujuan negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia baik sebagai perseorangan (individu) maupun sebagai makhluk sosial



- c) Fungsi keadilan (justice), terwujudnya suatu sistem di mana terdapat saling pengertian dan prosedur-prosedur yang diberikan kepada setiap orang apa yang telah disetujui dan telah dianggap patut.
- d) Kesejahteraan (welfare), kesejahteraan meliputi keamanan, ketertiban, keadilan dan kebebasan.
- e) Kebebasan (freedom), adalah kesempatan mengembangkan dengan bebas hasrat - hasrat individu akan ekspresi kepribadiannya yang harus disesuaikan gagasan kemakmuran umum.

Bagaimana dengan tujuan negara Indonesia? Tujuan Negara Indonesia seperti tertuang dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, yaitu

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum,
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa,
- d. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.



Sumber : www.google.co.id

Gambar 1.7 Salah satu tujuan berdirinya negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan adalah sarana untuk meraih tujuan tersebut.



Tugas 1.1

Carilah berita dari salah satu media massa yang memberitakan tentang program yang sedang dijalankan pemerintah dalam usaha mencapai tujuan negara. Potonglah berita tersebut kemudian tempelkan pada selembar kertas. Berikan komentar terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah tersebut!

b. Fungsi Negara

Setiap negara selain mempunyai tujuan juga memiliki fungsi yang harus dipahami oleh setiap warga negaranya. Apakah yang menjadi fungsi dari suatu negara? Untuk mengetahui tentang fungsi suatu negara, perlu kiranya mengetahui pengertian fungsi negara terlebih dahulu.

Fungsi negara adalah pelaksanaan dari tujuan yang hendak dicapai, menunjukkan gerak dalam dunia nyata. Negara yang baik adalah negara yang dapat menggerakkan roda pemerintahan secara efektif. Jika demikian maka berfungsi atau tidaknya sebuah negara dapat dilihat dari berjalan atau tidaknya roda pemerintahan.

Menurut Robert Mac Iver, fungsi negara dibedakan menjadi; fungsi negara yang tetap dilaksanakan oleh semua negara yakni fungsi di bidang kebudayaan dan perekonomian. Fungsi kebudayaan dari negara terletak dalam aktivitas rakyat sendiri. Dalam hal ini, negara hanya memajukan dan melengkapi serta mengidentifikasi usaha-usaha rakyat. Fungsi kesejahteraan umum, berarti semua aktivitas negara yang secara langsung ditujukan pada perbaikan keadaan kehidupan rakyat. Ini berarti negara secara



Sumber : www.google.co.id

Gambar 1.8 Fungsi negara adalah melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama.

aktif turut campur tangan dalam bidang perekonomian agar dapat memberi kehidupan yang layak bagi semua warga negaranya.

Sedangkan menurut Charles E. Merriam, negara mempunyai lima macam fungsi yaitu; keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan. Pendapat lain dikemukakan oleh Miriam Budiardjo (1986:45), tiap negara pada umumnya menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penertiban. Untuk mencapai tujuan bersama, negara berusaha untuk menertibkan dan mencegah konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat
- b. Mengusahakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat.
Fungsi ini merupakan fungsi hakiki bahwa negara berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- c. Mengusahakan pertahanan.
Pertahanan ini diperlukan untuk menjaga berbagai ancaman atau serangan dari luar.
- d. Menegakkan keadilan.
Upaya untuk menegakkan keadilan dilaksanakan melalui badan-badan penegak hukum dan peradilan.

Untuk mewujudkan tujuan negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai fungsi mempertahankan negara, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan dan kemakmuran, serta fungsi keadilan. Fungsi pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari segala macam ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Fungsi pertahanan dijalankan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat ditugaskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Sumber :www.google.co.id

Gambar 1.9 Fungsi pertahanan dijalankan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat ditugaskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Agar dalam masyarakat tidak timbul adanya kesenjangan sosial, pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, dan pemerintah berusaha untuk menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum.



1.2

Diskusikan dengan kelompok belajarmu! Salah satu fungsi negara adalah melaksanakan penertiban mencegah konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat. Namun beberapa tahun belakangan ini di Indonesia sering terjadi konflik di berbagai daerah baik dalam skala yang besar maupun kecil. Mengapa konflik masih saja terjadi? Bagaimana keluar dari masalah ini? Presentasikan hasilnya dalam diskusi kelas!

B. Kewajiban Pembelaan Negara

1. Pengertian pembelaan negara

Apa yang kalian lakukan jika sekolah kalian mendapatkan gangguan baik dari dalam maupun luar? Seringkali, ada siswa yang usil mencorat-coret dinding merusak perabotan sekolah, ada yang berusaha mencemarkan nama baik sekolah atau orang lain yang mencoba untuk mengganggu ketenangan dalam proses belajar. Sebagai bagian dari warga sekolah dan didasari rasa cinta pada sekolah maka segala cara tentu akan dilakukan agar sekolah tidak diganggu. Bagaimana jika yang diganggu adalah kedaulatan bangsa dan negara? Kita pun akan bertindak yang sama yakni berusaha membela dan mempertahankannya. Mengapa demikian?



Sumber: buku 30 tahun Indonesia Merdeka

Gambar 1.10 Sidang BPUPKI menyusun undang-undang dasar. Para pendiri negara telah mewariskan undang-undang dasar sebagai acuan untuk melangkah mengisi kemerdekaan.

Kalian tentu memahami kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 diperoleh melalui pengorbanan jiwa dan raga para pahlawan. Setelah kemerdekaan diraih, kini kita mempunyai tugas untuk mengisi kemerdekaan. Mengelola negara dengan wilayah yang luas, sumber daya alam yang melimpah dan penduduk yang besar. Para pendiri negara juga telah mewariskan dasar negara dan undang-undang dasar sebagai acuan untuk melangkah mengisi kemerdekaan.

Sudah sepatutnya kita untuk membela dan mempertahankan, serta menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Rasa cinta tanah air dan kemauan yang tinggi dari segenap komponen bangsa termasuk pelajar, memberikan sumbangsih untuk kehidupan menuju masyarakat yang lebih baik lagi merupakan landasan utama.

Pembelaan Negara: Upaya bela negara merupakan suatu tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi rasa cinta pada tanah air.

Setelah mengikuti penjelasan diatas, bisakah kalian merumuskan apa yang dimaksud dengan upaya pembelaan negara? Tentu saja bisa. Upaya pembelaan negara merupakan suatu tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi rasa cinta pada tanah air.

Membela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia yang dijamin dalam UUD 1945. Selain itu, membela negara merupakan suatu kehormatan bagi setiap warga negara yang diberikan oleh negara. Oleh karena itu, membela negara sudah sepatutnya dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.



Tugas 1.2

Carilah informasi dari berbagai sumber baik majalah, surat kabar maupun internet tentang peran pelajar dalam usaha meraih kemerdekaan dan upaya memberikan sumbangsih dalam membangun bangsa setelah kemerdekaan. Menurutmu mungkinkah hal yang sama dilakukan saat ini? Adakah cara lain yang bisa dilakukan untuk membangun bangsa? Tulislah pendapatmu kemudian presentasikan hasilnya di depan kelas!

2. Dasar hukum pembelaan negara

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban dalam upaya membela negara. Hak dan kewajiban tersebut diatur dengan undang-undang. Peraturan perundang-undangan dalam upaya pembelaan negara adalah sebagai berikut;

- a. UUD 1945 Amandemen kedua
 - 1) Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hak dan kewajiban ikut serta setiap warga negara dalam upaya pembelaan negara terdapat dalam Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk.
 - 2) Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pernyataan tentang hak dan kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan dimasukkan ke dalam kelompok bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara.
- b. Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.
- c. Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peranan Tentara Nasional Republik Indonesia dan Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Undang-Undang No. 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih
- e. Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Menurut pasal 9 UU No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

3. Prinsip-prinsip dalam pembelaan negara

Bagi suatu negara yang merdeka dan berdaulat pertahanan negara merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup negaranya. Dalam penyelenggaraan pertahanan negara, bangsa Indonesia berprinsip bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban membela, mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan dan



Sumber : www.google.co.id

Gambar 1.11 TNI selalu siap untuk mempertahankan kedaulatan negara

kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Oleh karena itu, tidak ada seorang warga negara yang boleh menghindari dari kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Prinsip ikut serta dalam pembelaan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara, mengandung makna bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada

kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 mengenai pertahanan negara, bangsa Indonesia berpandangan sebagai berikut:

- a. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
- b. Pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- c. Hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara;
- d. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Saronji Dahlan (2005;133) menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pertahanan negara Indonesia menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

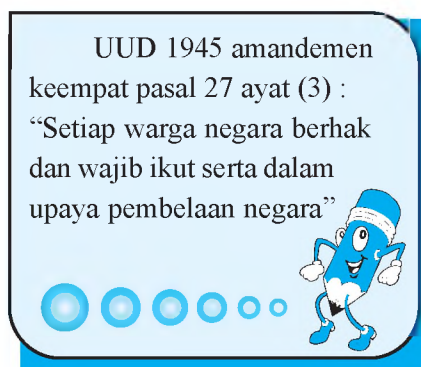
- a. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dan segala ancaman.

- b. Pembelaan negara dapat diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara.
- c. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan. Segala perselisihan dan pertikaian yang timbul dari hubungan antarbangsa atau antarnegara penyelesaian melalui cara damai. Bagi bangsa Indonesia, kekerasan (perang) merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan pertikaian dan perselisihan jika secara damai tidak berhasil. Prinsip demikian ini menunjukkan pandangan bahwa bangsa Indonesia tentang perang dan damai
- d. Bangsa Indonesia menentang segala macam bentuk penjajahan dan menerapkan politik bebas aktif. Untuk pertahanan negara keluar bersifat defensif aktif yang berarti tidak agresif dan tidak ekspansif sejauh kepentingan nasional tidak terancam.
- e. Bentuk pertahanan negara bersifat semesta yang berarti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai kesatuan pertahanan
- f. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Atas dasar prinsip tersebut, bangsa Indonesia tidak terikat atau tidak turut serta dalam suatu pakta pertahanan yang ada pada saat ini. Indonesia menjadi anggota negara-negara non blok.

4. Hak dan kewajiban warga negara

Dari penjelasan di atas kalian tentu memahami bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Mengapa kita harus ikut serta dalam upaya pembelaan negara?

Keikutsertaan dalam upaya pembelaan negara telah tertuang dalam UUD 1945 Amandemen keempat pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Membela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Selain sebagai hak dan kewajiban membela negara merupakan suatu kehormatan bagi setiap warga negara yang diberikan oleh negara.



Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, juga menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian dalam penyelenggaraan pertahanan negara mengandung prinsip bahwa bangsa Indonesia mempunyai hak dan kewajiban membela, mempertahankan, dan menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa dan negara.



Tugas 1.3

Bagaimana menurut pendapatmu, setujuakah jika pembelaan negara itu diserahkan sepenuhnya kepada TNI? Berikan alasannya! Presentasikan pendapatmu di depan kelas!

C. Bentuk-Bentuk Usaha Pembelaan Negara

1. Hakikat pertahanan negara

Kalian tentu telah memahami bahwa salah satu fungsi dari pemerintah adalah mengatur dan menyelenggarakan seluruh upaya untuk menjamin keberadaan bangsa dan negara serta keutuhan wilayah Indonesia. Berbagai cara bisa dilakukan, salah satunya melalui pemeliharaan dan peningkatan keamanan nasional yang dilaksanakan dengan penyelenggaraan upaya pertahanan negara secara berkelanjutan.



Sumber : www.google.co.id

Gambar 1.12 Untuk mempertahankan kehidupan kenegaraan, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat mutlak untuk menjamin kelangsungan hidup negara.

terdiri dari puluhan ribu pulau kecil dan besar yang tersebar dan terpisah. Indonesia juga memiliki wilayah laut yang luas dengan potensi sumber daya alam yang besar. Inilah tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia sejak merdeka sampai saat ini.

Kita patut bersyukur Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas, dengan potensi kekayaan alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang besar. Potensi ini bisa dilihat sebagai anugerah yang taktermilai harganya. Namun, potensi ini juga bisa berubah menjadi

malapetaka jika kita tidak memiliki sistem perlindungan menjaga pertahanan dan keamanan.

Kalian tentu masih ingat pada tahun 1999, Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membentuk negara sendiri. Kemudian pada tahun 2002, dua pulau yakni Sipadan dan Ligitan juga lepas dari wilayah Indonesia dan menjadi wilayah Malaysia. Kejadian ini tentu jangan sampai terulang lagi di masa yang akan datang. Untuk itu negara membutuhkan sistem pertahanan keamanan yang kuat. Bagaimana sistem keamanan yang diterapkan oleh negara kita?

Menurut pasal 30 ayat (2) UUD 1945, dinyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung

Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta adalah suatu sistem pertahanan keamanan dengan komponen-komponen yang terdiri dari seluruh potensi, kemampuan, dan kekuatan nasional yang bekerja secara total, intergral serta berlanjut dalam rangka mencapai ketahanan nasional.

Sistem pertahanan ini menggunakan dua pendekatan yaitu sistem senjata teknologi dan sistem senjata sosial. Ada tiga komponen sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yaitu, komponen utama, cadangan dan pendukung. Komponen utama adalah TNI dan POLRI, TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Komponen cadangan meliputi warga negara, sumber daya alam, serta sarana prasarana yang dipersiapkan. Komponen pendukung adalah warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan komponen utama ataupun cadangan.

Pertahanan Semesta: Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta merupakan suatu sistem pertahanan keamanan terdiri dari tiga komponen yaitu, komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung.



1.3

Wilayah Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau besar dan kecil. Wilayah yang luas berbentuk kepulauan ini rentan menghadapi ancaman dari dalam maupun luar. Bagaimana peran pelajar dalam upaya mempertahankan keutuhan wilayah ini? Diskusikan dengan kelompokmu. Presentasikan hasilnya!

Pasal 30 UUD 1945 amandemen kedua ayat 1 dan 2 mengandung makna pertahanan keamanan yang perlu kita pahami; yaitu:

- a. Keikutsertaan warga negara dalam pertahanan dan keamanan merupakan hak dan kewajiban.
- b. Pertahanan dan keamanan negara RI, menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.
- c. Kekuatan utama dalam sistem pertahanan adalah TNI, sedang dalam sistem keamanan adalah POLRI.
- d. Kedudukan rakyat dalam pertahanan dan keamanan sebagai kekuatan pendukung.

Dari penjelasan di atas dapat kita tarik satu pengertian bersama bahwa hakikat pertahanan keamanan adalah perlawanan rakyat semesta untuk menghadapi setiap bentuk ancaman terhadap keselamatan bangsa dan negara. Penyelenggaraannya disusun dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dan didasarkan pada kesadaran akan tanggung jawab tentang hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan akan kekuatan sendiri. Keyakinan akan menang dan tidak kenal menyerah, baik penyerahan diri maupun penyerahan wilayah.

Bentuk akhir perlawanan rakyat semesta adalah perang rakyat semesta yakni perlawanan secara total dari seluruh rakyat Indonesia terhadap usaha musuh yang ingin merampas kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia perlawanan rakyat semesta tersebut bersifat kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan.

Perlawanan rakyat semesta yang bersifat kerakyatan berarti keikutsertaan seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing. Sedangkan yang dimaksud perla-

wanan rakyat semesta yang bersifat kesemestaan berarti seluruh potensi bangsa dan negara Indonesia mampu memobilisasikan diri untuk menanggulangi setiap ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Adapun perlawanan rakyat semesta yang bersifat kewilayahan ini berarti seluruh wilayah negara merupakan tumpuan perlawanan dan segenap lingkungan diberdayakan untuk mendukung setiap bentuk perlawanan secara berlanjut.

Perwujudan usaha total perlawanan rakyat mencakup perlawanan bersenjata dan perlawanan tidak bersenjata untuk menghadapi setiap kekuatan asing yang ingin merampas kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia atau menguasai sebagian wilayah Republik Indonesia.

Wajib bela negara: Pasal 9 ayat (1) UU nomor 3 tahun 2002 bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”



Berdasarkan pasal 9 ayat (1) UU nomor 3 tahun 2002 bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”. Sedangkan dalam pasal 9 ayat (2) UU No.3 Tahun 2002 bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara disenggarakan dalam bentuk-bentuk;

- a. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan.
- b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.
- c. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau wajib.
- d. Pengabdian secara profesi.

a. Pendidikan kewarganegaraan

Pembinaan terhadap kesadaran akan bela negara dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan baik tingkat sekolah maupun pendidikan tinggi melalui pendidikan kewarganegaraan. Berdasarkan pasal 9 ayat (2) UU nomor 3 tahun 2003 dinyatakan bahwa “dalam pendidikan kewarganegaraan sudah tercakup pemahaman tentang kesadaran bela negara”. Dengan pendidikan kewarganegaraan dapat menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air.



Sumber :www.google.co.id

Gambar 1.14 Pembinaan terhadap kesadaran akan bela negara dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan baik tingkat persekolahan maupun pendidikan tinggi melalui pendidikan kewarganegaraan

b. Komponen dasar kemiliteran

Komponen warga negara yang mendapat pelatihan dari militer, misalnya; Menwa, Wanra, Hansip, dan Kamra

c. Pengabdian sebagai prajurit TNI

Untuk mewujudkan pelaksanaan pertahanan keamanan negara TNI berperan sebagai alat pertahanan negara. Sedangkan POLRI sebagai alat negara yang berperan memelihara keamanan dan



Sumber :www.google.co.id

Gambar 1.15 Resimen Mahasiswa merupakan komponen warga negara yang mendapat pelatihan dasar militer.

ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan dan pelayanan

pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam pertahanan negara menurut pasal 10 ayat (3) UU No. 3 tahun 2002, TNI memiliki tugas sebagai berikut;

1. Mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah.
 2. Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa.
 3. Melaksanakan operasi militer selain perang.
 4. Ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.
- d. Pengabdian sesuai dengan profesi

Pengabdian secara profesi adalah pengabdian warga negara yang mempunyai



sumber :www.palangmerah.org

Gambar 1.16 Pengabdian sesuai profesi seperti ditunjukkan oleh petugas PMI dalam menolong korban bencana alam

profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam atau bencana lainnya. Sesuai dengan UU No. 3 tahun 2002 yang termasuk dalam pengabdian sesuai dengan profesi antara lain, petugas PMI, tim SAR, paramedis dan bantuan sosial. Dengan demikian setiap warga negara sesuai dengan kedudukan dan peranannya mempunyai hak dan kewajiban dalam membela negara baik pada masa berperang maupun dalam masa aman dan damai.

Dengan adanya tantangan yang berat ini, maka perlu keterlibatan segenap komponen bangsa. Untuk itu, dalam undang-undang pertahanan negara Indonesia dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Menurut pasal 6 UU No.3 tahun 2002, upaya pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa dalam menanggulangi setiap ancaman.

2. Ancaman terhadap kedaulatan negara.

Semenjak bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, berbagai ancaman telah dihadapi. Ancaman-ancaman tersebut datangnya dari luar maupun dari dalam negeri. Ancaman adalah setiap usaha dan aktifitas, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa.

Ancaman yang dapat membahayakan negara dapat berupa ancaman tradisional (militer) dan ancaman non-tradisional (non-militer).

a. Ancaman tradisional (militer)

Ancaman tradisional (militer) merupakan suatu ancaman dengan menggunakan kekuatan senjata terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Ancaman militer yang datang dari luar negeri yang pernah kita hadapi setelah kemerdekaan misalnya datangnya pasukan Belanda yang bersama-sama dengan Sekutu bermaksud ingin menjajah Indonesia kembali.

Belanda melakukan Agresi Militer ke wilayah Negara Kasatuan Republik Indonesia. Untuk menghadapi kedatangan Belanda dan Sekutu, bangsa Indonesia mengobarkan perlawanan melalui berbagai pertempuran, seperti di Surabaya pada tanggal 10 Nopember 1945, pertempuran di Bandung dan pertempuran di Semarang dan berbagai tempat lainnya. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan selain dilakukan dengan melakukan pertempuran di medan perang juga melalui meja perundingan.

Meski kemerdekaan telah diraih, bukan berarti tidak ada masalah dalam negeri. Berbagai ancaman yang datang dari dalam negeri di antaranya pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, DI/TII di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Republik Maluku Selatan (RMS), PRRI/Permesta di Sumatra Barat dan G30 S/ PKI pada tahun 1965.

Dalam UU No. 3 tahun 2002, ancaman yang bersifat militer yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dapat berupa;

1. Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
2. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik menggunakan kapal maupun pesawat non komersial.
3. Spionase yang dilakukan negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer.
4. Sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan obyek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa.

Di masa kini bangsa Indonesia, tetap menghadapi berbagai tantangan yang mengancam kedaulatan negara. Terutama yang datang dari dalam negeri, di antaranya:

1. Ancaman kerusuhan dalam masyarakat yang ditimbulkan oleh kesenjangan sosial

Ancaman Negara: Ancaman adalah setiap usaha dan aktifitas, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa.



ekonomi. Hal ini terjadi karena pembangunan nasional belum berhasil memperkecil ketidakadilan sosial ekonomi.

2. Ancaman kerusuhan masyarakat yang disertai kekerasan. Ini dapat terjadi akibat golongan tertentu memaksakan kepentingan sepihak.
3. Pemberontakan bersenjata dari kalangan sparatis, yaitu mereka yang berusaha memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Ancaman pemberontakan bersenjata ditimbulkan oleh golongan yang ingin mengubah ideologi negara dan membentuk negara baru. Hal ini dilakukan oleh kelompok ekstrem kiri ataupun kanan yang berkeinginan untuk mengubah pandangan dasar negara Indonesia dengan pandangan dasar mereka.

b. Ancaman non-tradisional

Ancaman non-tradisional (nonmiliter) merupakan suatu ancaman yang dilakukan oleh actor non-negara. Ancaman ini berupa aksi terror, permapokan dan pembajakan, penyelundupan, imigran gelap, perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang, penangkapan ikan secara ilegal, serta pencurian kekayaan alam (Depdiknas, 2005:28)



1.4

Kesenjangan sosial ekonomi antar daerah seringkali menjadi awal mula pemicu munculnya gerakan sparatis di Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Jika hal tersebut benar, bagaimana upaya untuk meminimalkan kesenjangan sosial ekonomi antar daerah? Diskusikan dengan kelompokmu kemudian presentasikan hasilnya!

D. Peran Serta dalam Upaya Pembelaan Negara.

Kalian tentu sering mendengar atau mengamati kiprah atlet-atlet Indonesia dari berbagai cabang olahraga. Banyak sekali yang telah menorehkan tinta emas menjuarai



Sumber : www.google.co.id

Gambar 1.17 Atlet olahraga dan siswa berprestasi ini telah menunjukkan peran serta dalam upaya pembelaan negara.

berbagai event olahraga tingkat dunia. Atau siswa berprestasi yang mampu menjuarai olimpiade fisika tingkat internasional. Atlet dan siswa tersebut bertanding membawa nama bangsa dan negara Indonesia. Mereka rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, kemenangan yang diraih dipersembahkan kepada bangsa dan negara, memberikan kebanggaan bagi kita semua. Para atlet dan siswa berprestasi ini menunjukkan peran sertanya dalam upaya pembelaan negara.

Mungkin diantara kalian ada yang pernah mewakili negara dalam berbagai lomba tingkat internasional. Bagi yang belum, jangan

pernah patah semangat, peran serta dalam upaya pembelaan negara bisa dilakukan dalam berbagai cara. Apa saja bentuk peran serta dalam upaya pembelaan negara? Kalian bisa ikuti penjelasannya berikut ini.

1. Partisipasi dalam upaya pembelaan negara

Apakah yang dimaksud dengan partisipasi atau peran serta dalam upaya pembelaan negara? Partisipasi atau peran serta adalah sikap dari setiap warga negara untuk turut berperan serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam pasal 30 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi, setiap warga negara dituntut berperan secara aktif dalam suatu kegiatan bela negara.

Upaya pertahanan dan keamanan negara mencakup pembentukan dan penggunaan sumber daya buatan dan prasarana fisik dan psikis bangsa dan negara. Dalam usaha pembelaan negara secara fisik, rakyat dapat dilibatkan dalam penanganan ancaman yang ada. Rakyat disiapkan dan dilatih sehingga menjadi rakyat terlatih.

Rakyat terlatih mempunyai empat fungsi yaitu; ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat dan perlawanan rakyat. Ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan keamanan rakyat merupakan fungsi negara yang pelaksanaannya pada saat negara dalam keadaan damai atau sedang menghadapi suatu bencana alam. Sedangkan fungsi perlawanan rakyat dilaksanakan negara dalam keadaan darurat perang. Di saat genting negara dalam ancaman, rakyat terlatih sebagai unsur bantuan ikut terlibat membantu TNI di medan perang.

Disamping terdapat ancaman bersifat fisik ada juga ancaman yang bersifat non fisik. Ancaman yang bersifat non militer setiap waktu selalu dihadapi oleh negara. Bela negara non militer (nonfisik) dapat dilakukan oleh setiap warga negara dalam berbagai bentuk, dalam berbagai situasi. Misalnya dengan meningkatkan kesadaran diri akan makna berbangsa dan bernegara, termasuk menghayati arti demokrasi, mewujudkan rasa cinta tanah air melalui pengabdian secara tulus ikhlas pada masyarakat



Tugas 14

Amati dan catatlah kejadian-kejadian yang dapat mengganggu ketertiban kehidupan masyarakat di sekitarmu! Hasil pengamatan dibuat dalam sebuah laporan dan presentasikan di depan kelasmu!

2. Perwujudan upaya pembelaan negara

Sebagai warga negara yang cinta tanah air, kita harus ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan yang dimulai dari lingkungan sekitar. Pertahanan dan keamanan negara mencakup segenap aspek kehidupan.

Pertahanan dan keamanan tidak dilaksanakan dengan mempersenjatai seluruh rakyat, akan tetapi mengikut sertakan seluruh unsur kekuatan yang ada dalam masyarakat Indonesia didasarkan pada profesi masing-masing. Upaya bela negara dilakukan tanpa pamrih.

Seperti upaya bela negara yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan yang dalam berjuang tidak mengharapkan suatu imbalan. Mereka berjuang tanpa pamrih. Sikap yang demikian adalah sikap seorang patriot sejati.

- Seorang yang memiliki jiwa patriotisme, memiliki ciri-ciri sebagai berikut;
- a. Cinta tanah air,
- b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara,
- c. Menempatkan persatuan dan kesatuan,
- d. Mengutamakan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Seperti telah disinggung dalam penjelasan di atas, berdasarkan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui: pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau wajib dan pengabdian sesuai profesi. Bagaimana penerapan upaya bela negara dalam kehidupan sehari-hari?

Bela negara dapat diterapkan dengan menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Kita bersama paham bahwa keamanan dan ketertiban merupakan dambaan setiap anggota masyarakat. Kondisi yang aman dapat terwujud tidak hanya sebagai tanggung jawab TNI dan POLRI, akan tetapi menjadi tanggung jawab segenap warga negara Indonesia. Dengan ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berarti telah ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

Keikutsertaan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan setempat akan dapat menciptakan adanya:

- a. Keamanan dan ketertiban lingkungan
- b. Ketenangan dan ketentraman hidup
- c. Suasana kehidupan menjadi teratur

- d. Kehidupan masyarakat menjadi sejuk
- e. Tidaknya suatu kerusuhan dan kekacauan.

Keikutsertaan setiap warga negara dalam upaya pertahanan dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari dapat diterapkan dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan negara.

a. Di lingkungan keluarga

Upaya pertahanan dan keamanan dalam lingkungan keluarga dapat diwujudkan dengan menampilkan sikap-sikap sebagai berikut:

- 1) Setiap anggota keluarga menjalankan tugasnya dengan tertib
- 2) Setiap anggota keluarga berusaha menjaga nama baik keluarga
- 3) Setiap anggota keluarga menjaga kerukunan hidup

b. Di lingkungan sekolah

Upaya pertahanan dan keamanan dalam lingkungan sekolah dapat diwujudkan melalui berbagai sikap sebagai berikut:

- 1) Menaati tata tertib sekolah
- 2) Hidup rukun sesama warga sekolah
- 3) Menjalin kerjasama antarsiswa tanpa pandang bulu
- 4) Menyelesaikan tugas dengan baik.



Sumber :www.google.co.id

Gambar 1.18 menjalin kerjasama antar siswa merupakan upaya pertahanan keamanan yang dapat dipraktikkan sehari-hari.

c. Di lingkungan masyarakat

Upaya pertahanan dan keamanan di lingkungan masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai sikap sebagai berikut;

- 1) Ikut bergotong royong dalam masyarakat
- 2) Ikut menjaga keamanan lingkungan
- 3) Tidak membuang sampah sembarang tempat
- 4) Menjalin hubungan yang baik sesama anggota masyarakat
- 5) Tidak membuat keonaran di masyarakat



Sumber :www.google.co.id

Gambar 1.19 Ikut bergotong-royong juga bagian dari upaya pertahanan keamanan

d. Di lingkungan kenegaraan

Upaya pertahanan dan keamanan di lingkungan kenegaraan dapat ditampilkan melalui berbagai sikap berikut ini;

- 1) Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara
- 2) Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945
- 3) Rela berkorban untuk bangsa dan negara
- 4) Menjaga kelestarian tanah air Indonesia
- 5) Mempertaruhkan diri untuk kejayaan bangsa dan negara
- 6) Mencegah adanya terorisme
- 7) Mencegah sikap radikalisme
- 8) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 9) Tidak main hakim sendiri
- 10) Membela negara sampai titik penghabisan



1.5

Diskusikan dengan kelompok kalian! Dalam bentuk bagaimanakah rakyat berpartisipasi dalam membela negara? Presentasikan hasilnya di depan kelas!

Rangkuman

1. Negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat.
2. Unsur-unsur negara terdiri dari rakyat, wilayah, pemerintahan, dan pengakuan.- Terjadinya negara secara primer dan secara sekunder.
3. Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut, yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesada saran berbangsa dan bernegara serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan untuk berkorban guna meniadakan ancaman baik dari dalam maupun luar negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan, keutuhan wilayah dan yuridiksi nasional serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang dijamin dengan undang-undang.
4. Dasar hukum upaya pembelaan negara adalah UUD 1945, Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000, Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, dan UU No. 3 tahun 2002.
5. Membela negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara yang dijamin oleh UUD1945.
6. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta adalah suatu sistem pertahanan keamanan dengan komponen-komponen yang terdiri dari seluruh potensi, kemampuan, dan kekuatan nasional yang bekerja secara total, integral,serta berlanjut dalam rangka mencapai ketahanan nasional.
7. Upaya bela negara dapat diwujudkan dalam lingkungan keluarga, sekolah masyarakat dan negara.

Uji Kompetensi

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berdiam di wilayah tertentu. Pendapat ini di kemukakan oleh
 - a. Mr. Kranenburg
 - b. George Jellineck
 - c. Prof Mr. Soenarko
 - d. Mirriam Budiardjo
2. Unsur deklaratif atau pengakuan dari negara lain diperlukan oleh suatu negara yang merdeka dan berdaulat untuk
 - a. mendapatkan pengesahan PBB
 - b. mewujukan fungsinya
 - c. memenuhi unsur tata aturan pergaulan internasional
 - d. mendapatkan dukungan dari rakyat
3. Berikut ini yang bukan termasuk fungsi negara Indonesia adalah
 - a. pertahanan
 - b. keamanan dan ketertiban
 - c. kesejahteraan dan keadilan
 - d. putusan dan kebijakan
4. Menurut Pembukaan UUD 1945, kemerdekaan adalah
 - a. hak segala bangsa
 - b. hak segenap rakyat
 - c. hak setiap penduduk
 - d. hak seluruh warga negara
5. Peranan TNI dan POLRI diatur dalam
 - a. Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000
 - b. Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000
 - c. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945
 - d. Undang-Undang No. 2 tahun 2002

Uji Kompetensi

6. Berikut ini yang bukan termasuk sifat-sifat perlawanan rakyat semesta adalah
 - a. kewilayahan
 - b. pemerintahan
 - c. kerakyatan
 - d. kesesatan

7. Landasan konstitusional upaya pertahanan dan keamanan negara yang tercantum dalam UUD 1945, yaitu
 - a. pasal 27 ayat (3)
 - b. pasal 28
 - c. pasal 30 ayat (1)
 - d. pasal 31 ayat (1)

8. Dalam sistem pertahanan rakyat semesta kedudukan TNI adalah sebagai
 - a. Kekuatan utama
 - b. kekuatan pendukung
 - c. kekuatan terlatih
 - d. kekuatan cadangan

9. Berikut ini yang tidak termasuk pengabdian profesi adalah
 - a. petugas PMI
 - b. tim SAR
 - c. paramedis
 - d. anggota TNI

10. Keikutsertaan warga masyarakat dalam upaya pertahanan dan keamanan dapat menciptakan hal berikut ini, kecuali
 - a. keamanan masyarakat menjadi tenang
 - b. keadaan masyarakat menjadi tentram
 - c. kehidupan masyarakat menjadi teratur
 - d. kehidupan masyarakat menjadi ketergantungan

Uji Kompetensi

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat benar!

1. Sebutkan unsur-unsur berdirinya negara!
2. Mengapa setiap warga negara Indonesia mempunyai kewajiban membela negara?
3. Apa yang dimaksud dengan sistem pertahanan rakyat semesta?
4. Sebutkan tiga contoh ancaman yang bersifat militer menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 !
5. Sebutkan dua bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara dalam upaya bela negara yang bersifat nonfisik!



Otonomi Daerah

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, siswa mampu :

- Menjelaskan hakikat otonomi daerah.
- Menjelaskan arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah

Kata Kunci: otonomi daerah, desentralisasi, partisipasi, masyarakat, pemerintah daerah.

Saat libur panjang tahun kemarin tiba, si Andi terlihat senang sekali. Tidak seperti liburan tahun-tahun sebelumnya, kenapa ya? Setelah mencari informasi kesana-sini ketahuan jawabannya. Ternyata Andi sekeluarga pergi berlibur ke pulau Bali dan Sulawesi. Pantas kalau Andi senang sekali. Tapi, bagaimana dengan liburan teman yang lain?

Untung Andi termasuk anak yang suka berbagi cerita, ia membagi pengalamannya berlibur ke beberapa daerah di Indonesia ke teman-temannya. Dia bercerita negara kita mempunyai wilayah yang luas, banyak sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Andi juga bercerita kalau bahasa orang Bali berbeda dengan orang Sulawesi, begitu juga dengan pakaian adatnya. Inilah kekayaan alam dan budaya Indonesia. Sepenggal cerita dari Andi ini sedikit memberi gambaran pada teman-temannya tentang Indonesia. Ya, maklum teman-teman Andi memang jarang berlibur atau pergi ke daerah lain.

Dibalik keindahan Indonesia Andi pun bercerita kalau dia juga melihat di beberapa daerah yang dilewatinya selama perjalanan masih banyak dijumpai pemuda yang menganggur, rumah kumuh di pinggir sungai maupun gelandangan. Banyak lahan maupun pantai yang indah belum dimanfaatkan secara maksimal. Ia mengatakan pembangunan belum maksimal, masih ada ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah.

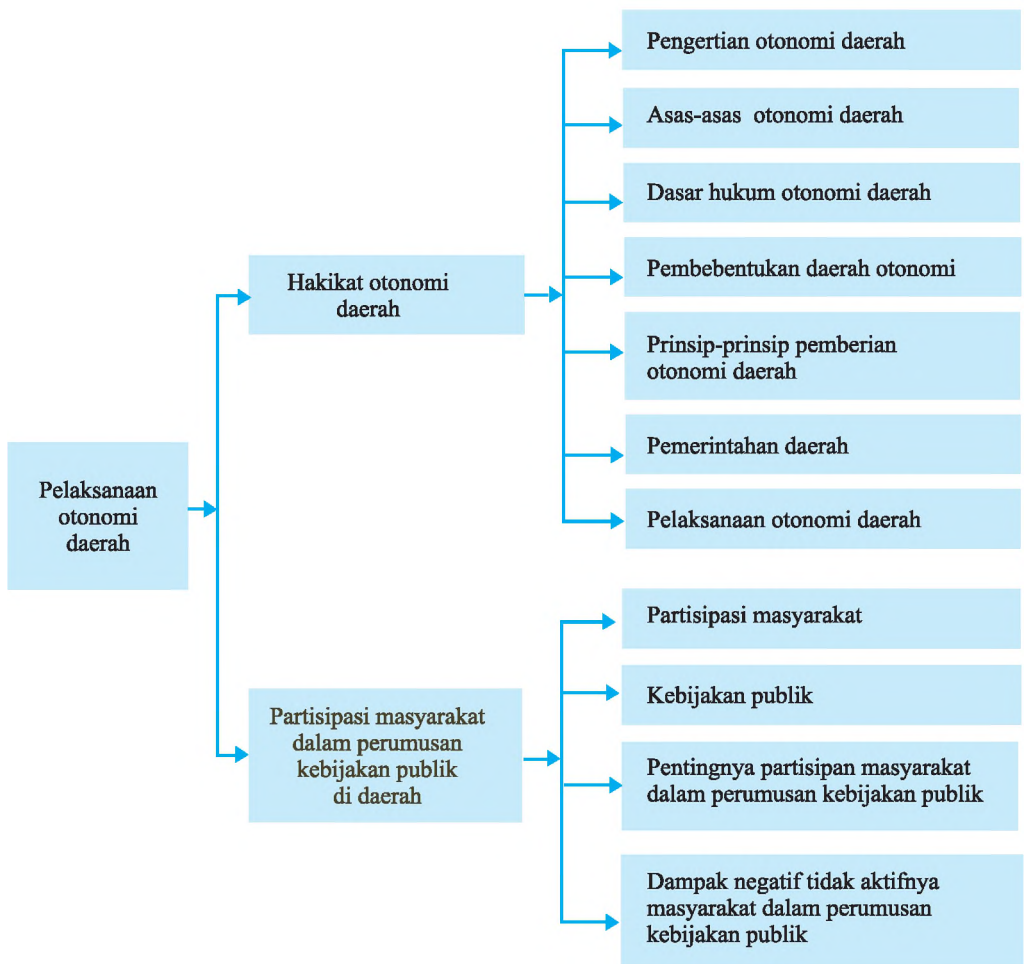
Mendengar cerita dari Andi, teman-teman kemudian bertanya mengapa bisa terjadi ya? Sebagai bangsa yang besar dan luas dengan beragam suku bangsa seperti ini tentu dibutuhkan pengelolaan dan sistem pemerintahan yang sesuai dengan kondisi yang ada dan sesuai kebutuhan masyarakat. Bagaimana caranya?

Nah, pelaksanaan otonomi daerah adalah jawaban pertanyaan di atas. Sebelum otonomi daerah diterapkan negara kita memang menerapkan sistem sentralisasi pemerintahan. Dalam sistem ini pemerintah pusat mengatur kebijakan pembangunan, sedang pemerintah daerah hanya

menjadi pelaksana. Dengan otonomi setiap daerah diharapkan mampu meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah? Bagaimana otonomi daerah dilaksanakan? Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah?

Pada bab ini kita akan belajar tentang otonomi daerah, mulai dari hakekat otonomi daerah sampai dengan bagaimana peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Agar kalian mendapatkan gambaran sebelum kita membahasnya lebih jauh, coba perhatikan peta konsep di bawah ini:

Peta Konsep



A. Hakikat Otonomi Daerah

1. Pengertian otonomi daerah

Dalam penjelasan di atas kita telah mempelajari bahwa Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau dengan karakter sosial budaya yang berbeda. Wilayah negara kita terbagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintahan daerah sendiri dengan potensi alam dan sosial budaya yang berbeda pula. Keragaman potensi dan kewilayahan inilah salah satu yang melatarbelakangi penerapan otonomi daerah. Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah?



Sumber : www.google.co.id

Gambar 2.1 Pulau-pulau di Indonesia dihuni lebih dari 200 juta jiwa dengan beraneka ragam budaya, bahasa dan adat istiadat. Kondisi inilah salah satu yang melatarbelakangi penerapan otonomi daerah.

Untuk mengetahui istilah dan pengertian otonomi, kita perlu mengetahui asal-usul istilah otonomi. Otonomi berasal dari bahasa Yunani *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti aturan. Berdasarkan asal-usul istilah tersebut, para ahli memberikan pengertian otonomi sebagai pengundangan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri. Dengan demikian, kata otonomi dapat diartikan sebagai kemerdekaan dan kebebasan menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut pasal 1 ayat (1) UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan adalah suatu negara dimana hanya ada satu negara dan satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan.

Negara Kesatuan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- Negara kesatuan yang menerapkan prinsip sentralisasi kewenangan, yaitu apabila semua urusan negara diatur negara dan diurus oleh pemerintah pusat.
- Negara kesatuan yang menerapkan prinsip desentralisasi, yaitu pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing.

Berdasar penjelasan di atas dapat dikatakan negara kita adalah negara kesatuan yang menerapkan prinsip desentralisasi pemerintahan. Otonomi daerah merupakan wujud dari penerapan prinsip desentralisasi. Pasal 1 Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Sumber : www.google.co.id

Gambar 2.2 Otonomi daerah yang mandiri dan demokratis diharapkan dapat mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya sehingga kepentingan rakyat dapat dilayani dengan baik

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka mengubah tatanan ketatanegaraan yang bersifat sentralistik, otoriter menjadi desentralisasi dan demokratis. Otonomi daerah yang mandiri dan demokratis diharapkan dapat men-

dekatkan pemerintah dengan rakyatnya sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung dengan lebih baik.

2. Asas-asas otonomi daerah

Dalam penerapannya, terdapat asas-asas yang menjadi pedoman pelaksanaan otonomi daerah. Tiga asas dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.

- a. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- c. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

(Pasal 1 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)

Sebagai negara kesatuan yang menerapkan sistem desentralisasi, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penerapan otonomi daerah bertujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Sumber: Kompas

Gambar 2.3 Otonomi daerah memungkinkan pemerintah makin dekat dengan persoalan rakyat dan menyelesaikannya dengan cepat.

3. Dasar hukum otonomi daerah

Agar otonomi daerah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka harus disusun peraturan dan perundang-undangan sebagai landasan atau dasar hukum. Apa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah ? Pelaksanaan otonomi daerah berpedoman pada konstitusi (hukum dasar) negara yang tertulis, yaitu UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen kedua

1) Pasal 18

- a) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- b) Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- c) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- d) Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
- e) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
- f) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan
- g) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah di atur dengan undang-undang.

- 2) Pasal 18A
 - a) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
 - b) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
- 3) Pasal 18B
 - a) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
 - b) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dan prinsip-prinsip Negara Kaesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.
- b. Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/2000, tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- c. Undang-Undang
 - 1) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - 2) UU no.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara antara Pemerintah Pusat dan Daerah.



2.1

Apa yang menjadi latar belakang penerapan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab? Diskusikan dengan kelompok belajarmu. Carilah informasi dari berbagai sumber untuk memperkaya argumentasimu. Presentasikan hasilnya!

4. Pembentukan daerah otonom

Dalam pembahasan di atas telah disinggung bahwa daerah otonom, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan



Sumber : www.google.co.id

Gambar 2.4 Wilayah Indonesia terbagi atas daerah-daerah propinsi, kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintahan daerah sendiri.

Republik Indonesia. Wilayah negara kita dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintahan daerah sendiri. Untuk menjadi sebuah daerah otonom harus memenuhi berbagai persyaratan, yaitu syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan.

a. Syarat administratif

Suatu daerah akan menjadi daerah otonom jika memenuhi syarat administratif. Syarat administratif untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi tersebut. Persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur, serta mendapat rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

Sedangkan syarat administratif untuk kabupaten/kota adalah adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

b. Syarat teknis

Sebuah daerah otonom tentu membutuhkan sumber daya yang mampu menjadi tumpuan bagi hidup, tumbuh dan berkembangnya daerah tersebut sebagai syarat teknis pembentukan daerah. Syarat teknis pembentukan daerah otonom meliputi kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, potensi daerah, luas daerah, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

c. Syarat fisik

Syarat fisik pembentukan daerah otonom berhubungan dengan cakupan wilayah daerah tersebut. Untuk membentuk daerah otonom provinsi paling sedikit terdiri dari lima kabupaten/kota. Untuk pembentukan kabupaten paling sedikit tujuh kecamatan, sedang untuk pembentukan kota sedikitnya terdapat empat kecamatan. Syarat fisik juga berhubungan dalam lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.

Suatu daerah otonom dapat mengalami pemekaran jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pemekaran satu daerah menjadi dua atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan. Sebaliknya, suatu daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan/ atau digabung dengan daerah lain.



Tugas 2.1

Bentuklah kelompok terdiri lima orang, kemudian berkunjunglah ke pemerintah daerah setempat. Carilah informasi tentang pelaksanaan otonomi daerah di wilayahmu. Apa dampak positif dan negatif pelaksanaan otonomi daerah? Setelah apa dampak positif dan negatif otonomi daerah? Susunlah laporan kemudian presentasikan hasilnya di depan kelas!

5. Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah

Kalian tentu akan merasa senang dan bangga jika mendapat otonomi atau kesempatan dan mampu untuk mengatur hidup sendiri dari orang tua baik itu sebagian atau seluruhnya. Begitu juga dengan suatu daerah, dengan adanya otonomi daerah maka dapat mengatur daerahnya sesuai dengan kemampuannya. Meski demikian, pemberian otonomi bagi suatu daerah harus sesuai dengan prinsip-prinsip tertentu. Apa saja prinsip yang dimaksud?

Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa pemberian otonomi daerah berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan otonomi daerah adalah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi dan keanekaragaman daerah.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya, dalam arti bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar urusan pemerintah pusat. Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan daerah untuk meningkatkan pelayanan dan peningkatan berbagai hal yang bertujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraan harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan nyata diletakkan pada kabupaten dan kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah antar daerah.
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonomi, serta di dalam kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi.
- f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi legislatif daerah, ataupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah,
- g. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi yang kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.



Tugas 2.2

Carilah beberapa berita dari surat kabar, majalah, internet tentang pelaksanaan otonomi daerah di wilayahmu! Lakukan analisis apakah pelaksanaan otonomi daerah telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang seharusnya diterapkan? Presentasikan hasilnya!

6. Pemerintahan daerah

Dalam pembahasan di atas telah disinggung bahwa kebijakan otonomi daerah merupakan pengalihan sebagian tugas dan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah. Pemerintah daerah mempunyai kesempatan untuk memberdayakan potensi daerahnya, mengatur dan mengurus rumah tangganya berdasarkan aspirasi dan kehendak masyarakat. Dengan demikian daerah akan lebih mandiri dalam mencukupi kebutuhannya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu satu pemerintahan daerah yang mampu menjalankan tugas tersebut.

Pemerintahan daerah terdiri atas pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Kepala daerah provinsi adalah gubernur, kepala daerah kabupaten disebut bupati dan kepala daerah kota adalah walikota. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasang calon dalam sebuah pemilihan umum (pe-



Sumber : www.google.co.id

Gambar: 2.5 Pemilu kepala daerah untuk pertama kalinya dilaksanakan secara langsung pada tahun 2005

milu) yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon kepala daerah diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Apa saja tugas dan wewenang kepala daerah?

Seorang kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang antara lain sebagai berikut:

- Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- Mengajukan rancangan Perda.
- Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
- Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.

- f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Melakukan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 25 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah)

Pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah beserta perangkatnya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perangkat daerah otonomi terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Seperti halnya kepala daerah DPRD juga mempunyai tugas dan wewenang.

Tugas dan wewenang DPRD adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama kepala daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah /wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota.
- e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah.
- i. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
- j. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

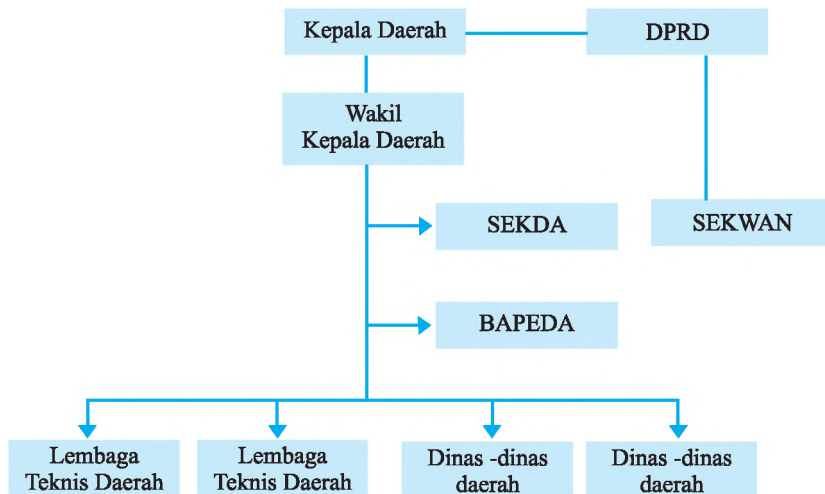
(Pasal 42 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah).

Selain mempunyai tugas dan wewenang DPRD juga mempunyai hak yang melekat yakni hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat. DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki alat kelengkapan, antara lain pimpinan; komisi; panitia musyawarah, panitia anggaran; Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan.

Dalam penjelasan di depan telah disinggung bahwa penerapan otonomi daerah memberikan kesempatan pada setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuannya. Begitu juga dengan kebutuhan akan perangkat pemerintah daerah sebagai eksekutif atau pelaksana pemerintahan.

Perangkat pemerintah daerah yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas dan lembaga teknis lainnya dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Untuk memahami tentang skema pemerintahan daerah perhatikan bagan di bawah ini

Struktur Pemerintahan Daerah



7. Pelaksanaan otonomi daerah

Kalian tentu mengamati atau pernah mengalami ketika parkir di pasar atau pertokoan diberikan tanda parkir yang bertuliskan karcis parkir umum dilengkapi dengan dasar peraturan yakni peraturan daerah. Kalian tentu bertanya mengapa peraturan daerah yang menjadi dasar penarikan parkir? Inilah salah satu bentuk penerapan otonomi daerah. Tanda parkir ini merupakan pendapatan daerah yang kemudian akan dipergunakan untuk melakukan pembangunan dan pelayanan daerah. Agar kalian lebih jelas lagi ikuti penjelasan pelaksanaan otonomi daerah berikut ini.

Perjalanan otonomi daerah di Indonesia telah berlangsung cukup lama. Sebelum diberlakukan UU No.32 tahun 2004 yang mengatur tentang pelaksanaan pemerintah daerah, pemerintah Orde Baru telah memberlakukan UU No. 5 tahun 1974. Akan tetapi undang-

undang ini belum dapat mewujudkan terselenggaranya otonomi daerah secara nyata. Hal ini dikarenakan undang-undang ini masih memiliki kelemahan dan daerah belum mampu melaksanakan otonomi daerah.

Setelah mendapatkan kritikan atas lemahnya konsep dan aturan, serta tidak terlaksananya otonomi daerah maka pada tahun 1992 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II. Pada tanggal 25 April 1995 pemerintah pada saat itu meluncurkan Proyek Percontohan Otonomi Daerah satu kabupaten di setiap provinsi. Tujuannya untuk mewujudkan otonomi daerah. Akan tetapi dalam perjalanannya masih terjadi tarik ulur kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Gagasan otonomi daerah untuk mengembangkan kesejahteraan di tingkat daerah belum dapat terlaksana.

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, desakan otonomi daerah semakin kuat. Aspirasi yang berkembang dari berbagai kalangan menuntut kewenangan daerah yang lebih luas untuk mengatur daerah sendiri dan ada ruang partisipasi masyarakat yang luas dalam berbagai bidang kehidupan.

Sebagai tindak lanjut tuntutan tersebut, maka lahirlah Ketetapan MPR RI No.XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Untuk melaksanakan Otonomi Daerah yang luas, nyata, serta bertanggung jawab pemerintah mengeluarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No. 5 tahun 1974.

Pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No 25 tahun 1999 terealisasi sejak bulan Januari 2001. Sebelum undang-undang dilaksanakan memang telah berkembang aspirasi masyarakat yang menghendaki adanya revisi terhadap undang-undang tersebut. Hal ini dikarenakan undang-undang tersebut tidak memperhatikan konteks kelahirannya yang diliputi suasana transisi, abnormal dan krisis. Berdasarkan keadaan tersebut akhirnya pemerintah mengeluarkan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan undang-undang yang baru ini diharapkan otonomi daerah dapat diterapkan lebih baik lagi. Beberapa hal yang mendapat prioritas perbaikan diantaranya menyangkut pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah serta pengelolaan potensi daerah. Bagaimana pembagian kewenangan pemerintah dan daerah serta pengelolaan potensi daerah?

Dalam UU No 32 Tahun 2004 telah memuat pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Pemerintah bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan.

Persoalan yang dimaksud meliputi bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama. Bagaimana dengan kewenangan daerah?

Nah, daerah bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan serta mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan. Urusan tersebut menjadi urusan wajib daerah otonom. Selain itu daerah juga mempunyai kewenangan yang bersifat pilihan seperti pengelolaan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Setelah mengikuti penjelasan diatas kalian tentu mendapat gambaran tentang pembagian kewenangan pemerintah dan daerah. Selain kewenangan untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas dan nyata, diatur pula hak dan kewajiban daerah. Apa saja hak dan kewajiban daerah?

Sesuai pasal 21 UU No. 34 Tahun 2004, daerah mempunyai hak:

- a. Mengatur mengurus sendiri urusan pemerintahannya,
- b. Memilih pemimpin daerah
- c. Mengelola aparatur daerah
- d. Mengelola kekayaan daerah,
- e. Mengatur pajak daerah dan retribusi daerah,
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah,
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang sah, dan
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya menurut pasal 22 UU No 32 tahun 2004 daerah mempunyai kewajiban diantaranya:

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi,
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan,
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Selama pelaksanaan otonomi daerah memang tidak dapat dihindari munculnya berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut timbul dari lembaga pemerintah itu sendiri atau dari luar lembaga pemerintah. Masalah-masalah yang berkenaan dengan pelaksanaan otonomi daerah antara lain:

- a. Masyarakat kurang memahami arti pentingnya otonomi daerah.
- b. Masyarakat tidak mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan otonomi daerah.
- c. Masyarakat bersikap apatis terhadap pemerintah.
- d. Sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya sehingga etos kerjanya menjadi lebih baik.
- e. Sikap ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih terlalu tinggi.
- f. Kemampuan daerah untuk mengurus daerahnya sendiri masih sangat kurang.
- g. Menjalarnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) hingga ke pemerintahan daerah.

Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul sebagai penghambat terlaksananya otonomi daerah perlu dilakukan berbagai cara, antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi tentang penerapan otonomi daerah beserta undang-undang sebagai acuannya secara lebih luas lagi.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah.
- c. Menumbuhkan sikap kepercayaan diri masyarakat terhadap pemerintahan daerah.
- d. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah daerah yang berkualitas dengan etos kerjanya yang baik.
- e. Menumbuhkan sikap kreatif dan inisiatif.
- f. Meningkatkan sikap kemandirian.
- g. Melakukan pemberantasan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme secara nyata.



2.2

Otonomi daerah telah diterapkan secara lebih nyata sejak tahun 2001. Namun, sebagian masyarakat justru menghendaki sistem sentralisasi diperlakukan kembali. Bagaimana pendapat kelompokmu? Presentasikan hasil diskusi di depan kelas!

B. Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik di Daerah.

1. Partisipasi masyarakat

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tidak akan pernah lepas dari partisipasi masyarakat. Kalian tentu memahami tujuan penerapan otonomi daerah adalah mewujudkan masyarakat sejahtera, maka dari itu masyarakat harus ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan masyarakat tidak lagi menjadi obyek akan tetapi menjadi subyek. Artinya, masyarakat bukan lagi dilihat sebagai sasaran pembangunan namun menjadi pelaku pembangunan.

Sebelum lebih jauh, sebaiknya kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan partisipasi. Partisipasi dapat diartikan sebagai pengambilan bagian dari kegiatan bersama. Partisipasi juga dapat diartikan sebagai suatu kesadaran masyarakat untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan suatu program yang telah ditetapkan dengan tidak mengorbankan kepentingannya sendiri.

Pendapat dari Dwi Tiyanto (2006) ahli komunikasi politik Universitas Sebelas Maret, mencatat beberapa arti partisipasi sebagai berikut:

- 1) Kontribusi sukarela tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan,
- 2) Kepekaan masyarakat dalam menerima dan melaksanakan program,
- 3) Proses aktif dalam mengambil inisiatif,
- 4) Pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan pelaksana program dari luar,
- 5) Keterlibatan sukarela masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri,
- 6) Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka sendiri

Pendapat lain tentang partisipasi dikemukakan oleh Davis yang diterjemahkan oleh Inu Kencana Syafii (2001: 142)

Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama.

Di era otonomi daerah ini, masyarakat dituntut untuk berpartisipasi, terutama dalam perumusan kebijakan publik, mengapa demikian? Untuk menjawabnya coba kalian ikuti ilustrasi cerita berikut. Dalam kehidupan sehari-hari kalian tentu mempunyai keinginan-keinginan. Misalnya ingin mempunyai sepatu untuk berolahraga. Tentu saja ketika memilih sepatu yang tepat kalian akan mempertimbangkan ukuran yang pas, warna yang sesuai

dengan kebutuhan dan pilihan kalian. Orang tua sifatnya hanya membantu dan mengarahkan.

Begitu juga dalam pelaksanaan otonomi daerah. Masyarakat lebih tahu akan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapinya sehingga dalam menentukan kebijakan partisipasi masyarakat sangatlah penting. Pemerintah berperan dalam memberikan arahan dan membantu dalam perumusan kebijakan.



Sumber :www.google.co.id
Gambar: 2.6 Di era otonomi daerah masyarakat dituntut untuk berpartisipasi, terutama dalam perumusan kebijakan publik.

Proses ini penting karena setiap kebijakan publik apabila dalam perumusannya mengikutsertakan masyarakat, maka kebijakan publik yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan keinginan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Bahkan masyarakat akan dengan terbuka ikut serta dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Jika demikian maka akan menumbuhkan semangat persatuan serta kerja keras masyarakat. Partisipasi masyarakat terhadap pemerintah maupun pada lembaga legislatif (DPRD)

juga bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Diantaranya memupuk budaya demokrasi, menumbuhkan masyarakat yang sadar hukum, bermoral dan berakhlak mulia.

2. Kebijakan publik

a. Pengertian

Untuk memahami istilah dan pengertian kebijakan *publik*, kita perlu mengetahui pengertian kebijakan publik. Kebijakan publik berasal dari kata kebijakan dan publik. Kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani polis yang berarti negara/kota. Dalam bahasa Latin disebut *politia* yang berarti negara.

Dalam bahasa Inggris disebut dengan *policie* yang berarti masalah yang berhubungan dengan masalah publik dan administrasi pemerintahan.

Sedangkan kata publik berasal dari bahasa Inggris, *public* yang berarti umum, masyarakat atau negara. Berdasarkan arti kata tersebut maka kebijakan publik adalah setiap keputusan atau kegiatan yang dikeluarkan atau dijalankan berkaitan dengan kepentingan publik dan negara.

Agar lebih jelas lagi tentang pengertian kebijakan publik kalian dapat mempelajari beberapa pendapat ahli berikut:

1) Thomas R. Dye

Kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu.

- 2) A. Hoogerwert
Kebijakan publik sebagai unsur penting dari politik, dapat diartikan sebagai mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu.
- 3) Anderson
Kebijakan publik adalah hubungan antar unit-unit pemerintah dengan lingkungannya. (Bambang Margono dkk, 2003:6)

b. Perumusan kebijakan publik

Penerapan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk itu, setiap daerah otonom dalam merumuskan suatu kebijakan publik harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Adanya perumusan kebijakan publik ini, merupakan suatu kesempatan yang paling tepat bagi masyarakat untuk mengajukan usulan. Bagaimanakah alur proses perumusan kebijakan publik?

Pendapat lain dari R.C. Chandler dan J.C. Plano: Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik.



Menurut William N. Dunn (2000:4) perumusan kebijakan publik dapat dilakukan melalui beberapa tahap, sebagai berikut:

- 1) Penyusunan agenda
Pada tahap ini para pejabat yang dipilih dan diangkat hendaknya menempatkan penyusunan agenda sebagai agenda bersama. Tanpa adanya penyusunan agenda bersama dikawatirkan banyak masalah yang tidak tersentuh sama sekali atau tertunda dalam waktu yang lama.
- 2) Formulasi kebijakan
Pada tahap ini para pejabat merumuskan suatu alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislatif.
- 3) Adopsi kebijakan
Pada tahap ini, alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
- 4) Implementasi kebijakan
Pada tahap ini kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit teknis pemerintah dengan mendayagunakan sumber daya finansial dan manusia.

5) Penilaian kebijakan

Pada tahap ini unit-unit pemeriksaan dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

c. Bentuk-bentuk kebijakan publik

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat dan ditetapkan oleh para penyelenggara negara dengan melibatkan segenap lapisan masyarakat. Kebijakan publik dapat ditetapkan dalam berbagai bentuk antara lain:

1) Peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a) UUD 1945;
- b) Ketetapan MPR.
- c) Undang-Undang.
- d) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- e) Peraturan Pemerintah.
- f) Peraturan Presiden.
- g) Peraturan Daerah.

2) Pidato pejabat tinggi, meliputi:

- a) Pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus.
- b) Pidato presiden atau menteri pada waktu hari besar nasional.
- c) Pernyataan pejabat negara.

3) Program-program pemerintah, meliputi:

- a) RAPBN.
- b) RAPBD.
- c) Arah kebijakan.
- d) Proyek-proyek.

4) Tindakan yang dilakukan pemerintah, meliputi:

- a) Kunjungan presiden atau menteri ke negara lain, dan
- b) Kehadiran presiden atau menteri ke suatu daerah, kongres, muktamar dan sebagainya.



Gambar : 2.7 Pernyataan yang dikeluarkan seorang pejabat negara merupakan bentuk kebijakan publik.



Sumber :www.google.co.id

Gambar:2.8 Program wajib belajar sembilan tahun merupakan salah satu bentuk kebijakan publik.

Adapun yang termasuk kebijakan publik, antara lain:

- a. Kebijakan kenaikan kenaikan tarif angkutan,
- b. Kebijakan cukai tembakau,
- c. Kebijakan pajak kedaratan mewah,
- d. Program transigrasi, dan
- e. Program wajib belajar sembilan tahun.

3. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik

Kebijakan publik pada dasarnya dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kepentingan masyarakat. Oleh karena itu dalam perumusan dan penetapannya harus selalu mengikutsertakan masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

Partisipasi masyarakat dapat menunjukkan tingkat dukungan masyarakat terhadap kebijakan publik. Dengan adanya partisipasi masyarakat yang tinggi maka kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat, sesuai dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 serta tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

- Bentuk partisipasi masyarakat yang positif terhadap pemerintah daerah dapat
- divujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan, antara lain;
- a. Menyampaikan aspirasi dengan cara santun kepada pemerintah daerah.
- b. Mematuhi dan melaksanakan peraturan daerah.
- c. Melaksanakan kegiatan keamanan dan ketertiban lingkungan.
- d. Membayar pajak bumi dan bangunan.
- e. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Perlu kita sadari bahwa setelah kebijakan publik terbentuk seringkali tidak sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hambatan-hambatan tidak dapat berjalannya kebijakan publik yang terjadi dalam masyarakat kadangkala berasal dari masyarakat sendiri. Mengapa demikian? Hambatan-hambatan bisa disebabkan karena rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat untuk melaksanakan kebijakan publik.

Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan publik merupakan proses dan wujud partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan kenegaraan. Tingkat kesadaran hukum dan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi mempengaruhi kebijakan publik. Semakin tinggi kesadaran hukum dan kesadaran masyarakat melaksanakan kebijakan publik semakin besar sifat membangun dan tanggung jawab. Sebaliknya apabila kesadaran hukum

dan kesadaran masyarakat masih rendah dapat melahirkan kebijakan publik yang bersifat merusak dan kurang bertanggung jawab.

Setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah diupayakan mendapatkan dukungan masyarakat. Partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik dapat dilakukan melalui empat macam cara, yaitu: pada tahap proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemanfaatan hasil, dan tahap evaluasi.



Sumber : www.google.co.id

Gambar:2.9 Unjuk rasa masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan atau pertimbangan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan.

a. Partisipasi proses pembuatan kebijakan publik

Dalam proses ini, masyarakat berpartisipasi aktif maupun pasif dalam pembuatan kebijakan publik. Dengan berpartisipasinya masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dapat menunjukkan adanya kekhasan daerah. Semakin besar keinginan masyarakat untuk menentukan nasib sendiri, semakin besar partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Contoh partisipasi masyarakat dalam tahap ini adalah masyarakat memberikan masukan atau pertimbangan baik secara lisan atau tertulis kepada pemerintah daerah untuk menjadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan publik daerah sebelum ditetapkan.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi ini, merupakan partisipasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik atau pembangunan, dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan menyumbangkan tenaga, harta, pikiran dan lain-lain.

Contoh partisipasi masyarakat pada tahap ini adalah masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat, bila kebijakan daerah menetapkan adanya wilayah bebas sampah. Masyarakat dapat terlibat langsung sebagai pelaksana kebijakan daerah dan selalu mewujudkannya.

c. Partisipasi dalam memanfaatkan hasil

Telah kita ketahui bersama bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam menikmati hasil pembangunan. Masyarakat di daerah harus dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dalam arti mendapatkan pembagian sesuai dengan pengorbanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rendahnya partisipasi untuk menikmati hasil dari sebuah kebijakan publik dapat menimbulkan sikap tidak puas bagi masyarakat. Dengan belum meratanya pembangunan dan hasilnya di setiap daerah mendorong kepada kelompok-kelompok tertentu ingin memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Partisipasi dalam evaluasi

Setiap kebijakan publik di daerah dinyatakan berhasil, jika dapat memberikan manfaat kehidupan bagi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diberi kesempatan untuk menilai hasil yang telah dicapai. Partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kebijakan publik merupakan sikap dukungan yang positif terhadap pemerintah.

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi dapat dilakukan dengan memantau hasil kebijakan publik dan pelaksanaannya. Masyarakat harus bersikap kritis apakah kebijakan publik sudah mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat atau belum. Apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan tujuan ditetapkan? Tanpa adanya evaluasi dari masyarakat justru memperbesar peluang terjadinya penyimpangan yang merugikan masyarakat.

Dalam memberikan evaluasi terhadap kebijakan publik harus bersifat konstruktif dan bukan bersifat destruktif. Apabila kita menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan kebijakan publik melalui demonstrasi kita lakukan dengan santun, tidak dengan cara-cara kekerasan, atau merusak fasilitas-fasilitas umum. Pada kenyataannya partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik sebagian besar masih pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan belum pada proses pembuatan ataupun evaluasi.



Tugas 2.3

Carilah berita dari surat kabar, majalah, internet yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah daerah tempat tinggalmu!. Analisis berita tersebut! Kemukakan pendapatmu apakah kebijakan pemerintah daerah tersebut telah sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat?

4. Dampak negatif tidak aktifnya masyarakat dalam perumusan kebijakan publik

Partisipasi masyarakat merupakan cara keikutsertaan dalam perumusan kebijakan publik antara lain dalam hal penyusunan peraturan daerah. Dalam pasal 139 UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan

perda. Dengan keaktifannya dalam memberikan masukan diharapkan akan melahirkan suatu kebijakan publik yang dapat melindungi, mengayomi, meningkatkan kesejahteraan serta selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Apabila masyarakat tidak berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik, maka kebijakan yang diambil bisa jadi tidak sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan dapat juga bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Kebijakan publik yang demikian ini dapat menimbulkan dampak negatif dan merugikan masyarakat. Tidak adanya kesesuaian antara kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan kepentingan masyarakat selain merugikan masyarakat, juga dapat menurunkan kewibawaan pemerintah sendiri. Jika, kebijakan publik tidak dapat diterima oleh masyarakat dan pelaksanaan otonomi daerah akan terhambat masyarakat tidak lagi mempercayai pemerintahnya.

Selain dituntut untuk aktif memberikan masukan dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik, masyarakat harus aktif memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Pengawasan masyarakat sangat penting karena tanpa adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dapat terjadi penyimpangan kebijakan publik. Misalnya, kebijakan pemerintah dalam memberikan subsidi langsung tunai (SLT) pada masyarakat yang tidak mampu, pengadaan air bersih atau pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun. Jika masyarakat menemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan maka masyarakat dapat melaporkan kepada yang berwajib.



2.3

Bentuklah kelompok beranggotakan 5 (lima) siswa Berikut ini, disajikan berita dari surat kabar. Bacalah dengan cermat kutipan ini.

Sejumlah tokoh masyarakat di daerah selatan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Sabtu, 16 September 2006, mendeklarasikan pembentukan Kabupaten Cilangkahan. Masyarakat Lebak Selatan memutuskan memisahkan diri dari kabupaten Lebak dengan tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Deklarasi Cilangkahan itu dihadiri ribuan warga dari 10 kecamatan di wilayah Lebak bagian selatan. Kesepuluh kecamatan itu adalah Banjarsari, Malingping, Cihara, Panggarangan, Bayah, Cijaku, Wansalam, Cilograng, Cibeber, dan Ciglembong. Sepuluh kecamatan itulah yang akan bersatu membentuk Kabupaten Cilangkahan.

Nama Cilangkahan itu diambil untuk mengingat sejarah ketika 9 dari 10 kecamatan itu dulu termasuk wilayah Kawedanan Cilangkahan. “Dengan alasan sejarah itulah, kami memutuskan memberi nama Kabupaten Cilangkahan”, ujar Ketua Badan Koordinasi (Bokar) Pembentukan Kabupaten Cilangkahan Hifni Nawawi.

Salah satu alasan pembentukan kabupaten baru itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasalnya, selama ini masyarakat Lebak Selatan tidak pernah menikmati hasil pembangunan. Padahal, sekitar 60% Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lebak, sebesar Rp29 miliar, berasal dari daerah selatan.

Alasan lain adalah untuk memperpendek layanan kepada masyarakat. Pasalnya, saat ini untuk mengurus izin atau dokumen administrasi, warga harus meluangkan waktu lebih dari satu hari.

Untuk menuju Rangkasbitung, ibu kota Kabupaten Lebak, warga harus menempuh jarak 51 kilometer hingga 150 kilometer. Lebih parah lagi, kondisi jalannya rusak parah dan jumlah angkutan sangat terbatas. Biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 50.000 untuk pergi pulang.

Pembentukan Kabupaten Cilangkahan juga bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur. Selama ini, pembangunan infrastruktur di daerah selatan jauh tertinggal dengan daerah utara.

Kendati saat ini sudah banyak jalan aspal, kualitasnya masih rendah. Biasanya, aspal jalan kembali rusak hanya dalam hitungan bulan, seperti jalan raya yang menghubungkan Saketi (Pandeglang) Malimping, dan juga jalan Malimping-Cijaku-Banjarsari-Gunung Kencana Rangkasbitung.

Bakor Pembentukan Kabupaten Cilangkahan menargetkan kabupaten baru ini sudah terbentuk pada tahun 2008 mendatang. Ketua DPRD Lebak Pepep Faisalu menegaskan, DPRD mendukung rencana pembentukan Kabupaten Cilangkahan.

(Disarikan dengan beberapa perubahan dari berita Harian Kompas, 17 September 2006)

Berdasarkan bacaan di atas, kerjakan perintah berikut ini!

1. Berikan analisa mengapa masyarakat suatu daerah menginginkan untuk membentuk kabupaten/kota sendiri lepas dari kabupaten/kota induknya?
2. Menurut kalian apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan? Berikan alasannya!
3. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan jika menginginkan pemekaran atau pembentukan daerah baru?

Rangkuman

1. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Tiga asas pelaksanaan otonomi daerah yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
4. Otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan UUD 1945 pasal 18, Tap MPR No.IV/MPR/2000, UU No. 32 tahun 2004, dan UU No. 33 tahun 2004.
5. Syarat pembentukan daerah otonom, yaitu syarat administratif, teknis, fisik kewilayahan.
6. Prinsip otonomi daerah adalah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggungjawab.
7. Pemerintahan daerah otonom terdiri dari kepala daerah dan perangkat daerah lainnya sebagai lembaga eksekutif dan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah.
8. Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam kehidupan politik. Partisipasi masyarakat menunjukkan tingkat dukungan masyarakat terhadap kebijakan publik.
9. Kebijakan publik meliputi apa yang dinyatakan, dilakukan, atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang memuat sasaran dan tujuan program pemerintah.
10. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik meliputi; partisipasi dalam perumusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan dan partisipasi dalam evaluasi.
11. Jika masyarakat tidak aktif dalam perumusan kebijakan publik dapat merugikan masyarakat, diantaranya kebijakan publik tidak sesuai dengan kehendak masyarakat.

Uji Kompetensi

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Otonomi daerah adalah hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang sesuai dengan
 - a. peraturan perundang-undangan
 - b. kehendak pemerintah
 - c. kehendak rakyat
 - d. potensi daerah
2. Pelaksanaan otonomi daerah saat ini diatur dengan Undang-Undang No.
 - a. 5 tahun 1974
 - b. 22 tahun 1999
 - c. 25 tahun 1999
 - d. 32 tahun 2004
3. Berikut ini asas-asas otonomi daerah, kecuali
 - a. asas demokrasi
 - b. asas desentralisasi
 - c. asas tugas pembantuan
 - d. asas dekonsentrasi
4. Gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih
 - a. secara demokratis
 - b. Menteri Dalam Negeri
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - d. Presiden selaku kepala negara
5. Berikut ini yang tidak termasuk prinsip-prinsip otonomi daerah adalah
 - a. luas
 - b. ketergantungan
 - c. prinsip nyata
 - d. prinsip terbatas
6. Otonomi daerah adalah pengalihan tugas dan wewenang dari
 - a. daerah kepada pusat
 - b. pusat kepada daerah
 - c. negara pada masyarakat
 - d. dinas yang satu ke dinas yang lain

Uji Kompetensi

7. Syarat teknis, yang menjadi dasar pembentukan daerah otonom adalah sebagai berikut, kecuali
 - a. kemampuan ekonomi
 - b. potensi daerah
 - c. persetujuan DPRD
 - d. sosial budaya
8. Kepala daerah beserta perangkat daerah yang lain disebut
 - a. badan legislatif daerah
 - b. badan yudikatif daerah
 - c. badan perancang daerah
 - d. badan eksekutif daerah
9. Contoh salah satu masalah yang muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah
 - a. adanya sikap apatis dari masyarakat
 - b. partisipasi masyarakat yang dominan
 - c. meningkatnya etos kerja aparatur pemerintah
 - d. terdapatnya sumber daya manusia yang berkualitas
10. Di era otonomi daerah, partisipasi masyarakat sangat diperlukan dengan harapan antara lain, kecuali
 - a. kebijakan publik sesuai dengan kehendak pemimpin
 - b. kebijakan publik sesuai dengan kehendak rakyat
 - c. kebijakan publik mengutamakan kepentingan masyarakat
 - d. kebijakan publik meningkatkan persatuan dan kesatuan

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benar!

1. Jelaskan apa yang dimaksud otonomi daerah!
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Jelaskan yang dimaksud dengan otonomi nyata!
3. Sebutkan tugas dan wewenang pemerintah daerah!
4. Sebutkan macam-macam keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik!
5. Apa akibat kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tidak



Globalisasi dan Dampaknya bagi Masyarakat serta Negara

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, siswa mampu:

- Menjelaskan arti dan pentingnya globalisasi bagi bangsa Indonesia.
- Mendiskripsikan politik luar negeri dalam hubungan internasional di era globalisasi.
- Mendiskripsikan dampak globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Menunjukkan sikap terhadap globalisasi

Kata Kunci: globalisasi, politik bebas aktif, teknologi informasi

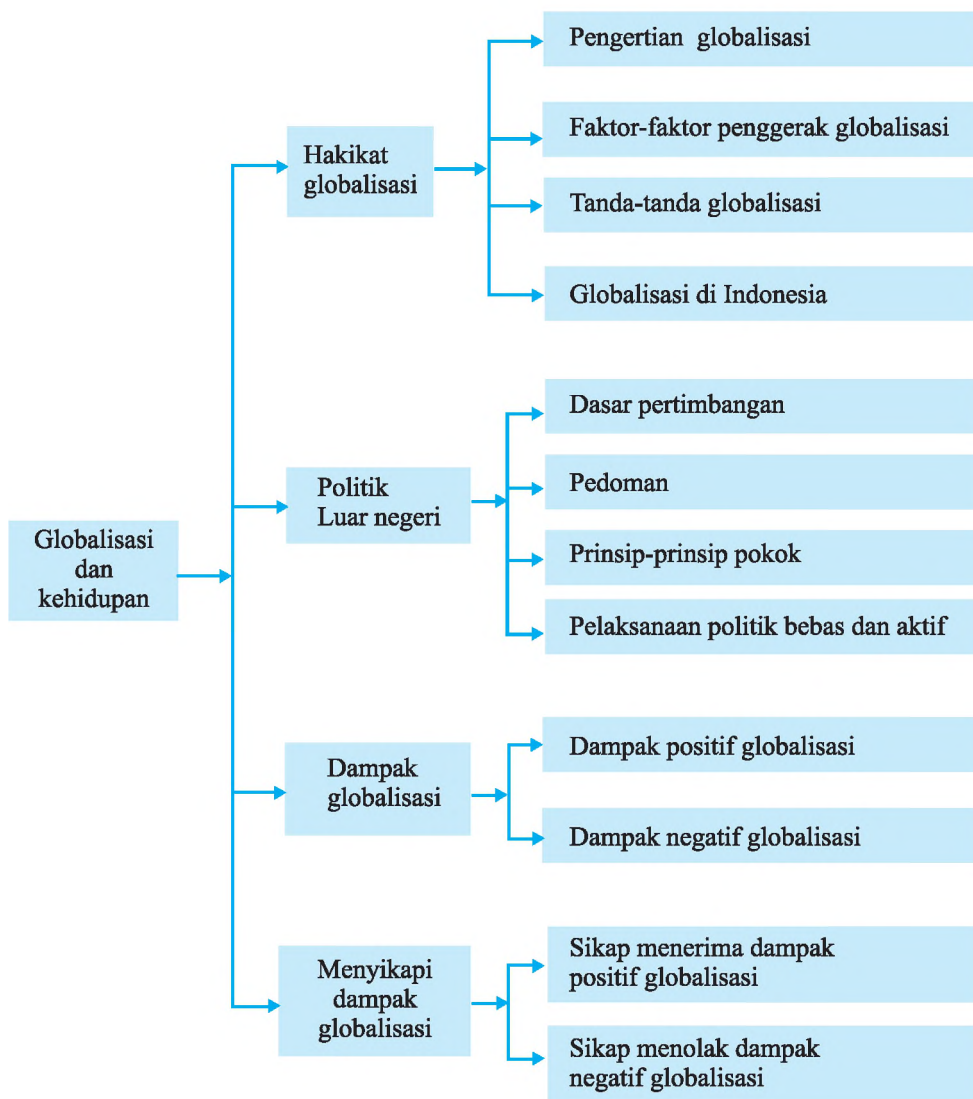
Pernahkah kalian merasakan renyahnya ayam goreng Kentucky Fried Chicken (KFC) atau enakya burger Mc Donalds? Pasti, kalian pernah merasakannya. Tapi, tahukah kalian darimana asal makanan tersebut? Ternyata makanan tersebut berasal dari Amerika Serikat. Bagaimana sampai ke Indonesia ya?

Masyarakat Indonesia sekarang telah memasuki era globalisasi. Hal ini, terbukti ketika kita bisa merasakan enakya makanan luar negeri tanpa harus datang ke negara asalnya. Tidak hanya dalam hal makanan, kita juga bisa merasakannya lewat mode pakaian, peralatan, elektronika yang sering kita gunakan sehari-hari. Globalisasi juga kita rasakan ketika menonton pertandingan sepakbola misalnya liga Inggris, Spanyol atau Italia secara langsung. Bagaimana hal ini bisa terjadi?

Kemajuan teknologi dan informasi, telah membuat dunia yang luas menjadi terasa sempit. Masyarakat dunia bisa saling bertukar pikiran, memasarkan produk yang dihasilkan bahkan mengetahui kabar terbaru di belahan dunia lain dalam waktu sekejap. Pendek kata, tata kehidupan dunia ini memang telah berubah. Namun, kita mesti ingat, globalisasi bisa memberikan keuntungan bagi kehidupan kita tapi bisa juga merugikan. Bagaimana penjelasannya?

Dalam bab ini kita akan belajar dampak globalisasi terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Termasuk di dalamnya politik luar negeri dalam hubungan internasional di era global ini. Sebelum lebih jauh, terlebih dahulu kita akan belajar apa pengertian globalisasi? Selain itu kita juga akan belajar bagaimana menentukan sikap terhadap dampak globalisasi. Agar kalian mendapatkan gambaran pokok bahasan dalam bab ini, coba kalian pelajari peta konsep berikut ini.

Peta Konsep



A. Hakikat Globalisasi

Dalam pengantar di atas telah disinggung bahwa globalisasi telah kita rasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tahukah kalian apa pengertian globalisasi?

1. Pengertian globalisasi

Untuk memahami istilah dan pengertian globalisasi, terlebih dahulu kita perlu mengetahui asal muasal istilah globalisasi. Istilah globalisasi berasal dari bahasa Inggris yakni "globe" yang berarti dunia atau bola dunia. Apakah yang dimaksud globalisasi?

Globalisasi merupakan suatu proses menuju lingkup dunia. Dengan demikian globalisasi dapat diartikan sebagai proses mendunia, dimana semua peristiwa baik ekonomi, politik maupun budaya yang terjadi di satu belahan dunia dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Atau dapat disebut globalisasi merupakan suatu proses di mana hubungan sosial dan saling ketergantungan antarmanusia di dunia ini semakin besar.

Hal ini seperti yang dikatakan seorang ahli bernama R. Robertson bahwa globalisasi adalah proses mengecilnya dunia dan meningkatnya kesadaran akan dunia sebagai satu kesatuan, saling ketergantungan dan kesadaran global akan dunia yang menyatu. Ahli lain bernama Martin Albrow mengatakan globalisasi menyangkut seluruh proses di mana penduduk dunia terhubung kedalam komunitas dunia yang tunggal, komunitas global.



Sumber : www.google.co.id

Gambar 3.1 Globalisasi menyangkut seluruh proses di mana penduduk dunia terhubung kedalam komunitas dunia yang tunggal, komunitas global.

Pendapat lain tentang globalisasi.

a. A. G. McGrew

Globalisasi mengacu pada keserbaragaman hubungan dan saling keterkaitan antar masyarakat yang membentuk sistem dunia modern. Globalisasi adalah proses dimana berbagai peristiwa, keputusan dan kegiatan di belahan dunia yang satu dapat membawa konsekuensi penting bagi berbagai individu dan masyarakat di belahan dunia yang lain.

b. M. Waters

Globalisasi adalah sebuah proses sosial di mana halangan-halangan bersifat geografis pada tatanan sosial dan budaya semakin menyusut dan setiap orang kian sadar bahwa mereka semakin dekat satu sama lain.

e. Emmanuel Richter

Jaringan kerja globalisasi yang secara bersamaan menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi dalam planet ini ke dalam ketergantungan dan persatuan dunia.

Berdasarkan pengertian di atas secara jelas globalisasi mampu membuat suatu perubahan kehidupan dunia yang dulunya sangat sederhana menjadi bersifat multidimensional. Globalisasi juga membuat semakin kuat ikatan ekonomi, politik, teknologi dan budaya yang mampu menghubungkan individu, komunitas, perusahaan dan pemerintah di seluruh dunia.



Sumber :www.google.co.id

Gambar 3.2 Globalisasi diikuti dengan munculnya perusahaan-perusahaan multinasional dan transnasional seperti Mc Donalds di berbagai negara di seluruh dunia.

Dalam konsep awal orang beranggapan bahwa globalisasi merupakan suatu gejala ekonomi. Seperti yang tertulis dalam Wikipedia Encycloedia Indonesia bahwa globalisasi mengacu terutama pada liberalisasi perdagangan bebas (*free trade*). Hal ini dikarenakan, berkembangnya globalisasi diikuti dengan munculnya perusahaan-perusahaan multinasional dan transnasional seperti Toyota, Siemens, Coca Cola, Samsung, Mc Donalds di berbagai negara di seluruh dunia.

Globalisasi membuat suatu kenyataan bahwa kehidupan dunia menjadi satu kesatuan dalam “satu dunia”, yang membuat sebuah desa global (*global village*) dengan kehidupan manusia secara individu, kelompok, atau bangsa-bangsa menjadi saling ketergantungan (*interdependency*) dalam semua aspek kehidupan. Pendek kata, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat ruang lingkup interaksi antar manusia di seluruh dunia semakin menyempit.

2. Faktor-faktor penggerak globalisasi

Banyak ahli menyatakan bahwa semakin berkembangnya globalisasi maka hubungan masyarakat dunia serta saling ketergantungan dalam segala aspek kehidupan terlihat semakin nyata. Dua faktor yang mendukung proses globalisasi menjadi semakin cepat, yaitu perkembangan teknologi komunikasi dan informasi serta transportasi.

a. Teknologi komunikasi dan informasi

Pernahkah terpikir dalam benak kalian bagaimana kita yang berada di Indonesia bisa mengetahui kejadian perang di Irak, Palestina atau badai Katrina yang melanda Amerika Serikat? Semua ini karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Jarak yang begitu jauh bukanlah penghalang. Berkembangnya teknologi dan informasi dunia yang pesat membuat hubungan manusia antarmanusia di dunia semakin mudah.



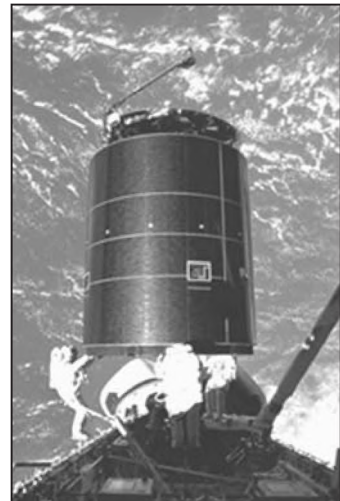
Sumber : www.google.co.id

Gambar 3.3 Telpon seluler dan Fasilitas internet memungkinkan semua orang untuk memperoleh informasi dengan cepat.

Sebelum tercipta alat-alat komunikasi yang canggih, tempo dulu manusia masih menggunakan sarana komunikasi yang sangat sederhana, kualitas dan kuantitas komunikasi sangat terbatas. Sarana komunikasi dan informasi yang canggih dengan harga yang terjangkau mampu mengatasi semua hambatan yang selama ini dialami oleh manusia dalam menjalin hubungan manusia dengan sesama karena dipisahkan waktu dan jarak, serta tempat yang berbeda.

Contoh alat komunikasi modern seperti telepon seluler yang dimiliki setiap orang memungkinkan setiap waktu dapat berkomunikasi dengan siapa saja dimana mereka berada. Kemudian internet yang membuat manusia dapat mengakses semua data informasi yang ada dan tersebar di seluruh dunia dalam waktu yang sesingkat mungkin. Internet dapat mempermudah suatu transaksi-transaksi dalam dunia bisnis di seluruh dunia. Internet dapat dipergunakan untuk *e-banking*, yaitu melakukan transfer modal yang dilakukan dengan pertukaran dokumen. Dalam dunia pendidikan internet melahirkan adanya *e-learning*, yaitu model pembelajaran dimana para siswa tidak perlu datang di sekolah-sekolah akan tetapi cukup berada di depan layar komputer dan berkomunikasi secara visual melalui internet dengan pengajar atau sesama pelajar.

Teknologi satelit komunikasi dipergunakan oleh stasiun televisi untuk menyiarkan secara langsung suatu peristiwa yang terjadi di satu negara ke seluruh negara di dunia dalam waktu yang bersamaan dengan kejadian peristiwa tersebut. Misalnya adanya bencana alam, pertandingan olah raga, peperangan dan hiburan.



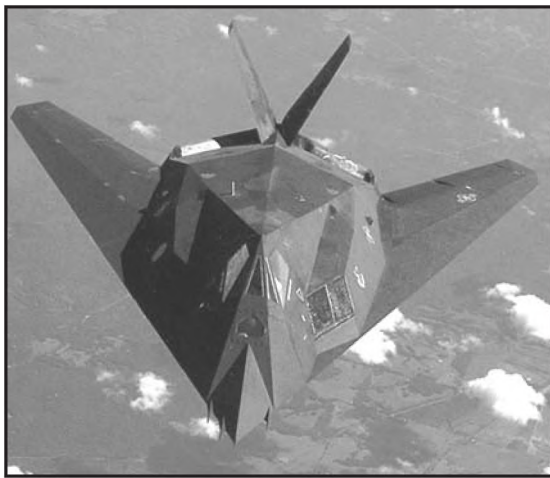
Sumber : dokumen penerbit

Gambar 3.4 Satelit dapat mempermudah untuk menjalin komunikasi di berbagai belahan bumi.

b. Teknologi Transportasi

Sebelum terciptanya alat transportasi yang mutakhir, untuk menuju suatu daerah seseorang harus mengorbankan waktu untuk perjalanan yang panjang. Lain halnya dengan saat ini, orang menjadi semakin cepat dan mudah untuk mencapai daerah yang dituju.

Sarana transportasi yang semakin canggih juga dapat mempengaruhi terjadinya perubahan perekonomian suatu negara maupun bidang-bidang kehidupan yang lain; seperti halnya politik, sosial dan budaya. Hal ini, dikarenakan ditemukannya teknologi transportasi dengan kecepatan tinggi sehingga memudahkan orang untuk menjalin kerjasama antar negara.



Sumber : dokumen penerbit

Gambar 3.5 Teknologi transportasi mutakhir mempermudah untuk menjangkau suatu daerah yang sesulit apapun

Teknologi transportasi mutakhir mempermudah untuk menjangkau suatu daerah sesulit apapun. Teknologi transportasi yang canggih, seperti pesawat yang bermesin jet dapat dipergunakan untuk mengantar para penumpang dari satu negara ke negara lain dalam waktu singkat. Apalagi dengan biaya yang murah, pesawat terbang saat ini bukan lagi menjadi sarana transportasi bagi masyarakat kelas atas. Sebagian besar anggota masyarakat mampu menggunakan pesawat terbang sebagai alat transportasi.



Tugas 3.1

Carilah berita tentang globalisasi dari surat kabar atau majalah. Kemudian tempelkan pada selembar kertas dan berilah analisis tentang berita tersebut! Diskusikan dengan teman yang lain.

3. Tanda-tanda globalisasi

Kehidupan suatu negara yang telah memasuki era globalisasi, memiliki pertanda khusus. Secara umum Budiyantha (2005:90) menyebutkan bahwa tanda-tanda globalisasi adalah sebagai berikut.

- a. Perdagangan global semakin meningkat.

- b. Aliran modal internasional, di antaranya investasi luar negeri telah masuk dan mempengaruhi perekonomian negara tersebut.
- c. Meningkatnya aliran data lintas batas, seperti penggunaan internet, satelit komunikasi dan telepon.
- d. Adanya desakan berbagi pihak untuk mengadili para penjahat perang di Mahkamah Internasional (*International Criminal Court*) dan adanya gerakan untuk menyerukan keadilan internasional.
- e. Meningkatnya pertukaran budaya (*cultural exchange*) internasional.
- f. Menyebar luasnya paham multikulturalisme dan semakin besarnya akses individu terhadap berbagai macam budaya.
- g. Meningkatnya perjalanan dan turisme lintas negara.
- h. Meningkatnya imigrasi, termasuk imigrasi ilegal.
- i. Berkembangnya infrastruktur telekomunikasi global.
- j. Berkembangnya sistem keuangan global.
- k. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan multinasional.
- l. Meningkatnya peran organisasi-organisasi internasional, seperti: WTO, IMF yang berurusan dengan transaksi-transaksi internasional.



Sumber :www.google.co.id

Gambar 3.6 Tanda globalisasi diantaranya meningkatnya peran organisasi internasional seperti IMF. Dalam gambar Presiden Suharto sedang menandatangani kesepakatan kerjasama tersebut dengan IMF untuk keluar dari krisis ekonomi tahun 1997.

4. Globalisasi di Indonesia

Di dunia ini, tidak ada satu negarapun yang bisa lepas dari pengaruh globalisasi, termasuk Indonesia. Globalisasi bagi Indonesia merupakan suatu tantangan dan kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu ambil bagian dalam kanevas globalisasi dunia. Kita memahami konsekuensi globalisasi, dimana suatu peristiwa yang terjadi Indonesia akan memberikan pengaruh pada dunia internasional. Sebaliknya peristiwa yang terjadi di dunia internasional akan memberikan dampak bagi Indonesia.

Agar Indonesia dapat berperan dalam globalisasi internasional, maka diperlukan suatu persiapan yang matang dan selalu terbuka terhadap perubahan. Untuk menghadapi semakin derasnya arus globalisasi diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang handal.

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu akan berhasil atau tidaknya negara kita menghadapi tantangan di era global.

Untuk mendapatkan yang berkualitas diperlukan pelatihan dan pendidikan yang mampu mempersiapkan manusia untuk dapat bersaing di tengah arus globalisasi. Dalam penjelasan umum UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa. Hal ini dimaksudkan untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.



3.1

Diskusikan dengan kelompok belajarmu. Globalisasi menjadikan bangsa-bangsa di dunia terikat dalam “satu dunia”. Bagaimana keadaan bangsa Indonesia, jika menutup diri dengan adanya globalisasi tersebut? Mungkinkah bangsa Indonesia tidak terbawa arus globalisasi yang semakin kuat dan cepat? Presentasikan hasilnya di depan kelas!

B. Politik Luar Negeri Indonesia Bebas dan Aktif

1. Dasar pertimbangan

Kalian tentu memahami bahwa Indonesia merupakan bangsa yang merdeka dan berdaulat. Meski demikian dalam memenuhi kebutuhannya tetap memerlukan bantuan dari bangsa lain. Hanya saja, bantuan yang diterima adalah bantuan yang tidak mengikat. Dengan demikian bantuan yang diterima tidak mengurangi kedaulatan bangsa dan kedudukannya tetap sejajar dengan bangsa-bangsa lain.



Sumber : www.google.co.id

Gambar 3.7 Dalam menjalin hubungan internasional, bangsa Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif yang diabdikan pada kepentingan nasional

Dengan kedaulatan yang kuat, bangsa Indonesia berhak menentukan nasib sendiri, termasuk dalam hal kebijakan-kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri biasa disebut dengan politik luar negeri yakni suatu strategi, pola perilaku, dan kebijakan suatu negara berhubungan dengan negara lain ataupun dunia internasional.

Sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia telah dihadapkan pada dua kekuatan besar, yaitu blok Barat (Amerika Serikat dengan

Sekutunya) dengan ideologi liberal dan blok Timur (Uni Soviet dengan Sekutunya) yang berideologi komunis. Keadaan yang demikian ini, berpengaruh terhadap usaha-usaha bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Kenyataan yang demikian ini, memberikan dorongan bangsa Indonesia untuk menentukan sikap dalam merumuskan politik luar negerinya. Bagaimana rumusan politik luar negeri Indonesia?

Pada tanggal 2 September 1948, di hadapan Badan Pekerja Nasional Pusat pemerintah Indonesia mengumumkan pendirian politik luar negeri yang antara lain berbunyi "... tetapi mestikah kita, bangsa Indonesia, yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita?" Bangsa Indonesia melaksanakan politik luar negeri atas dasar keyakinan, percaya akan kekuatan sendiri dan berjuang atas kesanggupan diri sendiri.

Untuk itu, dalam menjalin hubungan internasional, bangsa Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif yang diabdikan pada kepentingan nasional. Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif sebagai perwujudan salah satu tujuan negara yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, meskipun arus globalisasi terus mempengaruhi setiap lini kehidupan, Indonesia tetap mempertahankan politik yang bebas aktif.

Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif menurut Muh.Hatta, dalam buku "Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia " adalah sebagai berikut :

- a. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara
- b. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri.
- c. Meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai, Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat
- d. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam pancasila, dasar filsafat negara kita.



Tugas 3.2

Bagaimana menurut pendapatmu mengenai pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif di era globalisasi sekarang ini? Presentasikan hasilnya!

2. Pedoman politik luar negeri

Pedoman pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif berdasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut ;

- a. Dasa Sila Bandung yang mencerminkan solidaritas negara-negara Asia dan Afrika, dan perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, serta mengandung sifat non-intervensi (tidak turut campur urusan negara lain). Pedoman ini diwujudkan misalnya ketika Indonesia memprakarsai berdirinya Gerakan Non-Blok (GNB) pada tahun 1961. Gerakan ini bertujuan untuk meredakan ketegangan antara Blok Barat dan Blok Timur sehingga tercipta perdamaian dunia. Belum lama ini Indonesia menyelenggarakan KAA pada tanggal 22-23 April 2005 di Jakarta.
- b. Prinsip bahwa masalah Asia hendaknya dipecahkan oleh bangsa Asia sendiri dengan kerjasama regional. Misalnya, Indonesia aktif membantu penyelesaian konflik di Filipina ataupun di Kampuchea.
- c. Pemulihan kembali kepercayaan negara-negara lain terhadap maksud dan tujuan revolusi Indonesia dengan cara memperbanyak kawan daripada lawan, menjauhkan kontradiksi dengan mencari keserasian sesuai dengan falsafah Pancasila. Misalnya, Indonesia ikut menjadi fasilitator secara aktif dalam mendamaikan antara Palestina dan Israel.
- d. Pelaksanaan dilakukan dengan keluwesan dalam pendekatan dan penanggapan sehingga pengarahannya harus dilakukan untuk kepentingan nasional terutama kepentingan ekonomi rakyat. Perwujudan dari pedoman ini misalnya, Indonesia aktif dalam organisasi perdagangan di kawasan Asia Pasifik, dan menjadi anggota organisasi negara-negara penghasil minyak bumi. Hal ini sebagai wujud upaya mengelola kekayaan negara.

3. Prinsip-prinsip pokok politik luar negeri

Sesuai dengan pernyataan pemerintah pada tanggal 2 September 1948 yang disampaikan di depan Badan Komite Nasional Pusat, bahwa prinsip-prinsip dasar untuk melaksanakan politik luar negeri Indonesia adalah:

- a. Negara Indonesia menjalankan politik damai,
- b. Negara Indonesia menjalin persahabatan dengan segenap bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri soal susunan dan corak pemerintahan negeri masing-masing.
- c. Negara Indonesia memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasional untuk menjamin perdamaian yang kekal.
- d. Negara Indonesia berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional.
- e. Negara Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman pada piagam PBB.
- f. Negara Indonesia membantu PBB menyokong perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih terjajah. Hal ini, disebabkan karena tanpa kemerdekaan tidak mungkin tercipta rasa persaudaraan dan perdamaian internasional.

4. Pelaksanaan politik bebas dan aktif

Dengan melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, diharapkan dapat tercipta perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera. Apa yang dimaksud dengan politik bebas aktif?

- a. Bebas artinya bangsa Indonesia mempunyai kebebasan dalam menentukan sikap dan pandangan terhadap berbagai permasalahan internasional.
- b. Aktif artinya Indonesia senantiasa aktif memperjuangkan terwujudnya perdamaian dunia. Aktif dalam memperjuangkan adanya kemerdekaan dan kebebasan, memperjuangkan ketertiban dunia dan turut serta menciptakan keadilan sosial dunia.



Sumber : Kompas

Gambar 3.8 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan para pemimpin dunia

Sebagai upaya perwujudan politik luar negeri yang bebas aktif maka Indonesia selalu aktif ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Contoh perwujudan Indonesia dalam melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif adalah sebagai berikut.

- a) Indonesia pada tahun 1955, menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia-Afrika yang kemudian melahirkan Deklarasi Bandung.

- b) Indonesia aktif dalam pendirian Gerakan Non-Blok pada tahun 1961, berusaha membantu dunia internasional untuk meredakan ketegangan perang dingin antara blok Barat dan blok Timur
- c) Indonesia aktif dalam merintis dan mengembangkan organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN)
- d) Indonesia aktif ikut membantu penyelesaian konflik di Kamboja, perang saudara di Bosnia, pertikaian dan konflik di Philipina.

Dalam pergaulan internasional, Indonesia membina dan mempererat persahabatan dan kerja sama yang saling menguntungkan antarbangsa. Untuk meningkatkan peranan politik luar negeri yang bebas aktif dalam forum internasional dilakukan melalui pemantapan dasar pemikiran kenusantaraan, memperluas ekspor ke pasar dunia, menarik para investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia, kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.



3.2

Diskusikan dengan kelompok belajarmu. Sebagai negara yang menerapkan politik luar negeri bebas aktif, apakah dibenarkan apabila Indonesia melibatkan diri ikut serta dalam menciptakan perdamaian di Timur Tengah? Apa bila benar, tindakan apa yang harus dilaksanakan Indonesia untuk meredakan ketegangan-ketegangan yang terjadi kawasan Timur Tengah tersebut? Presentasikan hasilnya dalam diskusi kelas!

C. Dampak Globalisasi terhadap Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

Di awal bab ini kalian telah mempelajari pengertian globalisasi yang diartikan sebagai suatu proses menuju lingkup dunia. Semua peristiwa baik ekonomi, politik maupun budaya yang terjadi di satu belahan dunia dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia.. Proses ini bukan berarti tidak memberikan dampak dalam kehidupan.

Kita harus mengakui bahwa globalisasi telah membawa dampak yang luas dalam kehidupan manusia. Dampak yang ditimbulkan globalisasi tidak semuanya bersifat positif akan tetapi ada juga yang berdampak negatif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apa saja dampak globalisasi?

Untuk mengetahui sejauh mana dampak yang ditimbulkan globalisasi, berikut ini contoh dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi bagi kehidupan kita bersama.

1. Dampak positif globalisasi

Globalisasi yang berkembang saat ini, telah berpengaruh ke segala aspek kehidupan manusia. Diantaranya dampak pada bidang ekonomi, politik dan teknologi.

a. Bidang ekonomi

Seperti telah disinggung di awal pembahasan bahwa globalisasi pertama kali berkembang di bidang ekonomi. Mengamati perekonomian paling merasakan dampak positif globalisasi. Perkembangan industri begitu pesat, perdagangan bisa terjadi lintas negara serta membuka pasar tenaga kerja internasional. Dengan diterapkannya perdagangan bebas maka produk dalam negeri dapat dipasarkan ke berbagai negara tanpa bea masuk.



Sumber :www.google.co.id

Gambar 3.9 Salah satu perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

Selain berpengaruh terhadap perdagangan antar negara, globalisasi juga mendorong terbentuknya lembaga-lembaga ekonomi dunia yang beranggotakan negara-negara di dunia. Seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Trade Organization (WTO), sebagai organisasi dunia yang membantu mengatur laju perdagangan dan perputaran uang antarnegara. Globalisasi ikut berperan untuk membentuk perjanjian kerjasama perdagangan regional seperti Asia-Pasifik Economic Cooperation (APEC), North American Free Trade (NAFTA), Asian Free Trade Area (AFTA) dan adanya pembentukan mata uang Euro sebagai mata uang bersama negara-negara di kawasan Eropa.

b. Bidang politik

Pengaruh globalisasi tidak hanya dalam bidang ekonomi, globalisasi juga memberikan dampak yang positif terhadap bidang politik. Meskipun politik dan pemerintahan merupakan hak kedaulatan setiap negara, akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di era global ini, negara-negara lain menuntut adanya sikap keterbukaan, demokratis dan menghormati hak-hak asasi manusia. Tuntutan ini telah menjadi kesepakatan antar negara di dunia.



Sumber :www.google.co.id

Gambar 3.10 Globalisasi bidang politik membawa dampak positif. Masyarakat semakin aktif terlibat dalam berbagai organisasi. Terlihat dalam gambar ibu-ibu berunjuk rasa yang menolak kenaikan harga BBM.

Dengan demikian mau tidak mau setiap negara harus mempraktekkan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan globalisasi. Hal ini tentu berdampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kita juga merasakan dampak dari sistem pemerintahan yang terbuka, demokratis dan menghargai hak asasi manusia. Kalian tentu mengamati dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi perubahan yang luar biasa di negara kita. Setiap warga negara mempunyai hak untuk dilibatkan secara langsung dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta melakukan pengawasan jalannya pemerintahan.

Sebagai contoh dalam menentukan wakil rakyat di DPR dan DPRD, setiap warga negara yang telah memenuhi syarat berhak memilih langsung dalam pemilu yang demokratis. Selain itu pemerintahan juga dijalankan dengan transparan dan akuntabel. Tidak bisa lagi pejabat negara melakukan korupsi di negara kita. Masyarakat juga semakin aktif terlibat dalam berbagai organisasi yang menyuarakan demokratisasi di negara kita dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan

c. Bidang sosial budaya

Dampak positif globalisasi dalam dibidang sosial budaya, diantaranya dalam bentuk pertukaran budaya antar bangsa. Kita tentu dulu tidak membayangkan bisa bertukar pikiran dan mengenal budaya bangsa lain. Dengan globalisasi, nilai-nilai budaya asing banyak yang masuk ke Indonesia lewat televisi, majalah, surat kabar maupun internet.

Salah satunya budaya berpikir rasional yang banyak berkembang di negara-negara barat. Globalisasi memungkinkan kita untuk belajar berpikir rasional dari negara lain. Hasilnya, kehidupan yang rasional, berdasarkan akal berkembang pesat di negara kita. Dengan adanya globalisasi bentuk kehidupan mulai mengalami perubahan. Globalisasi mendorong kepada setiap orang untuk hidup lebih terbuka, kreatif serta inovatif berdasarkan akal dan pikiran.



Tugas 3.3

Carilah berita dari surat kabar, majalah, atau media masa lainnya tentang dampak globalisasi yang dirasakan masyarakat berkaitan dengan budaya bangsa Indonesia. Lakukan analisa! Berikan argumentasimu apakah globalisasi berdampak baik bagi kehidupan? Presentasikan hasilnya!

d. Bidang teknologi dan informasi

Globalisasi memberikan dampak positif terhadap perkembangan bidang teknologi dan informasi. Dengan semakin canggih teknologi dan informasi memungkinkan setiap orang mampu melewati batas-batas negara dalam waktu singkat. Kita dapat menghemat

waktu dalam berkomunikasi dengan bangsa lain. Selain itu informasi dari negara lain dengan cepat dapat kita terima.

Globalisasi di bidang teknologi dan informasi membuat seseorang yang menginginkan informasi tentang peluang kerja ke luar negeri cukup duduk di depan komputer, browsing di internet tanpa membuang waktu dan energi telah mendapatkan informasi apa yang diinginkan. Sebagai pelajar, kalian bisa mendapatkan informasi terkini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain dampak positif globalisasi seperti yang telah disampaikan diatas, Wijianto (2005:65) menyebutkan bahwa pengaruh positif globalisasi pada kehidupan manusia di dunia, dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Pendapatan per kapita di negara-negara berkembang telah meningkat lebih pesat rata-rata lima persen per tahun dibandingkan di negara-negara maju selama dua dasawarsa terakhir.
- Angka kematian bayi turun secara dratis di sebagian besar negara berkembang terhitung sejak berakhirnya Perang Dunia II.
- Pada saat yang sama, tingkat harapan hidup di China telah meningkat dua kali lipat tingkat harapan hidup di India meningkat sejak 1970.
- Ada bukti kuat bahwa perekonomian yang paling terbuka terhadap perdagangan global menikmati peningkatan pertambahan GDP yang semakin tinggi, Bank Dunia telah menghitung bahwa tiga negara teratas dengan rasio ekspor GDP tertinggi mengalami pertumbuhan ekonomi paling tinggi selama dua dasawarsa terakhir.

2. Dampak negatif globalisasi.

Patut kita sadari, globalisasi tidak selalu memberikan dampak yang positif bagi kehidupan manusia di dunia ini. Globalisasi dapat menimbulkan pengaruh yang kurang menguntungkan bagi suatu negara. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa globalisasi berpengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan manusia. Apa saja pengaruh negatif globalisasi?

Beberapa pengaruh negatif globalisasi adalah sebagai berikut:

a. Bidang politik

Perkembangan globalisasi berpengaruh terhadap kedaulatan suatu negara dalam menjalankan pe-



Sumber :jawa_pos.co.id

Gambar 3.11 Campur tangan masyarakat internasional mempengaruhi kebijakan politik dalam negeri.

merintahan serta mengatur negaranya. Gejala ini terjadi hampir di setiap negara. Hal ini, dikarenakan adanya aturan-aturan baru yang telah disepakati bersama dengan lembaga-lembaga global misalnya PBB dan WTO.

Campur tangan masyarakat internasional dan masuknya nilai-nilai budaya yang baru dari dunia luar memberikan perubahan bidang politik dalam suatu negara. Di Indonesia setelah nilai-nilai politik luar masuk secara langsung atau tidak langsung membuat lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat dan gotong royong yang telah lama kita miliki. Untuk itu kita sebagai bangsa harus mampu menyaring nilai-nilai atau pengaruh dari luar agar sesuai dengan kepribadian bangsa.

Kita bersyukur, pendiri bangsa ini mewariskan Pancasila sebagai ideologi bangsa, menjadi pedoman bagi generasi selanjutnya dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian setiap pengaruh politik luar harus disaring dengan nilai-nilai Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila seperti kekeluargaan, musyawarah mufakat harus kita pegang teguh dalam setiap aktivitas di bidang politik. Kita seringkali mencermati berkembangnya kebebasan berpolitik terkadang justru menciptakan kebebasan yang kebablasan sehingga tidak mempedulikan aturan. Selain itu kebebasan berpolitik telah meningkatkan nilai-nilai politik individual dan melupakan kolektivitas kelompok masyarakat.

b. Bidang ekonomi

Berkembangnya globalisasi membuat perekonomian suatu negara mengalami perubahan drastis. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang semula mendapat subsidi sekarang semakin berkurang, lembaga ekonomi seperti koperasi sulit untuk berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya mulai ditinggalkan.

Kompetisi produk dan harga semakin tinggi sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin selektif. Ini semua tidak lepas adanya semangat kapitalisme yang tumbuh semakin subur dan berpotensi menciptakan kesenjangan ekonomi antara negara-negara kaya dengan negara-negara berkembang. Negara-negara kuat secara ekonomi akan melakukan perluasan pasar dalam rangka mencari keuntungan sebesar-besarnya meskipun dapat merugikan negara-negara yang ekonominya masih lemah.

c. Sosial budaya

Globalisasi memberikan dampak negatif terhadap perkembangan sosial budaya masyarakat dunia. Melalui teknologi informasi dan komunikasi yang canggih masyarakat seluruh dunia dapat menikmati nilai-nilai budaya global yang dapat melunturkan nilai-nilai lokal. Lunturnya nilai lokal mengakibatkan terjadinya krisis nilai dan identitas.

Orang-orang cenderung bergaya hidup individualisme, pragmatisme, hedonisme, konsumerisme. Meninggalkan semangat gotongroyong solidaritas dan kesetiakawanan sosial, serta nilai-nilai keagamaan. Globalisasi juga memberikan pengaruh terhadap kualitas kejahatan yang semakin canggih dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi lintas negara.



Sumber :www.google.co.id

Gambar 3.12 Globalisasi memberikan dampak yang negatif terhadap perkembangan sosial budaya. Orang-orang cenderung bergaya hidup individualis dan konsumtif

D. Menyikapi Dampak Globalisasi

Kita menyadari bersama bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari bangsa di dunia, tidak dapat terhindar dari arus globalisasi. Bagaimanakah sikap kita terhadap globalisasi? Bangsa Indonesia selalu bersikap selektif terhadap pengaruh globalisasi. Bangsa Indonesia akan menerima dampak positif globalisasi dan akan menolak dampak negatifnya.

Berikut ini akan kita kaji dua sikap bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi dunia.

1. Sikap menerima dampak positif globalisasi

Dalam benak kita tentu menerima bahwa adanya globalisasi, kualitas kehidupan manusia meningkat, perkembangan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi sangat membantu dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup. Memang harus kita akui bahwa globalisasi dapat menciptakan risiko bagi masyarakat global. Hal ini terbukti, tidak sedikit orang yang menolak konsep-konsep globalisasi dan pasar bebas. Menurut pemikiran mereka globalisasi hanya menguntungkan bagi negara kaya dan melahirkan adanya penjajahan gaya baru.

Menurut Wijianto (2005:68) pemikiran mengenai baik-buruknya globalisasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Sebagian besar negara dapat menerima dan mendukung dengan baik globalisasi. Kelompok ini beranggapan bahwa globalisasi merupakan jalan keluar untuk memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan rakyat di dunia ini.
- b. Sebagian bersikap kritis dan menolak globalisasi. Kelompok ini beranggapan bahwa globalisasi dianggap sebagai bentuk penjajahan dari negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang dan miskin. Dengan adanya globalisasi semakin meningkatkan kemiskinan dan ketidakadilan bagi masyarakat.
- c. Sebagian menerima globalisasi sebagai sebuah keniscayaan akibat begitu kuatnya

pengaruh informasi dan teknologi telekomunikasi. Kelompok ini tetap kritis terhadap dampak buruk yang ditimbulkan oleh globalisasi.



Sumber : www.google.co.id

Gambar 3.13 Diantaranya kegiatan perdagangan dunia yang semakin terbuka sehingga membuka peluang ekspor produk Indonesia ke berbagai negara.

Indonesia mengakui bahwa globalisasi memberikan keuntungan bagi kemajuan bangsa Indonesia. Keuntungan yang diperoleh Indonesia dengan adanya globalisasi diantaranya sebagai berikut.

a. Terbukanya kegiatan perdagangan dunia dengan demikian pasar makin berkembang sehingga membuka peluang ekspor produk Indonesia ke berbagai negara.

- b. Dengan bertemunya nilai budaya sendiri dengan budaya bangsa lain dan diterima secara selektif akan membuka peluang berkembangnya nilai-nilai budaya sendiri.
- c. Memperkuat posisi bangsa dalam pergaulan dunia. Dengan menerima globalisasi ini berarti Indonesia tidak terkucilkan dari pergaulan dunia.

2. Sikap menolak dampak negatif globalisasi

Sikap yang dikembangkan Indonesia adalah menerima dampak positif dari globalisasi dan menolak dampak negatifnya. Dampak negatif dari globalisasi yang di hindari bangsa Indonesia adalah:

a. Ketidakadilan

Globalisasi dapat menciptakan ketidakadilan dan kemiskinan karena penerapan aturan pasar bebas yang disepakati secara global. Dengan adanya globalisasi ekonomi setiap negara diwajibkan menghapus hambatan perdagangan. Sebagai konsekuensinya banyak investasi asing yang masuk ke negara kita dengan modal yang lebih besar maka dengan mudah menutup peluang ekonomi rakyat yang modal lebih kecil. Kondisi seperti ini, tidak sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum. Sikap kita adalah menghindari dan menolak ketidakadilan ini.

b. Berkembangnya nilai budaya negatif

Bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dari sejak dulu telah memiliki nilai-nilai luhur seperti; bersikap religius, pola hidup sederhana, bermusyawarah, rasa kebersamaan dan gotong royong, bersikap sopan santun serta solidaritas sosial. Apabila bangsa kita menerima nilai-nilai budaya asing secara utuh tanpa sikap selektif maka nilai-nilai budaya

yang bersifat negatif dan tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia akan diterima oleh masyarakat.

Sebagai konsekuensinya akan berkembang pola hidup kebarat-baratan (*westernisasi*). Nilai-nilai kehidupan tersebut jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut harus kita tolak karena tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Sebenarnya nilai-nilai budaya bangsa kita dapat dipergunakan untuk menangkal dampak negatif dari globalisasi tersebut. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia harus selalu kita pertahankan meskipun arus globalisasi mengalir dengan deras dalam kehidupan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus tetap mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia.



Sumber : www.google.co.id

Gambar 3.14 Apabila bangsa kita menerima nilai-nilai budaya asing tanpa sikap selektif maka nilai-nilai budaya yang bersifat negatif akan makin berkembang.

c. Masuknya barang-barang ilegal

Globalisasi memberikan peluang masuknya barang-barang produk luar negeri ke Indonesia secara tidak resmi. Terjadilah persaingan harga yang kurang sehat. Masyarakat yang memiliki kecenderungan pola hidup konsumtif banyak terjebak dengan barang-barang yang ilegal karena dapat diperoleh dengan harga rendah. Kejadian ini, dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi penerimaan pajak negara serta kerugian masyarakat sendiri karena barang yang dibeli tidak dijamin kualitasnya.

Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus memiliki sikap yang selektif terhadap hal-hal yang bersifat negatif dan dapat menimbulkan kerugian bangsa dan negara harus kita hindarkan.



3.3

Diskusikan dengan kelompok belajarmu. Globalisasi telah memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Mungkinkah bangsa Indonesia menghindari pengaruh globalisasi dengan mempertahankan pola hidup yang telah lama berjalan dalam masyarakat Indonesia? Presentasikan hasilnya dalam diskusi kelas!

Rangkuman

1. Globalisasi merupakan peristiwa dimana kehidupan manusia telah dipengaruhi semua peristiwa ekonomi, politik, sosial budaya teknologi informasi dan transportasi yang telah mendunia.
2. Globalisasi membuat ruang lingkup interaksi manusia di seluruh dunia menjadi sempit dan saling tergantung.
3. Globalisasi banyak dipengaruhi teknologi informasi dan transportasi yang semakin canggih.
4. Globalisasi bagi bangsa Indonesia, merupakan suatu tantangan dan suatu kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia mampu bersaing dan ambil bagian dalam kancah pergaulan internasional.
5. Politik luar negeri bebas dan aktif dilaksanakan bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional Indonesia.
6. Politik luar negeri yang bebas aktif oleh bangsa Indonesia dipergunakan untuk mewujudkan tujuan negara yang bersifat internasional.
7. Globalisasi dengan segala dampaknya, baik yang positif atau negatif, tetap merambah kehidupan bangsa Indonesia maupun bangsa-bangsa lain di dunia.
8. Bangsa Indonesia selalu bersikap positif terhadap pengaruh dari nilai-nilai budaya barat yang masuk di Indonesia.
9. Bangsa Indonesia dalam menerima pengaruh budaya bersikap selektif, budaya yang masuk tetap disaring. Penyaringan budaya dengan mempergunakan Pancasila sebagai filternya.

Uji Kompetensi

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat

1. Globalisasi membuat hubungan antarmanusia di dunia semakin dekat. Dengan demikian globalisasi merupakan
 - a. sebuah gejala global village
 - b. sebuah nasionalisme
 - c. sebuah imperialisme lama
 - d. sebuah internasionalisme
2. Supaya bangsa Indonesia tidak ketinggalan dengan adanya globalisasi, sudah sewajarnya untuk
 - a. menjalin hubungan dengan negara yang terdekat
 - b. membatasi diri dari kemajuan teknologi dan informasi modern
 - c. menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia
 - d. menolak segala perubahan jaman
3. Berikut ini bidang-bidang yang tidak mengalami dampak globalisasi yaitu....
 - a. jenis ras
 - b. budaya
 - c. ekonomi
 - d. politik
4. Dengan terciptanya teknologi komunikasi dan informasi menyebabkan adanya
 - a. sikap tertutupnya hubungan antar bangsa
 - b. ketergantungan antar manusia semakin lemah
 - c. kemudahan hubungan antar manusia
 - d. kedekatan antar orang yang berkepentingan
5. Berikut ini hasil teknologi yang dapat dipergunakan untuk mempermudah dalam mengakses data-data di dunia yaitu....
 - a. kamera digital
 - b. telpon seluler
 - c. internet
 - d. televisi global
6. Dasar pertimbangan Indonesia untuk menerapkan politik bebas aktif adalah
 - a. wilayah Indonesia berupa kepulauan
 - b. hasil rapat BP-KNIP 2 September 1948
 - c. Indonesia menginginkan menjadi obyek
 - d. Indonesia menyadari sebagai bagian negara terjajah

Uji Kompetensi

7. Dalam melaksanakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia senantiasa
 - a. memperhatikan kepentingan internasional
 - b. memperhatikan kepentingan global
 - c. mempertimbangkan kepentingan regional
 - d. memperhatikan kepentingan nasional
8. Berikut ini, yang bukan termasuk upaya peningkatan politik Indonesia dalam forum internasional adalah
 - a. pemantapan dasar pemikiran kenusantaraan
 - b. melakukan invansi kenegara tetangga terdekat
 - c. memperluas ekspor ke pasaran dunia bebas
 - d. menjalin kerja sama di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan
9. Adanya tuntutan penyelenggaraan negara harus transparan merupakan salah satu dampak globalisasi dalam bidang
 - a. ekonomi
 - b. sosial
 - c. politik
 - d. hukum
10. Globalisasi juga membawa dampak negatif bagi sejumlah negara berkembang dan akan membangkitkan adanya
 - a. semangat kapitalisme
 - b. semangat kekeluargaan
 - c. sikap solidaritas yang tinggi
 - d. peningkatan subsidi terhadap kebutuhan pokok

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!

1. Apakah yang dimaksud dengan globalisasi?
2. Jelaskan faktor-faktor yang dapat mendorong berkembangnya globalisasi!
3. Jelaskan hal-hal yang melatar belakangi lahirnya politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif!
4. Sebutkan dampak-dampak negatif globalisasi!
5. Bagaimanakah sikap bangsa Indonesia terhadap globalisasi?



Prestasi Diri

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa mampu:

- Menjelaskan hakikat prestasi diri
- Menjelaskan tentang potensi diri
- Menampilkan sikap aktif dalam berbagai aktivitas untuk mewujudkan prestasi diri.

Kata Kunci: Prestasi, potensi diri, motivasi, kecerdasan

Saya merasa senang dengan kemenangan ini. Saya tak menyangka bisa menang, mengingat lawan-lawan saya juga hebat-hebat,” inilah kalimat yang diucapkan Yosua Maranatha setelah meraih medali emas di ajang Olimpiade Sains Internasional ke-2 yang berlangsung di Yogyakarta (Smart Media, Mei 2006). Lengkap sudah kebahagiaan Yoshua, karena tidak hanya meraih medali emas, ia juga di anugerahi gelar bergengsi yakni Absolute Winner. Bagaimana Yoshua bisa meraih prestasi tinggi ya?

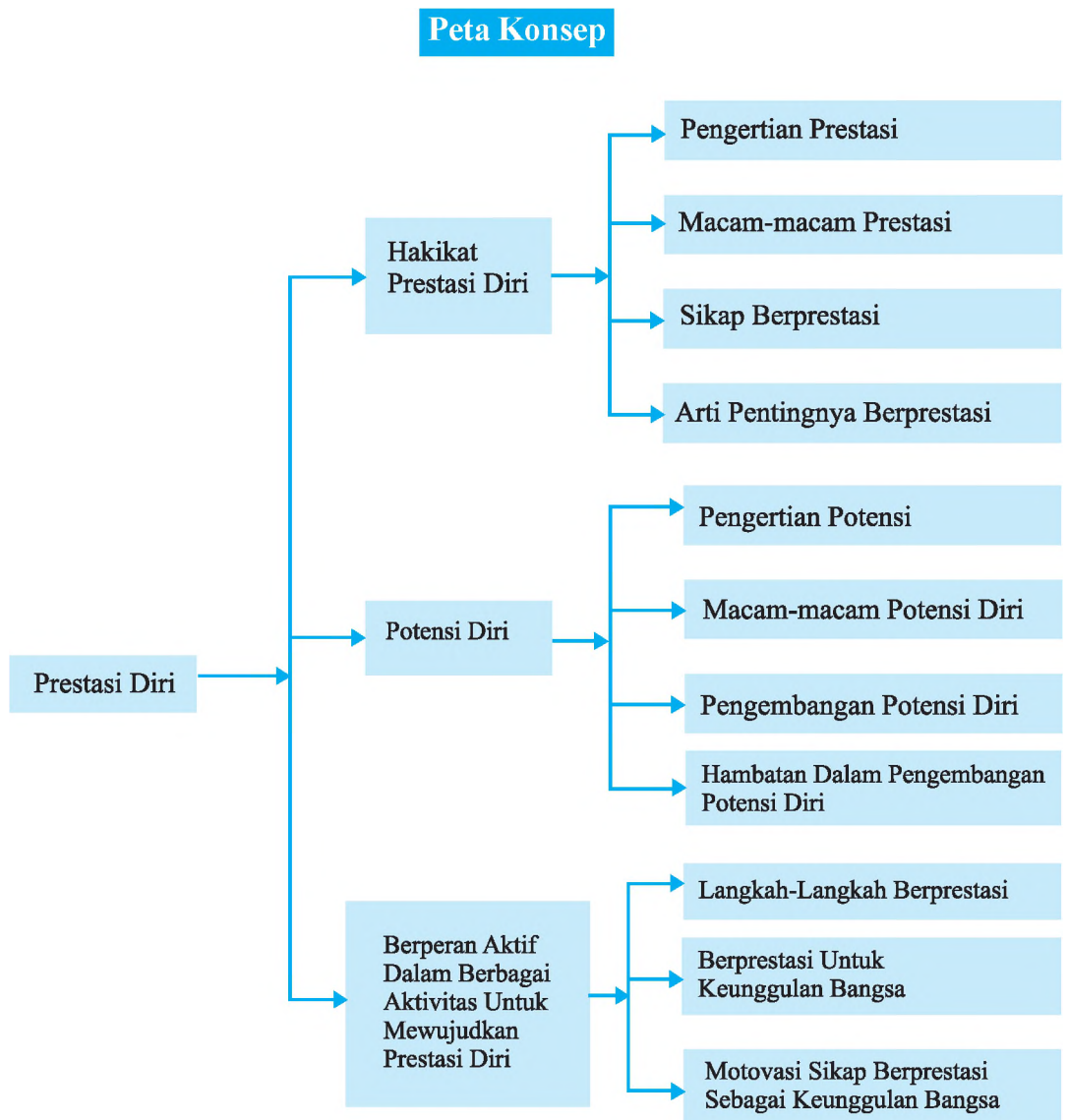
Nah, kalian tentu telah memahami, bahwa manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Manusia dikaruniai daya cipta, rasa dan karsa. Dengan mendayagunakan daya cipta, rasa dan karsa secara optimal manusia mampu menghasilkan sebuah karya atau prestasi yang tinggi.

Cipta, rasa dan karsa ini disebut potensi. Setiap orang akan meraih prestasi yang berbeda-beda sesuai potensi yang dimiliki. Nah, Yoshua telah membuktikan kalau ia mampu memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya, khususnya dalam penguasaan ilmu sains.

Prestasi yang diraih seorang warga negara tentu akan mengangkat nama negara di dunia internasional. Seperti yang telah ditunjukkan Yoshua, dengan prestasi yang tinggi maka bangsa Indonesia dapat sejajar dengan bangsa-bangsa yang lebih maju seperti Amerika, China, Jerman dan negara-negara lain. Bagaimana kita bisa meraih prestasi diri yang tinggi?

Pada bab ini, kita akan belajar bersama tentang hakikat prestasi, potensi diri dan sikap berperan aktif dalam berbagai aktivitas untuk mewujudkan prestasi diri. Setelah mempelajari ini diharapkan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan harapannya kita mampu bersaing

di era globalisasi sekarang ini. Sebelum membahas lebih jauh coba kalian pelajari peta konsep berikut ini:



A. Hakikat Prestasi Diri

1. Pengertian prestasi

Sebagai seorang pelajar, kalian tentu ingin berprestasi di berbagai bidang. Prestasi bisa dimulai dari lingkup kecil, misalnya sekolah. Pernahkah kalian meraih predikat sebagai juara kelas? Atau menjuarai lomba tingkat sekolah? Bagaimana perasaan kalian? Pastinya bangga. Teman, guru, orang tua akan menyebut diri kalian sebagai siswa berprestasi.

Menjadi siswa berprestasi memang membanggakan tidak hanya untuk diri sendiri tapi keluarga, lingkungan tempat tinggal serta sekolah kalian juga akan merasa bangga. Tapi, apakah kalian telah mengetahui yang dimaksudkan dengan prestasi? Istilah prestasi sudah biasa kita dengar, namun untuk memahaminya dengan baik kita harus mempelajari pengertian prestasi.

Nah, untuk memahaminya terlebih dahulu kita ketahui arti kata prestasi itu sendiri. Prestasi berasal dari bahasa Belanda *prestatie* yang artinya hasil usaha. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia prestasi diartikan sebagai hasil yang dicapai dari apa yang dikerjakan atau yang sudah diusahakan. Berdasarkan pengertian tersebut, prestasi merupakan hasil dari suatu kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan.

Jika demikian, apa pengertian prestasi diri? Prestasi diri dapat diartikan sebagai suatu hasil usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Prestasi dapat dicapai oleh setiap orang dengan memanfaatkan kemampuannya intelektual, emosional, spiritual dan ketahanan diri dalam berbagai aspek kehidupan.

Sudah barang tentu kalian juga menginginkan untuk menjadi orang yang berprestasi. Seseorang dianggap berprestasi jika mereka telah meraih dari apa yang telah diusahakan dalam salah satu atau lebih bidang kehidupan, baik melalui belajar, bekerja, olahraga dan lain sebagainya.. Pada umumnya orang berprestasi adalah orang yang memiliki suatu kelebihan kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain serta mampu mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien.

2. Macam-macam prestasi

Ada hal yang musti kita ingat selalu, bahwa tidak ada suatu prestasi yang diperoleh tanpa kerja keras. Sebagai contoh, banyak atlet yang menginginkan prestasi ditingkat dunia. Oleh karena itu, mereka selalu bekerja keras, berlatih untuk meningkatkan kemampuannya. Begitu pula para ilmuwan untuk mencapai kesuksesan yang besar mereka tiada hentinya melakukan penelitian-penelitian atau eksperimen-eksperimen meskipun berulang



Sumber: smart media

Gambar 4.1 Seperti halnya Yoshua yang berhasil meraih medali emas di ajang IJSO II, Prestasi bisa dimulai dari lingkup kecil, misalnya sekolah.



Sumber: dokumen penerbit

Gambar 4.2 Para ilmuwan tiada hentinya melakukan penelitian-penelitian atau percobaan.

kali harus mengalami kegagalan. Mereka selalu mencoba untuk menemukan sesuatu yang berguna bagi kelangsungan hidup dan memecahkan masalah yang dihadapi manusia. Melalui kerja keras dengan tidak putus asa akhirnya mereka berhasil mencapai prestasi yang luar biasa. Apa saja prestasi yang bisa diraih seseorang?

- Ada berbagai macam prestasi yang dicapai setiap orang, antara lain:
- a. Prestasi belajar, merupakan hasil yang dicapai oleh seorang karena usaha belajarnya.
- b. Prestasi kerja, merupakan hasil yang dicapai seorang dari usaha kerja yang dilakukannya.
- c. Prestasi seni, merupakan hasil diperoleh seorang melalui usaha olah seninya.
- d. Prestasi olah raga, merupakan suatu prestasi yang diperoleh seorang melalui kompetisi olahraga
- e. Prestasi lingkungan hidup, merupakan suatu prestasi yang diperoleh melalui usaha penyelamatan lingkungan hidup.

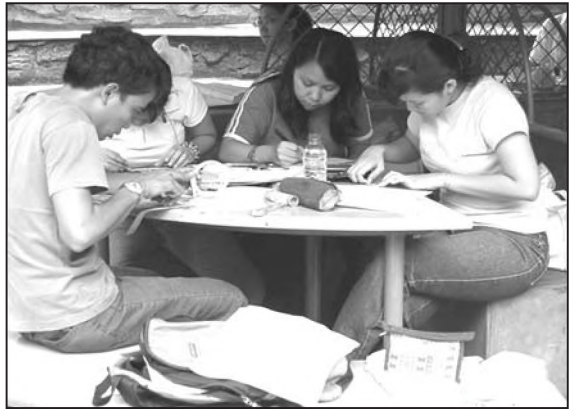
3. Sikap berprestasi

Seperti yang telah dikemukakan di depan, bahwa semua orang selalu menginginkan untuk berprestasi dalam hidupnya. Seseorang akan berprestasi jika memiliki sikap hidup yang mendukung. Apa saja sikap hidup yang dimaksud?

- Sikap hidup yang mendukung seseorang untuk meraih prestasi, diantaranya
- adalah sebagai berikut:
- a. Berorientasi pada masa depan atau cita-cita
- b. Berorientasi pada keberhasilan
- c. Keberanian mengambil resiko
- d. Rasa tanggung jawab yang besar
- e. Menerima dan menggunakan kritik sebagai umpan balik
- f. Memiliki sikap yang kreatif, inovatif dan mampu menggunakan waktu secara baik.

Kita menyadari bahwa untuk meraih prestasi kunci utamanya berada dalam diri kita sendiri. Tanpa, sikap hidup dan semangat untuk berprestasi kita tidak mungkin meraih prestasi seperti yang kita inginkan. Meski demikian musti kita ingat bahwa sebagai makhluk sosial kita selalu membutuhkan orang lain.

John Robert Power (Budiyanto,- 2005:11) menyatakan bahwa diri kita merupakan pelaku yang mampu mewujudkan sesuatu. Namun, keberhasilan setiap orang dalam memperoleh prestasi tidak hanya bergantung pada kemampuan dirinya sendiri akan tetapi juga atas bantuan orang lain. Bantuan yang dibutuhkan dapat bermacam-macam wujudnya baik material, spiritual atau dalam bentuk yang lain.



Sumber :www.google.co.id

Gambar 4.3 Keberhasilan atau prestasi yang dicapai setiap orang tidak hanya dicapai oleh dirinya sendiri, akan tetapi juga atas bantuan orang lain. Untuk itu penting adanya kerjasama.



Tugas 4.1

Wawancarilah salah satu orang yang berprestasi di lingkunganmu. Carilah tahu bagaimana kiat meraih prestasi tinggi? Susunlah laporan wawancara kemudian prentasikan hasilnya!

Namun, dalam mencapai suatu prestasi tidak semudah yang diperkirakan. Kita harus mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada. Dari mana sajakah tantangan tersebut berasal? Tantangan dapat berasal dari diri sendiri maupun lingkungan.

- Berasal dari sendiri, misalnya bakat atau potensi, kecerdasan atau intelektual, minat, motivasi, kebiasaan, emosi, kesehatan dan pengalaman diri
- Berasal dari lingkungan, misalnya keluarga, sekolah, masyarakat, sarana prasarana, fasilitas, gizi dan tempat tinggal.

Prestasi dapat diraih apabila kemampuan yang dimiliki didukung oleh lingkungan yang positif. Apabila kemampuan yang dimiliki kurang meskipun dukungan lingkungan yang baik, prestasi yang diperoleh tetap kurang maksimal. Begitu pula jika kemampuan sudah maksimal akan tetapi dukungan dari lingkungan kurang hasilnya juga



Sumber :dokumen penerbit

Gambar 4.4 Tantangan dapat berasal dari lingkungan, misalnya kelengkapan sarana prasarana .

kurang menggembirakan. Berbagai tantangan ini yang harus kita hadapi sebagai pendorong untuk mencapai prestasi yang kita inginkan.

Banyak orang yang telah berusaha sekuat tenaga namun masih saja gagal meraih prestasi tinggi. Kebanyakan mereka merasa kesulitan menghadapi tantangan baik dari dalam dirinya maupun lingkungan. Nah, untuk itu kita membutuhkan kiat atau cara menghadapi kesulitan dalam mencapai prestasi. Kiat bisa didapat dengan cara belajar dari pengalaman diri sendiri maupun orang lain. Apa saja kiatnya?

Sepuluh kiat menurut AA. Qowiy dalam menghadapi suatu kesulitan untuk mencapai prestasi tinggi:

- a. Bersikap tegar dalam menghadapi suatu kesulitan,
- b. Dapat mengambil hikmah dari suatu kesulitan,
- c. Bersikap gigih dalam mencari ilmu,
- d. Mempunyai keberanian dalam mengambil resiko,
- e. Bersikap tenang dalam segala tindakan,
- f. Memiliki kebiasaan suka bekerja keras,
- g. Mampu menikmati indahnya kesulitan,
- h. Adanya kemauan menjalin kerja sama saling menguntungkan,
- i. Selalu menjalankan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan
- j. Mengembangkan sikap tawakal

Menurut Barbara Bartlein dalam buku Budiyanto (2005:13), sepuluh kiat untuk mencapai suatu kesuksesan dan prestasi kerja dalam *Ten Measures of Success* (Sepuluh Ukuran Kesuksesan), yaitu:

- a. Mendapatkan penghasilan yang baik dari hasil pekerjaan yang baik,
- b. Mempunyai visi dan tujuan,
- c. Memperoleh cinta dan penghormatan dari orang-orang lain disekitar
- d. Memberikan sumbangsih pada masyarakat dengan suka rela,
- e. Belajar dari kegagalan dan penolakan,
- f. Menghabiskan waktunya untuk melakukan apa yang diinginkan,
- g. Mempunyai gaya hidup yang sehat secara fisik,
- h. Menjaga kehidupan spiritual,
- i. Berusaha untuk meraih kesempurnaan, dan
- j. Mempercayai bahwa kamu adalah seorang yang sukses.

4. Arti penting berprestasi

Memperoleh prestasi yang tinggi merupakan dambaan setiap orang. Namun terkadang kita menemui teman atau tetangga yang enggan untuk bekerja keras meraih prestasi tinggi. Mereka seringkali mengatakan mengapa harus berprestasi? Jadinya, mereka malas mengerjakan tugas sekolah, belajar maupun baraktivitas untuk mengembangkan potensi. Mungkin mereka belum mengetahui arti pentingnya berprestasi.



Sumber :www.google.co.id

Gambar 4.5 Prestasi merupakan wujud nyata kemampuan seseorang serta usaha yang telah dilakukan

Arti penting prestasi seseorang dalam kehidupan adalah sebagai berikut:

- Prestasi merupakan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh seseorang dari usaha yang telah dilaksanakan
- Prestasi merupakan sebuah pengalaman yang berharga dan menjadi sumber informasi untuk masa depan
- Prestasi dapat menjadikan kebanggaan bagi diri sendiri, kelompok, masyarakat bangsa dan negara
- Prestasi dapat dipergunakan untuk mengetahui tingkat kecerdasan dan ketrampilan seseorang, sebuah kelompok atau masyarakat.

Dari penjelasan diatas kalian tentu memahami prestasi yang tinggi dapat mengangkat nama baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, kita harus mampu memanfaatkan segala potensi yang ada pada diri kita masing-masing untuk mendapatkan prestasi setinggi-tingginya. Karena prestasi mempunyai arti yang sangat penting bagi diri seseorang, untuk itu sudah sepantasnya kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang berprestasi sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing.



4.1

Diskusikan dengan kelompok belajarmu. Apakah seseorang dalam mencapai prestasi perlu melakukan perencanaan? Bagaimana perencanaan tersebut disusun? Presentasikan hasilnya dalam diskusi kelas!

B. Potensi Diri

1. Pengertian potensi

Indah salah satu siswa berprestasi di sekolahnya. Selain berprestasi dalam belajar ia juga berprestasi di bidang olah raga dan seni. Maka banyak yang mengatakan kalau dia adalah siswa serba bisa. Teman-teman di sekolah maupun di lingkungan rumah ingin

mengikuti jejaknya. Ia pun membagi rahasia sukses kepada teman-temannya. Ia mengatakan kalau kunci keberhasilannya di berbagai bidang adalah karena ia selalu berusaha mengembangkan potensi. Apa yang dimaksud potensi?

Sebelum membicarakan pengertian potensi, terlebih dahulu perlu kita pahami istilah potensi. Potensi berasal dari bahasa Inggris to potent yang berarti keras, kuat. Istilah lain potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan atau daya baik sudah terwujud atau belum terwujud. Menurut kamus umum Bahasa Indonesia potensi berarti kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.



Sumber : www.google.co.id

Gambar 4.6 Candi Borobudur merupakan salah satu keajaiban dunia. Kita dapat belajar bahwa dengan daya cipta, manusia mampu menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan diri sendiri maupun orang lain.

Berdasarkan pengertian di atas potensi merupakan daya yang dimiliki oleh setiap manusia. Hanya saja, daya itu belum terwujud atau belum dimanfaatkan secara maksimal. Dalam penjelasan di atas telah disinggung bahwa manusia dianugerahi cipta, rasa, dan karsa. Ketiga hal tersebut yang disebut potensi dasar. Dengan daya cipta, manusia mampu menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan diri sendiri atau dimanfaatkan oleh orang lain. Melalui perasaan, manusia

mampu merasakan atau membedakan mana yang baik atau mana yang buruk. Sedangkan dengan karsa, manusia mempunyai kemauan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dengan memanfaatkan potensi dasar secara optimal manusia dapat mencapai prestasi yang bermanfaat bagi kehidupan.

2. Macam-macam potensi diri

Telah kita ketahui bersama bahwa setiap manusia memiliki potensi diri yang berbeda-beda. Dengan adanya potensi yang berbeda-beda, maka harus saling memahami bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan. Dengan sikap yang saling memahami kehidupan manusia menjadi lebih harmonis.

Untuk memahami potensi diri yang dimiliki setiap manusia ada baiknya kita pahami terlebih dahulu macam-macam potensi. Secara umum, Budiyanto (2006:3) menyebutkan bahwa potensi diri setiap manusia terdiri dari:

- a. Potensi fisik (*psychomotoric*) adalah organ fisik manusia yang dapat dipergunakan dan diberdayakan untuk berbagai kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup. Setiap potensi fisik yang dimiliki manusia mempunyai fungsi

sendiri-sendiri. Misalnya: kaki untuk berjalan, mulut untuk berbicara, telinga untuk mendengar dan lain sebagainya.

- b. Potensi mental intelektual (*intellectual quotient*) adalah potensi kecerdasan yang ada dalam otak manusia. Potensi ini berfungsi untuk menganalisis, merencanakan, menghitung dan lain sebagainya.
- c. Potensi emosional (*emotional quotient*), adalah potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia (otak belahan kanan). Potensi berfungsi untuk mengendalikan marah, bertanggung jawab, motivasi, kesadaran diri dan lain sebagainya.
- d. Potensi mental spiritual (*spiritual quotient*), adalah potensi kecerdasan dalam diri sendiri yang berhubungan dengan kearifan di luar jiwa sadar (bukan hanya mengetahui nilai tetapi menemukan nilai. Spiritual quotient dapat terbentuk melalui pendidikan agama formal.
- e. Potensi Ketahananmalangan (*adversity quotient*), adalah potensi kesadaran manusia yang bersumberkan pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan dan daya juang. Adversity quotient (AQ) adalah faktor spesifik sukses (prestasi) seseorang karena mampu merespon berbagai kesulitan. Melalui AQ manusia mampu mengubah suatu rintangan sebagai penghalang menjadi peluang.

Howard Gardner (1985) seorang tokoh teori multiple intelligence dalam bukunya *Frame of Mind*, menyatakan bahwa bahwa ada delapan jenis kecerdasan. Setiap orang akan memiliki semua jenis kecerdasan dan akan memprioritaskan kecerdasan sebagai pilihan pribadi.

Kedelapan kecerdasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kecerdasan logis matematis (*logical mathematica al intelligence*) kecakapan untuk menghitung, mengkuantitatif, merumuskan proposisi dan hipotesis serta memecahkan perhitungan-perhitungan matematis yang komplek. Ilmuwan, akuntan, ahli ekonomi, Insinyur, programer komputer menekankan kecerdasan ini.
- b. Kecerdasan linguistik verbal (*verbal-linguistic intelligence*), kecakapan berpikir melalui kata-kata, menggunakan bahasa untuk menyatakan dan memaknai arti yang kompleks. Para penulis atau pembicara profesional menekankan jenis kecerdasan ini.
- c. Kecerdasan interpersonal (*interpersonal intelligence*) kecerdasan untuk berkomunikasi dengan baik dan mengamati isyarat nonverbal merupakan dasar kecerdasan ini. Seorang guru atau penasehat selalu mempergunakan kecerdasan ini dengan baik.

- d. Kecerdasan ruang visual (*visual spatial intelligence*) merupakan kecakapan berpikir dalam ruang tiga dimensi. Pilot, astronot, pelukis, arsitek, perancang paling menekankan kecerdasan ini.
- e. Kecerdasan kinestetik (*kinestetik intelligence*), kecakapan melakukan gerakan dan ketrampilan kecakapan fisik seperti dalam olah raga, atletik, menari, kerajinan tangan, bedah. Olahragawan, atletik, penari, perajin, dokter bedah, mekanik cenderung menekankan kecerdasan ini
- f. Kecerdasan musik (*musical intelligence*) kecakapan untuk menghasilkan dan menghargai musik, sensitivitas terhadap melodi, ritme, nada, tangga nada, menghargai bentuk-bentuk ekspresi musik. Komponis, dirigen, musisi, kritikus musik, pembuat instrumen musik, penyanyi, pengamat musik cenderung menekankan kecerdasan ini.
- g. Kecerdasan hubungan sosial (*interpersonal intelligence*) kecakapan memahami dan merespon serta berinteraksi dengan orang lain secara baik. Guru, konselor, pekerja sosial, aktor, pemimpin masyarakat, politikus, memiliki kecerdasan sosial yang baik.
- h. Kecerdasan naturalis (*nature intelligence*) kemampuan untuk mengamati, memahami, dan menyusun pola atau unsur dalam lingkungan alami. Kecerdasan ini dapat dimiliki siapa saja mulai ahli biologi molekuler sampai ilmuwan forensik.



Sumber : www.google.co.id

Gambar 4.7 Potensi yang ada pada diri manusia harus diasah melalui kegiatan yang positif. Belajar merupakan salah satu cara melatih dan mengasah potensi.

demikian dalam mewujudkan ambisi manusia harus melihat kemampuan dirinya sendiri. Karena ambisi yang tidak didasarkan pada kemampuan dapat membahayakan dirinya sendiri.

Selain ambisi, manusia harus mempunyai kemauan untuk mengasah potensi-potensi yang dalam dirinya. Mengasah berarti melatih secara terus-menerus potensi agar dapat berdayaguna. Potensi yang ada pada diri manusia harus diasah melalui kegiatan yang

Semua potensi tersebut di atas, merupakan kemampuan yang belum terwujud secara optimal. Supaya potensi-potensi yang berada pada diri manusia dapat didayagunakan secara optimal diperlukan adanya ambisi dan kemauan untuk mengasah atau melatihnya. Ambisi dapat mendorong manusia untuk memperoleh apa yang diinginkan manusia. Manusia yang dalam hidupnya tidak memiliki ambisi dapat dikatakan sebagai manusia yang enggan untuk mengubah dirinya sendirinya. Meski demikian

positif, yaitu dengan berlatih secara teratur dan terprogram secara sistematis. Sebab, jika tidak dilatih secara terprogram dan terus-menerus potensi akan menjadi melemah dengan sendirinya.

3. Mengembangkan potensi diri

Setelah memahami bahwa setiap manusia memiliki potensi, apa yang harus dilakukan agar potensi dapat memiliki daya yang optimal? Manusia harus mau berkerja keras untuk mengembangkan potensi secara obyektif dan realistis. Bagaimana penjelasannya?

Obyektif berarti dalam mengembangkan potensi diri harus bersikap jujur, apa adanya, tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurangi apa yang telah menjadi kenyataannya. Dengan sikap obyektif ini maka dalam mengembangkan potensi dirinya akan bersikap proporsional, sesuai dengan kemampuan yang ada. Sedangkan realistis adalah bahwa dalam mengembangkan potensi diri manusia selalu belandaskan kenyataan. Apa yang kita kembangkan sesuai dengan dengan apa yang ada pada diri kita.

Pengembangan potensi diri mempunyai manfaat untuk mengembangkan nature dan nurture. Apa yang dimaksud dengan nature dan nurture? Nature adalah sikap pribadi manusia yang terbentuk dari pembawaan sejak lahir. Sedangkan yang dimaksud dengan nurture adalah sikap pribadi manusia yang terbentuk karena pengaruh lingkungan.

Untuk itu, pengembangan potensi diri berarti berusaha mengembangkan kepribadian yang berasal dari dalam dan dikembangkan melalui interaksi dengan lingkungan kehidupan. Pengembangan potensi sebagai upaya untuk memaksimalkan seluruh potensi yang positif dan meminimalkan seluruh kelemahan yang ada pada diri manusia, yang akhirnya mampu bersikap sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk pribadi maupun sosial atau sebagai makhluk Tuhan

Menurut La Rose, pengembangan diri dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu:

- Bergaul dengan yang bukan satu profesi.
- Pilihlah teman yang dapat diajak diskusi dan tidak mudah tersinggung, serta mau memberi umpan balik yang sesuai realita.
- Bersikap dan berpikir positif terhadap sesama.



Sumber :www.google.co.id

Gambar 4.8 Ketika bermain di lingkungan tempat tinggal maka kalian tengah mengembangkan sikap dalam diri kalian.

- d. Biasakan mengucapkan berterima kasih.
- e. Biasakan mengatakan hal-hal yang menghargai orang lain.
- f. Biasakan berbicara aktif (Budiyanto, 2005: 8).

Ciri-ciri orang yang berpotensi



La Rose (1991:56) menyebutkan bahwa orang yang berpotensi memiliki ciri-ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Suka belajar dan mau melihat kekurangan dirinya,
- b. Memiliki sikap yang luwes,
- c. Berani melakukan perubahan secara total untuk perbaikan,
- d. Tidak mau menyalahkan orang lain maupun keadaan.
- e. Memiliki sikap yang tulus bukan kelicikan
- f. Memiliki rasa tanggung jawab,
- h. Menerima kririk saran dari luar,
- j. Berjiwa optimis tidak mudah putus asa.

Kalian tentu memahami menjadi orang yang berprestasi merupakan dambaan setiap orang. Namun terkadang setelah prestasi diraih justru berdampak kurang baik misalnya saja menjadi sombong, kurang menghargai orang lain bahkan merasa dirinya paling hebat. Untuk itu dalam upaya mengembangkan potensi diri untuk meraih prestasi, kita harus selalu mengembangkan sikap sebagai berikut:

a. Berdoa kepada Tuhan

Sebagai makhluk yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan sebelum melakukan suatu aktifitas terlebih dahulu harus berdoa kepada Tuhan. Dengan berdoa diharapkan apa yang kita lakukan akan berhasil dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.

b. Mengenal potensi diri

Sebagai makhluk individu dalam pengembangan potensi diri perlu mengetahui akan kekurangan dan kelebihan pada diri kita. Dengan mengetahui akan diri kita sendiri apa yang akan kita lakukan dapat bermanfaat dalam hidup.

c. Belajar secara teratur

Dengan belajar secara teratur dapat memberikan dorongan untuk meraih cita-cita hidup. Sebagai seorang pelajar untuk mendapat prestasi yang tinggi harus belajar secara teratur. Kebiasaan gemar membaca akan menambah wawasan yang luas. Selain itu, kita akan memperoleh berbagai pengetahuan yang bermafaat dalam kehidupannya.

d. Tidak putus asa

Dalam mengembangkan potensi diri, kita harus menyadari bahwa di sekeliling kita banyak hambatannya. Supaya cita-cita kita berhasil harus menyadari akan kelihan ataupun kekurangan yang berada diri kita masing-masing.

e. Menetapkan cita-cita

Seorang pelajar akan berhasil dalam bejarnya jika telah menetapkan cita-citanya. Cita-cita yang ditetapkan harus diusahakan dapat terwujud dengan baik.

4. Hambatan dalam pengembangan potensi diri

Untuk mencapai suatu prestasi tidak semudah apa yang kita bayangkan. Setiap usaha yang kita lakukan selalu ada hambatan. Kita harus bisa meminimalkan hambatan yang sering menjadikan kegagalan agar potensi diri dapat berkembang sesuai yang diharapkan.

Hambatan-hambatan yang sering muncul dalam pengembangan potensi diri adalah sebagai berikut:

a. Hambatan yang berasal dari diri sendiri.

Hambatan yang lahir dari diri sendiri seseorang meliputi tidak ada tujuan jelas, adanya prasangka buruk, tidak mau mengenal diri sendiri, tidak memiliki sikap sabar, ada perasaan takut gagal, kurang motivasi diri, bersikap tertutup dan sebagainya.

b. Hambatan dari luar diri sendiri

Hambatan yang datangnya dari luar diri sendiri meliputi lingkungan keluarga, lingkungan kerja, lingkungan bermain, budaya masyarakat, sistem pendidikan, kualitas makanan yang dikonsumsi (gizi), dan sebagainya.



4.2

Diskusikan dengan kelompok belajarmu. Dalam pengembangan potensi diri setiap manusia selalu dipengaruhi faktor diri sendiri dan juga lingkungan terutama pergaulan teman sebaya. Namun, terkadang tidak sedikit remaja yang bergaul dengan orang yang bukan sebayanya. Adakah perbedaan pergaulan dengan teman sebaya dan bukan dengan teman sebaya? Bagaimanakah pengaruh terhadap pengembangan potensi diri? Presentasikan hasil diskusi di depan kelas!

C. Berperan Aktif dalam Berbagai Aktivitas untuk Mewujudkan Prestasi Diri.

1. Langkah-langkah berprestasi

Setiap kali memperingati hari besar nasional, seperti peringatan kemerdekaan maupun hari besar lainnya, sering kita dengar adanya penghargaan terhadap siswa berprestasi, guru berprestasi, dokter berprestasi, dan lain sebagainya. Tentunya kita ingin meraih prestasi serupa. Untuk itu, kita berpikir langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan agar menjadi orang berprestasi?

Prestasi yang dicapai setiap orang bukanlah suatu hal yang secara kebetulan. Akan tetapi, dilakukan dengan melalui perencanaan kegiatan secara sistematis dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh serta selalu melakukan evaluasi ketika pekerjaan sedang dan telah dilaksanakan.

Pada prinsipnya orang yang memiliki prestasi yang tinggi adalah orang-orang yang memiliki semangat kerja keras, disiplin, kreatif inovatif dan tidak mudah putus asa. Berbekal prinsip-prinsip tersebut prestasi yang diimpikan akan makin mudah terwujud.

Prestasi dapat diraih di berbagai bidang kehidupan. Misalnya prestasi di bidang politik yaitu berusaha menumbuhkan sikap berpartisipasi dalam rangka memantapkan kesadaran politik masyarakat yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kasadaran berpolitik dapat kita rintis lewat organisasi OSIS, kepemudaan, karang taruna yang ada di lingkungan masyarakat.

Dalam bidang kesenian untuk mencapai prestasi yang tinggi diperlukan juga sikap tekun dan rajin berlatih, dan apabila telah memiliki kemampuan yang optimal harus berani tampil dalam berbagai perlombaan. Dengan mengikuti perlombaan atau kegiatan yang lain akan diperoleh pengalaman yang dapat dipergunakan untuk mengetahui seberapa kemampuan dan potensi yang dimiliki.



Sumber : www.google.co.id

Gambar 4.9 Untuk mencapai prestasi dalam bidang ekonomi dibutuhkan sikap yang ulet dan kemandirian dalam usaha. Prestasi dalam bidang ekonomi dapat dirintis sejak dini dengan aktif di koperasi sekolah

Sedangkan dalam bidang ekonomi, untuk mencapai prestasi yang diinginkan dibutuhkan sikap yang ulet dan kemandirian dalam usaha, serta adanya motivasi yang kuat dalam mengembangkan usaha yang dijalankan. Dalam dunia wiraswasta untuk mendapat suatu prestasi diperlukan juga adanya kemampuan dalam menjalin hubungan kerjasama dengan mitra kerja dengan memegang teguh suatu kepercayaan. Untuk itu, sebagai wiraswasta yang menginginkan prestasi yang tinggi harus memiliki sikap ketahanan diri yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan dalam dunia usaha. Prestasi dalam bidang ekonomi dapat dirintis sejak dini dengan aktif di koperasi sekolah maupun membantu usaha orang tua.

2. Berprestasi untuk keunggulan bangsa

Apa yang harus dilakukan sebagai putra bangsa yang dalam memasuki era globalisasi? Tentu kita harus ikut bersaing secara positif. Bangsa Indonesia tidak boleh sekedar sebagai penikmat atau penonton globalisasi, namun harus berusaha meraih keunggulan. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dengan sumber daya alam yang melimpah harus mampu bersaing sejajar dengan bangsa-bangsa di dunia ini. Bangsa Indonesia, pernah mencapai suatu prestasi yang tinggi di tingkat internasional yang wajib kita pertahankan dan ditingkatkan di kemudian hari.

Prestasi yang pernah diraih bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut:

- a) Para pendiri negara berhasil memproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
- b) Disektor pertanian bangsa Indonesia pernah mencapai swasembada pangan.
- c) Di cabang olah raga, putra-putra bangsa meraih berbagai kejuaran tingkat Internasional.
- d) Para pelajar Indonesia meraih gelar juara dalam Olimpiade Sains Tingkat Internasional.
- e) Di bidang politik bangsa Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika I di Bandung.
- f) Di bidang teknologi Indonesia berhasil membuat pesawat terbang.
- g) Putra-putra bangsa Indonesia melakukan pelayaran keliling dunia dengan kapal layar “Phinisi Nusantara”.
- h) Di bidang pertahanan kemanan dunia Indonesia menjadi pasukan keamanan internasional di bawah PBB.



Sumber :www.google.co.id

Gambar 4.10 Para pelajar Indonesia meraih gelar juara dalam Olimpiade Sains Tingkat Internasional.

Sudah semestinya sebagai bangsa yang mandiri kita berupaya supaya tidak tertinggal dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa Indonesia harus berbenah diri, berani bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Dengan SDM berkualitas bangsa Indonesia mampu bersaing dengan bangsa-bangsa di dunia.



Sumber :www.google.co.id

Gambar 4.11 Pendidikan yang bermutu tinggi akan menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

Untuk menciptakan SDM berkualitas kita membutuhkan pembangunan sektor pendidikan. Sebab, pendidikan yang bermutu tinggi akan menghasilkan lulusan-lulusan berkualitas dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. SDM yang berkualitas ini sangat dibutuhkan untuk mengolah sumber daya alam yang tersedia di bumi Indonesia untuk mendapatkan hasil produksi yang berkualitas dan mempunyai daya saing di tingkat internasional.

Kalian tentu memahami suatu bangsa akan dihargai, dihormati, dan disegani oleh bangsa-bangsa lain apabila bangsa memiliki suatu keunggulan. Keunggulan yang dimiliki suatu bangsa dapat menjadikan suatu bangsa itu sederajat dengan bangsa-bangsa yang telah maju, serta menjadikan suatu bangsa yang mandiri tidak lagi menggantungkan diri terhadap bangsa-bangsa lain.

3. Memotivasi sikap berprestasi sebagai keunggulan bangsa

Dalam penjelasan di awal telah disinggung bahwa prestasi merupakan wujud nyata dari usaha yang telah dicapai oleh seseorang. Agar putra bangsa terus berkarya dan memperoleh prestasi yang tinggi diperlukan motivasi.



Sumber :www.google.co.id

Gambar 4.12 Taufik Hidayat, pebulutangkis meraih medali emas Olimpiade 2004 prestasi yang tinggi,- dapat terus diraih salah satunya dengan memberikan motivasi dalam bentuk penghargaan.

Motivasi merupakan dorongan yang terarah kepada pemenuhan kebutuhan psikis atau kerohanian. Motivasi dalam suatu kegiatan, dapat berpengaruh terhadap kekuatan dan semangat untuk meraih tujuan. Dengan memberikan motivasi yang besar dan kuat akan mendorong putra bangsa Indonesia berani berkompetisi dalam mencapai suatu prestasi.

Selain itu, ada hal penting yang mesti kita ingat yakni persaingan dalam mencapai suatu prestasi hendaknya dilaksanakan secara terbuka dan proporsional. Sikap terbuka dan proporsional akan memberikan persaingan dalam berkompetisi secara sehat dan dapat menumbuhkan sikap saling mendukung antara satu dengan lainnya. Agar tumbuh sikap kompetisi yang sehat maka diperlukan landasan yang bersifat sebagai berikut;

- a) Sikap yang menganggap orang lain bukan lawan tetapi sebagai kawan dalam mencapai suatu prestasi
- b) Sikap yang berjiwa besar yaitu mau mengakui keunggulan atau kelebihan orang lain
- c) Sikap yang tidak sombong atas keberhasilannya,
- d) Memiliki sikap simpatik dan mengharga hasil karya orang lain,
- e) Sikap jujur dalam berkompetisi sehingga tidak menghalalkan segala cara dalam mendapatkan prestasi.
- f) Sikap yang mengutamakan persahabatan bukan permusuhan.

Setiap orang yang berhasil mencapai prestasi akan lebih baik jika diberikan suatu penghargaan. Melalui penghargaan akan memotivasi seseorang untuk terus melakukan kegiatan yang lebih keras dengan harapan dapat memperoleh prestasi yang lebih tinggi lagi.

Penghargaan terhadap seseorang yang berhasil mengharumkan bangsa dan negara dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, mulai dari piagam penghargaan, piala, medali dan juga berupa uang. Penghargaan juga bisa dalam bentuk pengakuan dari pemerintah maupun masyarakat terhadap prestasi seseorang. Disinilah peran pemerintah sangat dibutuhkan yakni dengan terus memberikan motivasi melalui pemberian penghargaan atau tanda jasa.



Tugas 4.2

Bentuklah kelompok yang beranggotakan 2-3 orang. Berkunjunglah ketempat dua atau tiga orang berprestasi yang berada dilingkungan kalian. Kemudian lakukan wawancara, untuk mendapatkan informasi tentang usaha dan kiat yang dilakukan untuk mencapai prestasi tersebut serta cara mempertahankannya. Buatlah laporan hasil wawancara kemudian presentasikan di depan kelas!

Rangkuman

1. Prestasi merupakan hasil yang diperoleh dari usaha seseorang dalam hidupnya. Orang yang berprestasi adalah orang yang dianggap sukses dalam bidang tertentu karena ia memiliki suatu kelebihan yang tidak dimiliki orang lain.
2. Prestasi yang dicapai setiap orang meliputi prestasi belajar, karya, seni, olah raga, dan lingkungan hidup.
3. Untuk mendapatkan prestasi yang tinggi diperlukan adanya sikap optimisme, percaya diri, selalu tertantang untuk menyelesaikan semua hambatan yang ada dalam diri sendiri ataupun dari luar diri sendiri.
4. Prestasi diri merupakan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh setiap orang. Prestasi diri sebagai sumber informasi, sebagai kebanggaan diri dan untuk mengetahui kecerdasan seseorang.
5. Potensi adalah kemampuan yang kemungkinan dapat dikembangkan.
6. Potensi yang ada pada setiap orang meliputi potensi fisik, mental intelektual, sosial, mental spiritual dan ketahanan malangan
7. Dalam era globalisasi bangsa Indonesia harus memiliki kesiapan dan kemampuan untuk bersaing. Pembangunan sektor pendidikan menjadi prioritas utama dalam peningkatan potensi diri.
8. Pengembangan potensi diri pada umumnya merupakan pengembangan nature dan nurture.
9. Hambatan dalam pengembangan potensi diri dapat berasal dari dalam maupun dari luar diri sendiri.
10. Untuk memperoleh prestasi yang tinggi setiap orang harus mendayagunakan seluruh potensi yang ada pada diri sendiri secara optimal.
11. Prestasi yang tinggi dapat diraih dengan jalan memberikan motivasi dalam bentuk pemberian penghargaan yang berupa piagam, piala, lencana, uang dan lain sebagainya.

Uji Kompetensi

A. Pilihlah jawaban yang paling benar!

1. Prestasi merupakan wujud nyata optimalisasi dari
 - a. pengembangan tujuan
 - b. pengembangan potensi diri
 - c. harapan hidup
 - d. kemampuan emosional
2. Faktor yang paling utama untuk mendapatkan suatu prestasi adalah
 - a. dorongan dari diri sendiri
 - b. bantuan teman sejawat
 - c. dorongan orang tua
 - d. pengarahan guru
3. Berikut ini yang bukan termasuk kiat-kiat yang dikemukakan AA. Qowiy untuk menghadapi berbagai permasalahan adalah
 - a. tegar dalam menghadapi permasalahan
 - b. menghabiskan waktu untuk mencapai tujuan
 - c. berani mengambil resiko
 - d. tenang dalam bertindak
4. Seseorang yang berprestasi dalam akademis dapat diwujudkan melalui
 - a. memilih ketua kelas
 - b. membantu karang taruna
 - c. aktif dalam organesasi pemuda
 - d. belajar dengan tekun
5. Berikut ini salah satu cara berprestasi dalam ekonomi adalah
 - a. menghadiri rapat tahunan koperasi
 - b. membantu para dermawan
 - c. mengikuti lomba pasaran bebas
 - d. mampu mengembangkan usaha yang dijalankan
6. Potensi yang ada dan paling utama pada diri manusia adalah
 - a. cita, rasa, dan karsa
 - b. cipta, akan , pikiran
 - c. rasa, perasaan, dan karsa
 - d. perasaan , karsa, kehendak

Uji Kompetensi

7. Sikap tekun, teliti, dan daya tahan terhadap tekanan, merupakan unsur-unsur potensi yang termasuk dalam klasifikasi
 - a. kepribadian
 - b. emosional
 - c. sikap kerja
 - d. kemampuan dasar
8. Potensi seseorang akan berkembang dengan baik apabila didukung oleh beberapa faktor berikut ini, kecuali
 - a. minat
 - b. motivasi
 - c. intelektual
 - d. perasaan tidak yakin
9. Dengan spiritual quotient (SQ) manusia menjadi makhluk yang utuh secara
 - a. intelektual, emosional, dan spiritual
 - b. intelektual, fisik, rohani
 - c. fisik, mental, dan emosi
 - d. bakat, intelektual fisik
10. Menurut Howard Gardner, para penulis atau pembicara profesional lebih menekankan jenis kecerdasan
 - a. logika
 - b. linguistik
 - c. interpersonal
 - d. spasial

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benar!

1. Apakah yang dimaksud dengan prestasi diri?
2. Jelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terhadap prestasi seseorang!
3. Jelaskan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengubah potensi diri agar dapat didayagunakan!
4. Mengapa setiap pribadi harus mengenal potensi diri masing-masing?
5. Agar kita dapat berkompetisi yang sehat sikap apa saja yang harus kita laksanakan?

Soal-Soal Latihan

A. Pilihlah jawaban yang paling benar!

1. Pengertian negara yang paling tepat di bawah ini adalah
 - a. Organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat dengan cita-cita berbeda-beda
 - b. Organisasi tertinggi dari segala cita-cita yang ada dalam kelompok masyarakat yang berada dalam suatu wilayah tertentu
 - c. Organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat
 - d. Organisasi tertinggi di antara beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk berbeda-beda, hidup dalam satu wilayah, dengan pemerintahannya tanpa memiliki kedaulatan.
2. Dalam konvensi Montevideo (1933), disebutkan bahwa unsur-unsur negara meliputi ...
 - a. Rakyat, wilayah, dan pemerintah
 - b. Rakyat, tujuan, dan pemerintah
 - c. Rakyat., pemerintah, kedaulatan
 - d. Rakyat, kedaulatan, dan tujuan
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia secara de facto terbentuk sejak tanggal
 - a. 17 Agustus 1945
 - b. 18 Agustus 1945
 - c. 31 Desember 1948
 - d. 5 Juli 1959
4. Tujuan negara Indonesia terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alenia
 - a. I
 - b. II
 - c. III
 - d. IV
5. Berikut ini yang bukan termasuk fungsi negara menurut Charles E. Merriam adalah fungsi
 - a. Keamanan ekstern
 - b. Ketertiban intern
 - c. Keadilan yang bersifat kelompok
 - d. Kesejahteraan

6. Membela negara merupakan hak dan kewajiban bagi
 - a. Setiap penduduk Indonesia yang dijamin UUD 1945
 - b. Setiap warga negara Indonesia yang dijamin UUD 1945
 - c. Setiap rakyat Indonesia yang dilindungi UUD 1945
 - d. Setiap bangsa Indonesia yang dilindungi UUD 1945
7. Secara konstitusional pembelaan negara tercantum dalam UUD 1945 pasal
 - a. 27 ayat (2)
 - b. 27 ayat (3)
 - c. 30 ayat (1)
 - d. 30 ayat (2)
8. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan hal ini dikarenakan ...
 - a. Penjajahan melindungi hak segala bangsa
 - b. Penjajahan selalu memberikan kompensasi terhadap yang terjajah
 - c. Penjajah lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat kecil
 - d. Penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan
9. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa
 - a. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
 - b. Tiap-tiap rakyat berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
 - c. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara
 - d. Tiap-tiap bangsa berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara
10. Berikut ini yang tidak termasuk sifat-sifat perlawanan semesta adalah....
 - a. Kerakyatan
 - b. Kesemestaan
 - c. Kekuasaan
 - d. Kewilayahan
11. Ancaman terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di awal kemerdekaan yang datang dari luar adalah
 - a. Pemberontakan PKI tahun 1948
 - b. Konferensi Meja Bundar di Den Hag
 - c. Agresi Militer I
 - d. Persetujuan Rum Royen
12. Usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia dilaksanakan melalui sistem
 - a. Pertahanan dan keamanan rakyat serentak
 - b. Pertahanan dan keamanan rakyat mutlak
 - c. Pertahanan dan keamanan rakyat biasa
 - d. Pertahanan dan keamanan rakyat semesta

13. Komponen atau unsur utama dalam pertahanan dan keamanan rakyat semesta adalah....
- TNI dan POLRI
 - Seluruh rakyat
 - Pemerintah
 - Rakyat Terlatih
14. Ikut serta memelihara ketertiban masyarakat serta kelancaran kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan perwujudan partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga keamanan negara dalam lingkungan
- Keluarga
 - Sekolah
 - Masyarakat
 - Negara
15. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan pengertian dari
- Otonomi daerah
 - Daerah otonom
 - Dekonsentrasi
 - Sentralisasi
16. Asas pemerintahan yang menjelaskan bahwa pemerintah menyerahkan wewenang kepada daerah, disebut
- Sentralisasi
 - Dekosentrasi
 - Desentralisasi
 - Perbantuan
17. Pelaksanaan otonomi daerah saat ini diatur melalui Undang-Undang nomor
- 22 tahun 1999
 - 25 tahun 1999
 - 32 tahun 2004
 - 33 tahun 2004
18. Berikut ini yang bukan termasuk syarat teknis, untuk membentuk daerah otonomi adalah
- Kemampuan ekonomi
 - Potensi daerah
 - Sosial budaya
 - Sarana dan prasarana

19. Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004, pelaksanaan otonomi daerah menggunakan prinsip
- Luas, nyata, dan bertanggung jawab
 - Luas dan kewenangan terbatas
 - Nyata dan berasaskan sentralisasi
 - Luas, nyata dan mengutamakan bidang ekonomi
20. Pemerintah Daerah adalah
- Kepala Daerah beserta Anggota DPRD
 - Kepala Daerah bersama-sama Ketua DPRD
 - Kepala Daerah bersama-sama badan eksekutif lainnya
 - Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif
21. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka kemajuan bergantung pada
- Bantuan dari pemerintah
 - Pendapatan asli daerah
 - Besar kecilnya dana alukasi umum
 - Partisipasi masyarakat
22. Berikut ini contoh partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan publik yaitu....
- Bila kesekolah selalu berseragam
 - Menggunakan hak pilih karena dipaksa
 - Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu
 - Memakai helm jika ada polisi
23. Konsekuensi jika masyarakat tidak aktif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik ialah
- Pelaksanakan kebijakan publik akan tetap sesuai dengan keinginan masyarakat
 - Kebijakan publik dapat terlaksana dengan lancar dan baik
 - Perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik banyak yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat
 - Kebijakan publik yang dirumuskan sesuai dengan keinginan masyarakat
24. Partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik dapat diwujudkan melalui sikap....
- Mematuhi sebagian kebijakan
 - Tidak mematuhi karena merugikan
 - Mematuhi karena menguntungkan
 - Mematuhi atau menolak kebijakan publik

25. Jika kebijakan publik tidak menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, maka dalam pelaksanaannya akan ...
- Tetap mematuhi semua kebijakan publik
 - Masyarakat ramai-ramai melakukan unjuk rasa
 - Kurang mendapat tanggapan dari masyarakat
 - Tidak ditanggapi, karena tidak ada sangkut pautnya.
26. Globalisasi merupakan suatu proses mengecilnya dunia dan menguatnya kesadaran akan dunia sebagai satu kesatuan. Pernyataan ini dikemukakan oleh
- R. Robertson
 - Robert Cox
 - Bank Dunia
 - A.G. McGrew
27. Pada saat ini, orang dengan mudah berkomunikasi dengan orang lain, meski jaraknya begitu jauh. Hal ini berkat kemajuan di bidang
- Transportasi
 - Informasi
 - Politik
 - Komunikasi
28. Lahirnya globalisasi membuat batas-batas antarnegara menjadi semakin kabur. Hal ini berarti, globalisasi telah menciptakan
- Internasionalisasi
 - Imperialisme
 - Global village
 - Nasionalisme
29. Bagi Indonesia globalisasi dipandang sebagai
- Hal-hal yang biasa saja tidak perlu ditakuti karena globalisasi akan berjalan sesuai dengan jamannya
 - Tantangan untuk membuktikan pada dunia internasional bahwa Indonesia mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain
 - Perlu ditanggapi tetapi tidak perlu memaksakan masyarakat, sebab globalisasi merupakan tanggung jawab pemerintah
 - Cukup dipergunakan sebagai pertimbangan, karena Indonesia telah merdeka selama enam puluh tahun lebih
30. Berikut ini yang menjadi dasar pertimbangan penerapan politik bebas aktif adalah
- Tidak lagi menjadi subyek
 - Keinginan merdeka secara menyeluruh
 - Wilayah Indonesia sangat strategis
 - Hasil rapat BP-KNIP 1948

31. Pedoman perjuangan politik luar negeri bebas aktif adalah
- Dasa Sila Bandung
 - Piagam PBB
 - Piagam Hak-Hak Asasi Manusia
 - Piagam Atlantik Charter
32. Perhatikan pernyataan berikut ini!
- Negara Indonesia menjalankan politik damai
 - Indonesia negara yang sedang berkembang
 - Negara menjalin persahabatan antar bangsa dengan sikap saling menghormati
 - Negara Indonesia menerapkan politik yang melindungi bangsa sendiri
 - Negara Indonesia memperkuat sendi-sendi hukum internasional
 - Negara Indonesia mengutamakan sendi-sendi hukum nasional saja
- Dari pernyataan di atas yang merupakan prinsip-prinsip pokok dasar untuk melaksanakan politik luar negeri adalah
- 1, 3, 5
 - 2, 4, 6
 - 1, 3, 5
 - 2, 4, 6
33. Berikut ini yang bukan perwujudan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif adalah
- Penyelenggaraan KAA 1955
 - Aktif dalam GNB
 - Perintas ASEAN
 - Menolak Visi PBB
34. Perhatikan pernyataan berikut ini:
- semakin luasnya ekspor produk Indonesia
 - Indonesia lebih mengutamakan produk dalam negeri
 - Negara Indonesia,dapat mengikuti perdagangan global
 - Indonesia selalu menolak semua aspek yang masuk di Indonesia
 - Indonesia dapat telah terpencil dengan bangsa lain
 - Di Indonesia tumbuh dan berkembang berbagai budaya baru
- Pernyataan di atas yang merupakan dampak positif adanya globalisasi adalah....
- 1,3, 5
 - 1,3,5
 - 2,4,6
 - 2,4, 6

35. Berikut ini yang tidak termasuk dampak negatif globalisasi adalah....
- Tumbuhnya ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat
 - Tumbuhnya budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa
 - Tumbuhnya semangat berkompetisi yang sehat
 - Barang-barang ilegal semakin mudah masuk
36. Dengan semakin banyaknya budaya asing yang masuk di Indonesia, maka sikap kita adalah
- Menolak karena tidak sesuai dengan keinginan
 - Menerima secara keseluruhan
 - Menerima yang sesuai dengan keinginan
 - Menerima dengan menyeleksi yang sesuai dengan kepribadian bangsa
37. Orang yang tidak setuju terhadap globalisasi menganggap bahwa globalisasi merupakan
- Sarana untuk mengeskplotasi bangsa lain
 - Rekayasa dari bangsa yang maju
 - Keinginan negara maju untuk menekan negara berkembang
 - Bentuk baru penjajahan yang dilakukan bangsa lain
38. Hasil usaha yang diperoleh dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang disebut
- Prestasi diri
 - Harga diri
 - Motivasi diri
 - Potensi diri
39. Berikut ini yang bukan termasuk prestasi diri seseorang adalah
- Prestasi belajar
 - Orientasi diri
 - Prestasi kerja
 - Prestasi olah raga
40. Ciri orang yang memiliki prestasi diri adalah
- Berani mengambil risiko dan tidak putus asa
 - Selalu berdiskusi tentang permasalahan yang dihadapi
 - Tidak putus asa tetapi kurang semangat juangnya
 - Menjalani kerja sama dengan pihak lain tetapi kurang optimis kerjanya
41. Supaya kita memiliki prestasi yang baik, maka sejak dini harus
- Membiasakan kerja dengan petunjuk orang lain
 - Membuat rencana kerja secara sistematis dan proporsional
 - Melatih diri secara berskala untuk berlomba
 - Mengikuti segala kegiatan perlombaan

42. Prestasi diri mempunyai arti penting bagi setiap orang dalam hidupnya, di antaranya dapat dipergunakan untuk
- Mengetahui tingkat kepandaian seseorang
 - Memberi penghargaan seseorang
 - Meperebutkan penghargaan dalam lomba
 - Berkompetisi secara sehat
43. Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, manusia telah dilengkapi dengan berbagai potensi. Potensi yang ada pada manusia berupa
- Cipta, karsa, dan akal
 - Karsa, jiwa, dan kehendak
 - Cipta, rasa, dan karsa
 - Naluri, rasa, dan hati
44. Kata potensi sering diartikan sebagai berikut ini, kecuali
- Kemampuan
 - Daya yang belum terwujud
 - Kekuatan
 - Dorongan
45. Potensi yang dipergunakan untuk mengendalikan amarah, tanggung jawab, dan motivasi dinamakan
- Intellectual Quotient
 - Emotional Quotient
 - Spititual Quotient
 - Adversity Quotient
46. Berikut ini merupakan perilaku yang dapat menghambat pengembangan potensi diri yang timbul dari diri sendiri yaitu
- Berprasangka buruk
 - Lingkungan keluarga
 - Tingkat pendidikan
 - Lingkungan kerja.
47. Seorang ahli bernama Gardner mengemukakan bahwa seorang komponis dalam berkarya lebih menekankan kecerdasan
- Logis matematis
 - Interpersonal
 - Spasial
 - Musik

48. Untuk meraih keunggulan dan sederajat dengan bangsa-bangsa yang maju, bangsa Indonesia berupaya
- Meningkatkan sumber daya manusia
 - Meningkatkan impor dari negara maju
 - Memperbanyak pinjaman dari negara lain
 - Memperkecil pinjaman modal asing
49. Dalam berkompetisi untuk memperoleh suatu prestasi diri diperlukan adanya sikap yang positif yaitu
- Acuh tak acuh pada orang lain
 - Mengunggulkan dirinya sendiri
 - Optimisme karena akan berhasil dengan sendirinya
 - Berjiwa besar dan mengakui keunggulan orang lain
50. Contoh prestasi yang pernah dicapai bangsa Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali
- Mampu meraih swasembada beras
 - Sebagai tempat penyelenggaraan KAA
 - Pelajar Indonesia mampu meraih gelar juara dalam olimpiade sains internasional
 - Indonesia memperoleh dana pinjaman dari Bank Dunia sebagai modal pembangunan

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini singkat dan benar!

- Apakah yang dimaksud dengan pertahanan keamanan rakyat semesta?
- Sebutkan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem pertahanan kemananan rakyat semesta!
- Jelaskan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan otonomi daerah!
- Bagaimana sikap bangsa Indonesia dengan adanya globalisasi di bidang sosial budaya?
- Tunjukkan sikap-sikap positif dalam berkompetisi untuk meraih suatu prestasi diri!

Glosarium

Akuntabel :

Dapat dipertanggungjawabkan

Ambisi :

Keinginan (hasrat yang besar) untuk mencapai sesuatu

Apatis :

Acuh tak acuh, masa bodoh

Daerah otonom :

Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dekonsentrasi :

Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah (pusat) kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau instansi vertikal di wilayah tertentu.

Emosional Quotient :

Kecerdasan yang ada pada otak manusia (terutama otak sebelah kiri)

Fungsi :

Pelaksanaan tujuan yang akan dicapai

Global :

Mencakup seluruh dunia

Globalisasi :

Proses dimana hubungan sosial dan saling ketergantungan antar negara dan antar manusia di dunia ini semakin besar.

Gross Domestic Product :

Nilai total barang atau jasa yang dihasilkan oleh sebuah negara dalam waktu satu tahun.

Hak angket :

Hak untuk penyelidikan yang menyangkut kepentingan orang banyak

Hedonisme :

Paham yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup.

Individualisme :

Paham yang bersifat mementingkan kebutuhan sendiri sebelum kebutuhan orang lain.

Inovasi :

Pembaharuan

Intellectual Quotient :

Kecerdasan yang ada pada otak manusia (terutama otak sebelah kanan).

Interpelasi :

Hak meminta penjelasan atau keterangan resmi kepada pemerintah.

Ius Sanguinis :

Suatu cara penetapan kewarganegaraan seseorang berdasarkan garis keturunan, yakni garis keturunan orang tuanya tanpa melihat di mana ia dilahirkan

Ius Soli :

Suatu cara penetapan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran

Kedaulatan :

Wewenang tertinggi suatu kesatuan politik yang tidak terletak di bawah kekuasaan lain.

Komunitas :

Masyarakat.

Legislasi :

Pembuat undang-undang

Motivasi :

Suatu kondisi dalam diri individu yang mendorong individu untuk berbuat mencapai tujuan.

Multinasional :

Berada di banyak negara

Nature :

Kepribadian seseorang yang terbentuk dari bawaan lahir / bakat

Naturalis :

Suatu cara penetapan kewarganegaraan seseorang berdasarkan proses hukum kewarganegaraan yang berlaku dalam suatu negara (yakni memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan) yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan kewarganegaraannya.

Nature :

Kepribadian seseorang terbentuk karena pengaruh lingkungan

Otonomi daerah :

Hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi :

Berturut serta dalam suatu kegiatan.

Pemerintah :

Kekuasaan negara yang hanya dilaksanakan oleh lembaga eksekutif.

Pemerintahan :

Kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Pengakuan de facto :

Pengakuan berdasarkan kenyataan (fakta)

Pengakuan de jure :

Pengakuan terhadap sahnya suatu negara menurut hukum Internasional.

Politik :

Sesuatu yang berkaitan dengan kebijaksanaan yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengatur negara dan bangsa.

Potensi diri :

Kemampuan seseorang yang sifatnya masih tersimpan.

Pragmatis :

Hal-hal yang bermanfaat

Prakarsa :

Inisiatif atau usaha (tindakan, gagasan, dan sebagainya)

Prestasi diri :

Hasil usaha atau kegiatan yang dilakukan seseorang

Regional :

Bersifat daerah, kedaerahan

Sentralisasi :

Penyatuan kekuasaan pada pemerintah pusat.

Sishankamrata :

sistem pertahanan keamanan dengan komponen-komponenn yang terdiri dari seluruh potensi, kemampuan, dan kekuatan nasional yang bekerja secara total, integral, serta berlanjut dalam rangka mencapai ketahanan nasional.

Spiritual Quotient :

Kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa sadar

Subsidi :

Bantuan uang dan sebagainya kepada suatu organisasi atau perkumpulan dari pemerintah.

Tugas Pembantuan :

Penugasan dari pemerintah (pusat) kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Tujuan :

Sasaran yang hendak dicapai yang telah ditetapkan terlebih dahulu sasaran yang hendak dicapai yang telah ditetapkan terlebih dahulu

Unsur :

Bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan sehingga bagian-bagian itu menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi.

Indeks

A

AFTA 73
Agustinus 11
ancaman 20,27
Anderson 48

B

bela negara 1,18,19,26

C

Ciciro 3

D

Dahlan 17
Davis 47
de facto 8, 30
de jure 8, 30
dekonsentrasi 36
desentralisasi 35,36,37

Dunn 48

Dye 48

E

evaluasi 53

F

fungsi negara 13

G

Gardner 93
globalisasi 61,75,77

H

hakikat negara 2
Hegel 3
Hougerwert 48

I

ilegal 74
IMF 64
ius sanguinus 6,30
ius soli 6, 30

J

Jellineck 3

K

Kebijakan publik 47, 50, 51,54
kepala daerah 42
keunggulan bangsa 97
Konvensi Montevideo 4
KTP 5

La Rose 95

L

Lauterpackt 4

M

Mac Iver 13
Mahkamah internasional 67
Mc Grew 63
Mirriam 3,4, 11,12

N

NAFTA 72
naturalisasi 6, 30
Non Blok 75

O

otonomi daerah 35,37,39,40

P

partisipasi 46
patriotisme 27
pemerintah daerah 41
pemerintahan 7
pengertian negara 3,15,17,18
pertahanan negara 13,19
pertahanan semesta 22
Plano 48
Plato 12
politik luar negeri 69
potensi diri 91,92
Power 88
prestasi diri 85, 87
primer 9
Pringgodigdo 4

Q

Qowiy 89

R

rakyat 5, 8

rakyat terlatih 26.27

Richter 64

S

Saltau 3

sekunder 10

sentralisasi 35

sistem pertahanan 22

Soenarko 3

syarat administrasi 39

syarat fisik 39

syarat negara 4

syarat teknis 38

T

teknologi informasi 66

teknologi transportasi 66

Tiyanto 46

tujuan negara 10,11,14

U

unsur deklaratif 4

unsur konstitutif 4

unsur negara 4

W

warga negara 4, 8, 10

Waters 63

Wijianto 77

wilayah 4,7, 23

WTO 67

Daftar Pustaka

- Azhary. 1974. *Ilmu Negara Pembahasan Buku Prof. Mr.R. Kranenburg*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Margono, Taufik Rahman. 2003. *Kewarganegaraan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiyanto. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- 2005. *Kewarganegaraan untuk SMA Kelas X*. Jakarta: Erlangga.
- 2005. *Kewarganegaraan untuk SMA Kelas XI*. Jakarta: Erlangga
- 2005. *Kewarganegaraan untuk SMA Kelas XII*. Jakarta: Erlangga
- Citra Triwanto P. 2004. *Kewarganegaraan untuk SMA Kelas 3*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- 2004. *Kewarganegaraan untuk SMA Kelas 2*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- C.S.T. Kanssil. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Depdiknas.2005. *Kurikulum 2004 Pendidikan Kewarganegaraan SMP*. Jakarta: Depdiknas.
- 2005. *Materi Latihan Terintegrasi Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- 2006. *Kurikulum 2006 Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Endang Zaelani Sukaya. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Engkoswara.1999. *Menuju Indonesia Modern*. Bandung: Penerbit Yayasan Amal Keluarga.

- Inu Kencana Syafie. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan* . Bandung: Refika Aditama.
- Kaelan.1993. *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- La Rose. 1991. *Pengembangan Pesona Pribadi*. Jakarta: Pustaka Kartini
- Max Boli Sabon. 1992. *Ilmu Negara*: Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Miriam Budiardjo. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia
- Muhlisin, Cahyaningsih. 2005. *Kewarganegaraan untuk SMP Kelas 3*. Jakarta: Ganeca Exact.
- 2005. *Kewarganegaraan Untuk SMP Kealas 1*. Jakrta: Ganesa Exact
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2004. *Landasan Psikologi Pendidikan*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.
- Paulus Santosa, M. Siringo-ringo. 2003. *Kewarganegaraan 1*. Bekasi: Galaxy Puspa Mega.
- Saronji Dahlan, Asy “ari. 2005. *Kewarganegaraan*. Jakarta; Penerbit Erlangga
- Sugiharsa, Gunawan. 2004. *Kewarganegaraan* . Klaten: CV. Sahabat
- Sumadi Suryabrata.2004. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tim Abadi Guru. 2004. *Kewarganegaraan untuk Kelas VII*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Vembriarto.1994. *Kamus Pendidikan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Wijianto. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan SMP dan MTs Kelas IX*. Jakarta: Piranti Darma Kalokatama.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000
- Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 1982. Ketentuan Pokok
Pertahanan Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No 22 tahun 1999 Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 56 tahun 1999 tentang Rakyat terlatih

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat
Dan Pemerintah Daerah

PP No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia.

Harian Kedaulatan Rakyat, Edisi 1 September 2006

Harian Kompas, Edisi 15 September 2006

Harian Kompas, Edisi 17 September 2006



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Untuk SMP / MTs Kelas IX

Buku ini disusun agar siswa dapat memiliki kompetensi yang sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Untuk itulah buku ini dilengkapi ilustrasi yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari. Ilustrasi ini dimaksudkan agar siswa lebih mudah memahami materi pelajaran. Penulis juga melengkapi buku ini dengan peta konsep, berbagai bahan diskusi, tugas, soal latihan pada akhir bab maupun pada akhir buku. Juga terdapat rangkuman maupun info yang melengkapi materi pelajaran.

Penulis buku ini dipilih dari kalangan pendidik. Mereka adalah guru berpengalaman yang sehari-hari memang mengajar Pendidikan Kewarganegaraan. Selain berlatarbelakang pendidikan bidang studi itu, kemampuan mereka diasah dengan berbagai pelatihan maupun lokakarya. Pengalaman ini diharapkan mampu mencapai tujuan dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

ISBN 978-979-068-878-0 (no jld lengkap)

ISBN 978-979-068-891-9

Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tanggal 25 Juli 2007 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran.

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp6.960,-